



BAB IV

PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

Bab ini memuat laporan penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013. Laporan bab ini memberikan gambaran program dan kegiatan yang dilaksanakan realisasinya, serta permasalahan solusi penyelesaian masalah. Secara umum bab ini terdiri dari :

1. *Urusan Wajib*
2. *Urusan Pilihan*

Pemerintah mempunyai fungsi sebagai regulator, fasilitator dan administrator dalam upaya mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan fungsi tersebut salah satunya diimplementasikan dalam bentuk penentuan skala prioritas pengeluaran pemerintah melalui APBD dan APBN dalam pelaksanaan program dan kegiatan, sebagai stimulus ekonomi dan peningkatan daya beli masyarakat. Dengan memberikan stimulus fiskal kepada masyarakat berarti masyarakat memperoleh penghasilan dari pekerjaan dan inflasi tetap terjaga serta konsumsi dalam negeri dapat didorong. Program-program dan kegiatan-kegiatan tersebut secara konkrit dilaksanakan oleh SKPD-SKPD yang terbagi dalam urusan Wajib dan Pilihan.

A. URUSAN WAJIB

1. Dinas Pendidikan

Dinas Pendidikan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pendidikan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Fungsi pendidikan sangat strategis dan penting dalam upaya mewujudkan kemajuan dan peningkatan kemakmuran masyarakat, bahkan berkorelasi dengan upaya-upaya peningkatan kesempatan kerja dan mengurangi kemiskinan. Oleh karenanya, fungsi pendidikan merupakan salah satu prioritas urusan wajib yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan. Selama Tahun 2013, Dinas Pendidikan



melaksanakan 12 program dan 96 kegiatan. Secara terperinci anggaran dan realisasi penyerapan anggaran Dinas Pendidikan sebagaimana tabel 4.1 dibawah ini.

Tabel 4.1
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pendidikan
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.781.277.800,00	1.607.154.080,00	90,22
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	714.470.000,00	673.517.330,00	94,27
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	16.000.000,00	15.680.000,00	98,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	51.081.000,00	49.844.750,00	97,58
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	85.920.000,00	84.909.700,00	98,82
Program Pendidikan Anak Usia Dini	5.036.191.000,00	4.999.032.000,00	99,26
Program Wajib Belajar Pendidikan dasar sembilan tahun	33.528.226.500,00	32.567.869.750,00	97,14
Program Pendidikan menengah	7.194.201.100,00	6.539.312.499,00	90,90
Program Pendidikan non Formal	755.553.000,00	747.417.650,00	98,92
Program Pendidikan luar biasa	193.250.000,00	193.250.000,00	100,00
Program peningkatan mutu pendidikan dan tenaga kependidikan	1.641.412.000,00	1.545.464.000,00	94,15
Program manajemen pelayanan pendidikan	2.912.205.925,00	2.485.828.725,00	85,36
JUMLAH	53.909.788.325,00	51.509.280.484,00	95,55

a. Program Pendidikan Anak Usia Dini

Program ini dilaksanakan untuk memberikan kesempatan kepada semua anak 0-6 tahun tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai potensi dan tahap perkembangannya serta sebagai persiapan untuk mengikuti pendidikan jenjang sekolah dasar. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dibuatlah beberapa kegiatan diantaranya pembangunan gedung sekolah; penambahan ruang kelas; pembangunan sarana air bersih dan sanitasi; rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; pelatihan kompetensi tenaga pendidik; penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama PAUD; serta publikasi dan sosialisasi pendidikan anak usia dini.

b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Program Pendidikan Dasar 9 Tahun, bertujuan untuk meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas dan terjangkau. Untuk mencapai tujuan dari Program Pendidikan Dasar 9 Tahun ini telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang antara lain : penambahan ruang kelas



sekolah; pembangunan laboratorium dan ruang praktikum sekolah; pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir; pembangunan perpustakaan sekolah; pembangunan sarana air bersih dan sanitary; pengadaan alat praktik dan peraga siswa; pengadaan meubeleur sekolah; rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah; pembangunan rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah; pelatihan penyusunan kurikulum kegiatan; penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren dan satuan pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP; penyelenggaraan paket A setara SD; penyelenggaraan paket B setara SMP; pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa; penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar; monitoring, evaluasi dan pelaporan; serta pembinaan sekolah sehat/berwawasan.

c. Program Pendidikan Menengah

Dalam upaya untuk mencapai sasaran dari Program Pendidikan Menengah, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya : pembangunan laboratorium dan ruang kelas praktikum sekolah (bahasa, komputer, IPA, APS da lain-lain); pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir; pengadaan alat praktik dan peraga siswa; pengadaan meubeleur sekolah; rehabilitasi sedang/berat ruang kelas sekolah; pelatihan kompetensi tenaga pendidik; pelatihan penyusunan kurikulum; penyediaan bantuan operasional manajemen mutu (BOMM)/pengganti komite; penyelenggaraan paket C setara SMU; pembinaan kelembagaan dan manajemen sekolah dengan penerapan manajemen berbasis sekolah (MBS); monitoring, evaluasi dan pelaporan; pembinaan minat, bakat dan kreativitas siswa; pembinaan perguruan tinggi; serta pembinaan sekolah/berwawasan lingkungan hidup.

d. Program Pendidikan Non Formal

Pelaksanaan Program Pendidikan Non Formal bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang kurang beruntung dan atau sebagai pengganti, penambah atau pelengkap pendidikan formal. Program ini dilaksanakan juga untuk mengembangkan potensi peserta didik melalui berbagai keterampilan yang dimiliki. Adapun untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa kegiatan diantaranya pemberdayaan tenaga pendidik non formal; pemberian bantuan operasional pendidikan non formal; pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan; pengembangan pendidikan keaksaraan; pengembangan pendidikan dan kecakapan hidup; pengembangan kurikulum,



bahan ajar dan model pembelajaran pendidikan non formal; serta monitoring dan evaluasi.

e. Program Pendidikan Luar Biasa

Program Pendidikan Luar Biasa dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pendidik bagi anak yang memiliki kelemahan fisik dan mental. Untuk mencapai sasaran dari program ini, telah dilaksanakan kegiatan antara lain : pengadaan perlengkapan sekolah; pengadaan alat praktek dan peraga siswa; serta penyediaan makan minum siswa dan pengurus SDLB;

f. Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Peningkatan Kualitas atau Mutu Pendidik sangat dipengaruhi oleh kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dilaksanakanlah program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan, telah dilaksanakan beberapa kegiatan yang diantaranya pelaksanaan sertifikasi pendidik; pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan; pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi; pembinaan kelompok kerja guru (KKG); pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

g. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan dilaksanakan bertujuan untuk mewujudkan penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dilaksanakan beberapa kegiatan antara lain pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan; pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dana dekonsentrasi dan dana bantuan; sosialisasi dan advokasi berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan; penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan; penyelenggaraan pelatihan, seminar dan lokakarya, serta diskusi ilmiah tentang berbagai isu pendidikan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; penyusunan perencanaan dan program; serta EDS-Evaluasi Diri Sekolah.

Dari berbagai kombinasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan pada tahun 2013 dapat terlihat adanya perkembangan dan peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang tercermin dari Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), sarana prasarana sekolah, tingkat kelulusan, melek huruf, Angka Partisipasi Sekolah, ratio ketersediaan sekolah



terhadap jumlah penduduk kelompok usia tertentu serta ratio ketersediaan guru terhadap murid.

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan proporsi jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan. Sebagai gambaran APM untuk tingkat SD yang merupakan proporsi jumlah murid SD berusia 7 – 12 tahun terhadap jumlah seluruh anak yang berusia 7 – 12 tahun.

Angka Partisipasi Murni (APM) pada umumnya digunakan untuk melihat penduduk khususnya penduduk usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu. Dalam hal seluruh anak usia sekolah dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan mencapai 100 persen. Sebaliknya, jika hanya sebagian anak usia sekolah yang dapat bersekolah tepat waktu, maka nilai APM akan lebih kecil dari 100 persen. Secara umum, nilai APM akan selalu lebih rendah dari nilai APK dan APS, karena APK dan APS menyangkut anak diluar usia sekolah dan beberapa jenjang pendidikan. Pada umumnya nilai APM untuk semua jenjang pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur selalu lebih tinggi dibandingkan dengan APM tingkat Provinsi Jambi walaupun belum mencapai 100 persen. Proporsi terbesar terdapat pada jenjang pendidikan SD/MI, kemudian diikuti jenjang pendidikan SLTP/MTs dan jenjang pendidikan SLTA/MA. Hal ini mengindikasikan bahwa kesempatan penduduk yang dapat sekolah tepat pada waktunya atau usia (7-12).

Tabel 4.2
Capaian APM dan APK
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2013

NO	Aspek Pendidikan	Tanjung-Tim	Tahun	
			2012	2013
I	APM			
1	SD/MI	Positif	96,97	97,06
2	SMP/MTs	Positif	78,45	78,74
3	SMA/SMK/MA	Positif	58,91	58,92
II	APK			
1	SD/MI	Negatif	112	110
2	SMP/MTs	Positif	84,42	92,65
3	SMA/SMK/MA	Positif	65,86	65,04

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Jika dilihat pencapaian APM sampai dengan tahun 2013 yang mencapai 97,06 persen pada tingkat SD, dan 78,74 untuk tingkat SLTP sedangkan SMA/SMK



mencapai 58,92 persen, maka dapat dikatakan bahwa pencapai tersebut sudah memenuhi target pencapaian RPJMD 2011-2016.

Untuk Angka Melek Huruf mencapai 96,51 persen yang artinya bahwa masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk usia diatas 15 tahun keatas sebagian besar telah dapat membaca dan menulis, ini merupakan modal dasar bagi daerah untuk mentransformasi pembangunan yang dilaksanakan di daerah. Masyarakat akan dapat membaca informasi tentang pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang pada akhirnya masyarakat mampu menjadi subjek pembangunan dan memiliki peran untuk menentukan arah pembangunan yang diinginkan. Angka melek huruf di sebelas kecamatan diatas 90 persen, angka melek huruf terendah di kecamatan Mendahara dan Mendahara Ulu yaitu 93,25 persen sedang tertinggi di kecamatan Rantau Rasau yaitu 99,96 persen. Trend positif juga terjadi pada indikator melek huruf ini, jika pada tahun 2010 angka melek huruf sebesar 94,96 persen pada tahun 2011 dan 2012 meningkat yaitu berturut-turut sebesar 95,49 persen dan 96,02 persen, sedangkan untuk tahun 2013 sebesar 96,51 persen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Angka Melek Huruf
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2010-2013

NO	Kecamatan	Jumlah penduduk usia diatas 15 tahun yang bisa membaca dan menulis (orang)	Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas (orang)	Angka melek huruf (%)
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	10.593	10.983	96,45
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	22.717	23.065	98,49
3	Kecamatan Mendahara	17.559	18.831	93,25
4	Kecamatan Mendahara Ulu	9.675	10.327	93,25
5	Kecamatan Geragai	15.042	15.478	93,69
6	Kecamatan Dendang	10.492	10.843	97,18
7	Kecamatan Kuala Jambi	9.810	10.155	96,76
8	Kecamatan Sadu	8.745	9.020	96,60
9	Kecamatan Nipah Panjang	17.843	18.654	96,65
10	Kecamatan Berbak	6.853	7.020	97,61
11	Kecamatan Rantau Rasau	16.684	16.860	98,96
JUMLAH 2013		146.012	151.236	96,51
2012		143.824	149.787	96,02
2011		139.541	146.134	95,49
2010		137.816	145.129	94,96

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur



Pembebasan biaya pendidikan dan pelayanan kesehatan dasar di kabupaten yang telah dilaksanakan sejak tahun 2003 memberi dampak yang cukup bermakna, hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya persentase penduduk yang mengikuti dan menamatkan SD, SMP maupun SMA/SMK. Seperti yang terlihat pada tabel 4.4, tingkat kelulusan SD, SMP, maupun SMA/SMK tahun 2012-2013 elalu diatas 95 %.

Tabel 4.4
Tingkat Kelulusan dan Jumlah Kelompok Belajar
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2013

No	Uraian	2012	2013
1	2	3	4
I	Tingkat kelulusan		
	SD	100%	100%
	SMP	99,87%	99,83%
	SMA/SMK	99,85%	98,84%
II	Jumlah Kelompok Belajar Masyarakat	11	11

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Selain indikator tersebut, Dinas Pendidikan juga telah melaksanakan kegiatan-kegiatan dengan hasil yang cukup signifikan seperti pada tabel 4.5 dibawah ini

Tabel 4.5
Hasil Kegiatan Dinas Pendidikan Tahun 2012-2013

No	Uraian	2012	2013
1	2	3	4
I	a. Ruang kelas yang direhabilitasi berat		
	SD	229	289
	SMP	95	101
	SMA/SMK	9	13
	b. Ruang kelas yang direhabilitasi sedang/ ringan		
	SD	0	0
	SMP	0	0
	SMA/SMK	6	0
II	Sekolah dengan fasilitas perpustakaan		
	SD	80	83
	SMP	38	40
	SMA/SMK	10	10

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur



Rasio ketersediaan sekolah adalah jumlah sekolah tingkat pendidikan dasar per 10.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan dasar.

Rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 untuk penduduk 7 sampai dengan 12 tahun adalah 98,42 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun, sedangkan pada tahun yang sama untuk penduduk 13 sampai dengan 15 tahun adalah 70,79 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun.

Tabel 4.6

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Tahun 2013
Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Kecamatan	SD/MI			SMP/MTs		
		Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 7-12 th	Rasio	Jumlah gedung sekolah	jumlah penduduk usia 13-15 th	Rasio
1	2	3	4	5 = (3/4*10.000)	6	7	8 = (6/7*10.000)
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	15	1.944	77,16	4	858	46,62
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	27	3.430	78,72	13	1.643	79,12
3	Kecamatan Mendahara	27	2.874	93,95	9	1.346	66,86
4	Kecamatan Mendahara Ulu	10	1.800	55,56	7	767	91,26
5	Kecamatan Geragai	24	2.472	97,09	8	1.139	70,24
6	Kecamatan Dendang	18	1.628	110,57	5	654	76,45
7	Kecamatan Kuala Jambi	14	1.743	80,32	7	842	83,14
8	Kecamatan Sadu	19	1.313	144,71	5	656	76,22
9	Kecamatan Nipah Panjang	29	2.991	96,96	8	1.494	53,55
10	Kecamatan Berbak	14	1.187	117,94	5	525	95,24
11	Kecamatan Rantau Rasau	32	2.467	129,71	5	1.250	40,00
JUMLAH		229	23.849	98,42	76	11.174	70,79
2012		230	24.362	94,41	76	11.444	66,41
2011		230	24.139	95,28	74	11.291	65,54
2010		230	24.069	95,56	74	11.212	66,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Dilihat dari tabel 4.6, jumlah gedung sekolah SD/MI terbanyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di Kecamatan Rantau Rasau yaitu 32 (tiga puluh) unit dan kecamatan Mendahara Ulu merupakan kecamatan yang memiliki gedung sekolah paling sedikit yaitu 10 (sepuluh) unit. Sedangkan jumlah gedung sekolah SMP/MTs terbanyak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terletak di kecamatan Muara Sabak



Timur yaitu 13 (tiga belas) unit, dan paling sedikit di Kecamatan Muara Sabak Barat yaitu sebanyak 4 (empat) unit. Hal ini memperlihatkan bahwa sarana pendidikan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sudah tersebar di seluruh Kecamatan.

Rasio ketersediaan sekolah paling tinggi untuk SD/MI di kecamatan Sadu yaitu sebesar 144,71 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun sedangkan untuk SMP/MTs di kecamatan Berbak yaitu sebesar 95,24 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun. Sedangkan Rasio ketersediaan sekolah paling rendah untuk SD/MI di kecamatan Mendahara Ulu yaitu sebesar 55,56 per 10.000 penduduk usia 7-12 tahun sedangkan untuk SMP/MTs di kecamatan Rantau Rasau yaitu sebesar 40,00 per 10.000 penduduk usia 13-15 tahun.

Tabel 4.7

Rasio Guru Terhadap Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2013
Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur

NO	Kecamatan	SD			SMP/MTs		
		Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio
1	2	3	4	5 = (3/4*1.000)	6	7	8 = (6/7*1.000)
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	141	2.185	64,53	40	600	66,67
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	186	3.532	52,66	63	1.076	58,55
3	Kecamatan Mendahara	109	2.672	40,79	29	362	80,11
4	Kecamatan Mendahara Ulu	70	2.046	34,21	38	497	76,46
5	Kecamatan Geragai	205	2.767	74,09	59	837	70,49
6	Kecamatan Dendang	121	1.791	67,56	43	546	78,75
7	Kecamatan Kuala Jambi	93	1.633	56,95	28	509	55,01
8	Kecamatan Sadu	73	1.609	45,37	22	401	54,86
9	Kecamatan Nipah Panjang	204	2.926	69,72	71	1.020	69,61
10	Kecamatan Berbak	65	992	65,52	23	236	97,46
11	Kecamatan Rantau Rasau	251	2.401	104,54	47	910	51,65
JUMLAH		1.518	24.554	61,82	463	6.994	66,20
2012		1.539	25.748	59,77	491	9.662	50,82
2011		1.605	27.037	59,36	491	9.584	51,23
2010		1.593	27.659	57,59	480	9.522	50,41

Sumber : Dinas Pendidikan Kab. Tanjung Jabung Timur

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru tingkat pendidikan dasar per 1.000 jumlah murid pendidikan dasar. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar



Dilihat dari tabel 4.7 di atas, rasio guru terhadap murid di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami trend positif setiap tahunnya, yaitu dari rasio 59,77 per 1.000 murid SD/MI pada tahun 2012 menjadi 61,82 per 1.000 murid SD/MI pada tahun 2012, sedangkan pada jenjang pendidikan SMP/MTs meningkat dari 50,82 per 1.000 murid SMP/MTs pada tahun 2012 menjadi 66,20 per 1.000 murid SMP/MTs pada tahun 2013.

Jumlah tenaga pengajar yang tersedia pada suatu sekolah baik secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan di suatu sekolah. Semakin besar angka rasio ini, angka mutu pendidikan diharapkan akan lebih baik, dibanding sekolah yang mempunyai tenaga pengajar yang sedikit. Rasio tertinggi pada jenjang SD/MI tahun 2013 terdapat di kecamatan Rantau Rasau yaitu sebesar 104,54 per 1.000 murid SD/MI dan terendah di kecamatan Mendahara Ulu yaitu sebesar 34,21 per 1.000 murid SD/MI. Sedangkan pada jenjang SMP/MTs dengan tahun yang sama, rasio tertinggi terdapat pada kecamatan Berbak yaitu sebesar 97,46 per 1.000 murid SMP/MTs dan terendah di kecamatan Rantau Rasau yaitu masing-masing sebesar 51,65 per 1.000 murid SMP/MTs.

2. Dinas Kesehatan

Dinas Kesehatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kesehatan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kesehatan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang kesehatan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kesehatan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Kesehatan melaksanakan 19 program dan 89 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kesehatan tertera dalam tabel 4.8 dibawah ini.



Tabel 4.8
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kesehatan
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.522.820.400,00	1.388.821.157,00	91,20
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.418.696.000,00	1.351.865.690,00	95,29
Program Peningkatan disiplin Aparatur	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	568.459.000,00	535.638.400,00	94,23
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	2.817.449.500,00	2.695.404.034,00	95,67
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	6.135.521.500,00	5.712.002.727,00	93,10
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	302.810.000,00	294.492.500,00	97,25
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	429.530.500,00	421.709.500,00	98,18
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	480.170.000,00	416.175.000,00	86,67
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1.100.039.000,00	1.020.295.082,00	92,75
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	220.800.000,00	214.700.000,00	97,24
Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan prasarana Puskesmas/Puskesmas pembantu dan jaringannya	5.771.318.000,00	4.763.667.839,00	82,54
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	44.510.000,00	44.510.000,00	100,00
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan balita	70.786.000,00	66.586.000,00	94,07
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan	37.932.500,00	37.401.500,00	98,60
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	373.139.000,00	369.439.000,00	99,01
Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan	620.009.600,00	604.905.200,00	97,56
Program pengembangan kesehatan	56.125.000,00	34.994.000,00	92,92
Program perizinan praktek kesehatan	15.875.000,00	14.500.000,00	91,34
JUMLAH	22.010.991.000,00	20.012.107.629,00	90,92

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan telah dibuat beberapa kegiatan diantaranya pengadaan obat dan perbekalan kesehatan; pemantauan ketersediaan obat; pemusnahan obat di puskesmas; harmonisasi pengadaan dan



penggunaan obat program dan PKD; serta sosialisasi BATRA (pengobatan tradisional).

b. Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk meningkatkan jumlah, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan melalui puskesmas dan jaringannya meliputi Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Bidan di Desa. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dibuatlah beberapa kegiatan diantaranya Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas dan jaringannya; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Barat; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Pandan; penyediaan biaya Operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Tuan; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Muara Sabak Timur; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simbur Naik; penyediaan dan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Lambur; Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Kampung Laut; penyediaan Biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Dendang; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Rantau Rasau; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Tering; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Nipah Panjang; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Mendahara; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Pangkal Duri; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Simpang Berbak; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Lokan; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Sungai Jambat; penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan Puskesmas Air Hitam Laut; Pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah(UKS); penyediaan biaya operasional instalasi farmasi; serta pemilihan tenaga kesehatan teladan.

c. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini ditujukan untuk memberdayakan individu, keluarga, dan masyarakat agar mampu mengembangkan upaya kesehatan bersumber masyarakat. kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini antara lain : pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat; penyuluhan masyarakat pola hidup sehat; pengembangan desa siaga; serta peningkatan penjangkauan kesehatan siswa SD/MI.



d. Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran gizi keluarga dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat terutama pada ibu hamil, bayi dan balita. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini antara lain : penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi; pemberian tambahan makanan dan vitamin; pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi; pelatihan kader posyandu; serta pelatihan peningkatan konseling menyusui bagi petugas puskesmas.

e. Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Program ini ditujukan untuk mewujudkan mutu lingkungan hidup yang lebih sehat. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dibuatlah beberapa kegiatan diantaranya penyuluhan menciptakan lingkungan sehat; sosialisasi kebijakan lingkungan sehat; pengawasan kualitas air minum; pembentukan dan pelatihan kader keliling; serta percepatan sanitasi pemukiman.

f. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Program ini bertujuan untuk menurunkan angka kesakitan, kematian dan kecacatan akibat penyakit menular dan penyakit tidak menular. Prioritas penyakit menular yang akan ditanggulangi adalah malaria, demam berdarah dengue, diare, polio, filaria, kusta, TB, HIV/AIDS, pneumonia, dan penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Prioritas penyakit tidak menular yang ditanggulangi adalah penyakit jantung dan gangguan sirkulasi, diabetes mellitus, dan neoplasma. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah : pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah; pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular; serta peningkatan surveillance epidemiologi dan penanggulangan wabah.

g. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat penduduk miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal secara efektif dan efisien. Kegiatan pokok yang dilakukan dalam program ini berupa pelayanan operasi katarak; pelayanan operasi bibir sumbing; pelayanan pengobatan dokter spesialis bedah dan obgen di puskesmas Nipah Panjang; serta pelayanan kesehatan masyarakat daerah terpencil (DPTK).



h. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/ Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

Program ini ditujukan guna lebih meningkatkan fasilitas pelayanan masyarakat di desa yang ditunjang dengan kegiatan berupa pembangunan puskesmas dan pengadaan sarana dan prasarana puskesmas.

i. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kemitraan dalam pelayanan kesehatan yang bersifat medis dan kearifan lokal. Kegiatan yang mendukung program ini ialah kemitraan bidan-dukun.

j. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia dan Balita

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan yang bersifat khusus bagi lanjut usia dan balita, adapun kegiatan yang dibuat dalam mencapai sasaran berupa pelayanan pemeliharaan kesehatan lansia dan balita.

k. Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Program ini bertujuan untuk menjamin kesehatan makanan dan minuman hasil produksi rumah tangga serta obat-obatan yang akan dikonsumsi oleh masyarakat, adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung program ini berupa pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan/minuman hasil produksi rumah tangga dan obat-obatan.

l. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak bertujuan untuk menurunkan jumlah kematian ibu melahirkan, bayi baru lahir dan anak. Untuk mencapai sasaran yang diinginkan maka dibuatlah beberapa kegiatan berupa pertemuan audit maternal (AMP) perinatal; pelatihan program perencanaan persalinan dan pencegahan komplikasi (P4K); pelatihan stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK); implementasi ANC (Ante Natal Care) terintegrasi; sosialisasi kelompok peminat kesehatan ibu dan anak; pertemuan koordinasi lintas program KIA, gizi dan P2M; serta sosialisasi pelayanan kesehatan peduli remaja.

m. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Program ini bertujuan untuk mendukung pelayanan kesehatan dengan meningkatkan kapasitas petugas kesehatan untuk membuat keputusan berdasarkan informasi yang akurat. Adapun kegiatan pokok dari program ini antara lain : peningkatan sistem informasi kesehatan; peningkatan manajemen dan



kebijakan kesehatan; peningkatan perencanaan puskesmas; pemutakhiran data kesehatan kabupaten; serta peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu.

n. Program Pengembangan Kesehatan

Program ini bertujuan untuk lebih memperluas jangkauan pola hidup sehat yang ada di masyarakat, adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu Upaya Kesehatan Masyarakat (UKK) dan pembinaan Palang Merah Indonesia (PMI).

o. Program Perizinan Praktek Kesehatan

Program ini bertujuan untuk lebih menjamin kualitas pelayanan dari izin praktek dokter yang diberikan, adapun kegiatan yang mendukung program ini yaitu Peningkatan pembinaan dan pengawasan izin praktek.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM pada Dinas Kesehatan sehingga ada beberapa kegiatan yang direncanakan tidak dapat terlaksana sepenuhnya.
- 2) Masih lemahnya administrasi terutama pada pencatatan dan pelaporan sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
- 3) Masih kurangnya tenaga dokter gigi dan dokter umum untuk setiap puskesmas, terutama puskesmas terpencil, sehingga pelayanan yang bermutu yang diterima oleh masyarakat masih belum maksimal.
- 4) Rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan terutama PHBS.
- 5) Sarana dan Prasarana kesehatan belum lengkap.
- 6) Masih ada 8 puskesmas yang tidak memiliki tenaga analis kesehatan, 12 puskesmas yang tidak memiliki tenaga gizi dan 10 puskesmas tidak memiliki tenaga dokter gigi.
- 7) Keterlambatan pengiriman laporan pelaksanaan program dari puskesmas mengakibatkan pelaksanaan beberapa kegiatan tidak tercapai.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Telah dilaksanakan perekrutan tenaga, melaksanakan pendidikan lanjutan bagi pegawai dilingkungan Dinas Kesehatan.



- 2) Melakukan bimbingan teknis bagi tenaga administrasi dan program baik di lingkungan Dinas Kesehatan maupun jajaran dibawahnya (Puskesmas).
- 3) Berkoordinasi dengan BKD untuk penempatan tenaga dokter umum, dokter gigi PTT menjadi PNS daerah melalui formasi CPNSD 2014/2015.
- 4) Melaksanakan penyuluhan secara continue, baik secara langsung maupun melalui media informasi.
- 5) Pembangunan dan rehab gedung puskesmas, pustu, polindes, dan poskesdes sesuai dengan prioritas kebutuhan serta pengadaan alat kesehatan dan ambulance.
- 6) Mengusulkan kepada Bupati Tanjung Jabung Timur untuk pengangkatan tenaga fungsional kesehatan melalui formasi CPNS 2013/2014 dan mengusulkan dokter gigi PTT ke pusat.
- 7) Melaksanakan pelatihan bagi beberapa tenaga puskesmas di kabupaten, provinsi dan pusat.

Hasil dari berbagai kegiatan pembangunan kesehatan 2013 tercermin dari pencapaian target dari beberapa indikator pada sasaran status kesehatan dan status gizi masyarakat dan keluarga sadar gizi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.9
Perkembangan Sektor Kesehatan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2013

NO	URAIAN	Target 2013	Capaian 2013
1	Angka harapan hidup	71,61 tahun	71,19 tahun
2	Angka Kematian Bayi	25,04/1000	22,69/1000
3	Angka Kematian neonatal	20,66/1000	21,90/1000
4	Angka Kematian balita	44/1000	24,25/1000
5	Jumlah kematian ibu	10 org	6 org
6	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	80%	90,37%
7	Indeks Pembangunan Manusia	72,6%	71,9%
8	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	65%	71,10%
9	Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	65%	66,21%
10	Cakupan pelayanan nifas	80%	92,06%
11	Cakupan kunjungan bayi	89%	96,11%
12	Cakupan kunjungan K4	85%	89,44%



13	Persentase balita gizi buruk	0,3%	0,03%
14	Persentase balita gizi buruk yang mendapatkan perawatan	100%	100%
15	Persentase balita gizi kurang	18%	0,95%
16	Prevelensi anak-anak dibawah berat badan normal	0,45%	0,55%

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Tanjung Jabung Timur

Berdasarkan uraian di atas dan sejalan dengan implementasi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan Yang Berkeadilan, Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur optimis dapat mencapai target MDG's (tujuan pembangunan millenium) pada tahun 2015, karena program yang dilaksanakan selama ini sudah dalam jalur yang tepat, dan tetap dilaksanakan secara berkesinambungan.

3. RSUD Nurdin Hamzah

RSUD Nurdin Hamzah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 31 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural RSUD Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. RSUD Nurdin Hamzah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Rumah Sakit Umum;
2. Pengkoordinasian Rumah Sakit Umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, RSUD Nurdin Hamzah melaksanakan 11 program dan 37 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja RSUD Nurdin Hamzah tertera dalam tabel 4.10 dibawah ini.

Tabel 4.10
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Rumah Sakit Umum Daerah
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.455.894.200,00	3.261.896.454,00	94,39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.534.094.000,00	1.244.409.650,00	81,12



Program Peningkatan Disiplin Aparatur	97.750.000,00	81.535.500,00	83,41
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	250.226.000,00	227.908.300,00	91,08
Program obat dan perbekalan kesehatan	12.277.000,00	11.802.000,00	96,13
Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	8.400.000,00	8.400.000,00	100,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	154.858.800,00	141.680.800,00	91,49
Program Pengadaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	3.302.891.000,00	3.185.086.509,00	96,43
Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata	616.929.500,00	505.903.000,00	82,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	297.800.000,00	278.250.000,00	93,44
Program peningkatan sistem informasi kesehatan	154.250.000,00	151.136.900,00	97,98
JUMLAH	9.885.370.500,00	9.098.009.113,00	92,04

a. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Dalam upaya lebih menjamin mutu obat dan perbekalan kesehatan maka dibuat program ini dengan kegiatan pendukung peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan.

b. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Program ini ditujukan sebagai upaya meningkatkan pola hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat. Untuk pembelajaran tersebut dilaksanakan pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

c. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Dalam upaya mencapai standarisasi pelayanan kesehatan, RSUD Nurdin Hamzah melaksanakan kegiatan berupa penyusunan standar pelayanan kesehatan.

d. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dengan kegiatan berupa pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit; pengadaan obat-obatan rumah sakit; pengadaan perlengkapan rumah tangga rumah sakit (dapur, ruang pasien, laundry, ruang tunggu dan lain-lain); pengadaan bahan-bahan logistik rumah sakit; serta pengadaan pencetakan administrasi dan surat menyurat rumah sakit.



e. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

Program ini bertujuan untuk menjaga atau memelihara aset rumah sakit, adapun kegiatan-kegiatan yang mendukung antara lain : pemeliharaan rutin/berkala rumah sakit; pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kesehatan rumah sakit; serta pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah sakit.

f. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Kegiatan pokoknya berupa Kegiatan kemitraan alih teknologi kedokteran dan kesehatan.

g. Program Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan

Program ini bertujuan untuk melaksanakan strategi manajemen guna upaya peningkatan pelayanan rumah sakit, adapun program ini didukung oleh beberapa kegiatan antara lain : peningkatan manajemen dan kebijakan kesehatan; pemuktakhiran data kesehatan kabupaten; peningkatan monitoring dan evaluasi kesehatan terpadu; serta peningkatan perencanaan rumah sakit.

Permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh RSUD Nurdin Hamzah dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Keterbatasan sumber daya manusia (SDM), seperti kurangnya tenaga dokter umum dan tenaga dokter spesialis yang tidak menetap di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Kurangnya pemahaman dan komitmen dari tim pelaksana akreditasi (tim penyusun standar pelayanan kesehatan / dokumen-dokumen akreditasi) sehingga belum terlaksana sesuai target.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Memberikan pelayanan dokter spesialis semaksimal mungkin dengan mengoptimalkan peralatan kesehatan yang ada.
- 2) Koordinasi dan konsultasi ke Dinas Kesehatan Provinsi dan Rumah Sakit yang sudah terakreditasi
- 3) Pelatihan bagi pegawai untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman.

Berikut digambarkan kinerja dan perkembangan pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Tahun 2010-2013 pada tabel 4.11 dibawah ini :



Tabel 4.11
Perkembangan Pelayanan pada RSUD
Tahun 2010-2013

URAIAN	TAHUN			
	2010	2011	2012	2013
Bed Occupation Rate (%)	17,7	16,37	25,53	28,08
Length of Stay (Hari)	3	3	3	3
Bed Turn Over (Kali)	31	31	35	36
Turn Over Interval (Hari)	9	10	7	7
Net Death Rate (%)	1,5	1	1,63	0,73
Gross Death Rate (%)	0,015	1,27	1,4	2,15
Jumlah Tempat Tidur (Unit)	41	45	43	44
Jumlah Kematian (Jiwa)	20	18	23	35
Jumlah Rawat Jalan/out patient (Jiwa)	8.811	9.167	10.575	12.469
Jumlah Rawat inap/in patient (Jiwa)	1.078	1.580	1.589	1.771

Sumber : RSUD Nurdin Hamzah

4. Dinas Pekerjaan Umum

Dinas Pekerjaan Umum merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 17 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pekerjaan Umum mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pekerjaan Umum;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pekerjaan Umum;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan 12 program dan 35 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pekerjaan Umum tertera dalam tabel 4.12 dibawah ini.



Tabel 4.12
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pekerjaan Umum
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.389.727.115,00	1.214.965.678,00	87,42
Program Peningkatan Sarana dan Pra sarana Aparatur	6.782.019.466,00	6.184.245.993,00	91,19
Program peningkatan Disiplin Aparatur	33.200.000,00	30.750.000,00	92,62
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	85.000.000,00	58.300.000,00	68,59
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	187.614.793.532,00	175.074.345.528,00	93,32
Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	6.014.918.500,00	5.977.277.500,00	99,37
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1.471.000.000,00	1.249.712.400,00	84,96
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya	28.044.185.999,00	27.490.333.250,00	98,03
Program penyediaan dan pengelolaan air baku	575.000.000,00	567.401.000,00	98,68
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	20.585.639.150,00	19.383.723.152,00	94,16
program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh	69.486.000,00	57.481.381,00	82,72
Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	30.859.987.200,00	29.807.919.473,00	96,59
JUMLAH	283.524.956.962,00	267.096.455.355,00	94,21

a. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas jalan melalui kegiatan pokok antara lain perencanaan pembangunan jalan; pembangunan jalan; perencanaan pembangunan jembatan; dan pembangunan jembatan.

b. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

Program ini dimaksudkan untuk membangun saluran drainase dan gorong-gorong guna meningkatkan daya tampung limpahan air permukaan dan mengurangi kawasan genangan air dengan kegiatan pokok berupa pembangunan saluran drainase/gorong-gorong;

c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

Inti dari program ini yaitu rehabilitasi/pemeliharaan alat berat berupa ekskavator yang beroperasi di kecamatan guna mendukung pembangunan wilayah pedesaan.



d. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

Program ini mempunyai beberapa kegiatan diantaranya perencanaan pembangunan jaringan irigasi; rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi; dan optimalisasi fungsi jaringan irigasi yang telah dibangun.

e. Program Penyediaan dan Pengolahan Air Baku

Untuk mencapai sasaran pokok dari program ini maka dibuatlah kegiatan berupa pembangunan sumur-sumur air tanah.

f. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah

kegiatan pokok sebagai penunjang program ini berupa penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah serta operasional UPTD sistem penyediaan air minum.

g. Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk pengembangan wilayah, untuk mendukung tujuan dari program ini dilaksanakan kegiatan percepatan sanitasi pemukiman di daerah.

h. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan dengan kegiatan berupa pembangunan jalan dan jembatan pedesaan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2013 antara lain :

- 1) Pembangunan prasarana jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang sebagian besar wilayahnya berawa-rawa dan dataran rendah sehingga memerlukan biaya yang tinggi dalam pembangunannya memerlukan penanganan konstruksi secara khusus dengan akses transportasi material yang didatangkan dari luar daerah.
- 2) Penyebaran pembangunan sarana dan prasarana fisik di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang belum merata disetiap daerah terutama jalan-jalan poros menuju desa-desa yang mengakibatkan terhambatnya pembangunan infrastruktur langsung pedesaan atau lingkungan menjadi sedikit terhambat.
- 3) Kurangnya sumber galian C di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyebabkan volume material perkerasan badan jalan memerlukan biaya yang tinggi untuk pengadaannya.



- 4) Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil, maka setiap pembangunan ruas jalan pasti akan diikuti pula dengan pembangunan jembatan, baik dengan bentang panjang maupun bentang pendek.
- 5) Areal pemukiman penduduk yang padat pada beberapa lokasi yang menyebabkan sulitnya pengembangan jalan lingkungan pedesaan.
- 6) Program pengembangan jalan lingkungan pemukiman perdesaan yang memerlukan biaya tinggi, dikarenakan kontruksi yang digunakan merupakan struktur tiang beton bertulang.
- 7) Kondisi geografis kabupaten tanjung jabung timur yang merupakan daerah dataran rendah sangat tidak memungkinkan untuk mensuplai air minum menggunakan sistem gravitasi sehingga dibutuhkan biaya/cost yang tinggi dalam hal pengadaan infrastruktur air minum maupun operasionalnya. Hal ini disebabkan karena masih dibutuhkannya sistem pompanisasi dalam mendistribusikan air minum ke masyarakat.
- 8) Penyebaran penduduk yang tidak merata, hal ini sangat berpengaruh terhadap pembangunan jaringan pipanisasi air minum karena untuk menjangkau masyarakat yang berada di daerah-daerah yang jauh dari ibukota kecamatan dan desa maka diperlukan pipa yang sangat panjang, hal ini kurang memungkinkan karena akan menambah biaya operasional dan juga akan mengurangi debit dari suplay air minum itu sendiri yang berakibat pada kuantitas dan kualitas air minum yang diterima oleh masyarakat kurang baik dan membutuhkan biaya yang sangat tinggi dalam pengolahannya.
- 9) Sumber air baku/intake di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih sangat terbatas, hal ini diakibatkan oleh kondisi topografis daerah yang berada di kawasan pesisir pantai sehingga sumber air baku masih banyak dipengaruhi oleh air asin dan kadar Fe yang tinggi sehingga akan berakibat kurang baik terhadap kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kita.
- 10) Kurangnya kesadaran masyarakat akan menjaga dan merawat instalasi dan Infrastruktur Air minum yang telah terbangun.
- 11) Adanya klaim oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) tentang kebun masyarakat yang termasuk dalam kawasan cagar alam.
- 12) Masih kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sanitasi sehingga masih banyaknya masyarakat yang melakukan Mandi, Cuci dan Buang Air Besar yang tidak pada tempatnya.
- 13) Karena masyarakat banyak tinggal di tepi daerah aliran sungai maka seringkali ditemui masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan ke sungai, hal



ini menjadi kebiasaan buruk masyarakat karena masih kurangnya sosialisasi dan Tempat pembuangan sampah yang jumlahnya masih sangat minim.

- 14) Sistem drainase yang belum ada yang dapat berakibat pada masih adanya di beberapa tempat yang menjadi daerah-daerah genangan air terutama air hujan, hal ini sangat berbahaya sekali karena dapat mengakibatkan banjir pada suatu wilayah.

Solusi dari berbagai permasalahan pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013 :

- 1) Membuat jalur alternative dalam pembangunan lingkungan perdesaan untuk mengupayakan ketersediaan material pembangunan di lokasi kegiatan.
- 2) Meningkatkan pembangunan jalan dengan menggunakan Rigid Pavement sehingga jalan dapat mendukung beban/kendaraan yang lewat sesuai dengan klas/tonnase jalan sehingga jalan dapat berfungsi dengan baik.
- 3) Semaksimal mungkin untuk secepatnya membangun sarana prasarana penghubung untuk meminimalkan biaya pengangkutan material perkerasan ke lokasi pembangunan.
- 4) Melaksanakan anggaran untuk pembangunan jembatan dengan konstruksi beton, sehingga Karakteristik dan topografi wilayah yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil tidak menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur lainnya.
- 5) Dapat meyakinkan masyarakat untuk menyerahkan lahan agar pengembangan jalan lingkungan dapat dilaksanakan.
- 6) Meminimalkan penggunaan material pembangunan dengan metodologi perhitungan struktur beton bertulang yang tepat guna sehingga menyebabkan desain yang kuat, efektif dan efisien.
- 7) Untuk mensiasati biaya yang sangat tinggi dalam pengoperasian Instalasi air minum maka Dinas Pekerjaan Umum mulai mendata dan meng upgrade ulang instalasi-instalasi yang sudah terbangun dan telah berjalan yang semula memakai sistem pompanisasi dengan menggunakan tenaga Genset menjadi sistem pompanisasi dengan menggunakan energi tenaga listrik, karena dengan meng up grade ke energi listrik akan dapat menghemat biaya operasional sampai dengan separuhnya dan akan berdampak baik terhadap nilai subsidi yang diberikan oleh pemerintah daerah setiap tahunnya.
- 8) Dalam rangka mengatasi suplai air minum terhadap penyebaran penduduk yang tidak merata maka Pemerintah Daerah melalui Dinas Pekerjaan umum mulai



mendata Desa-desa dan kelurahan yang rawan terhadap air minum, hal ini dilakukan terutama terhadap desa-desa yang jauh dari Ibukota kecamatan. Hal ini dilakukan untuk mendata daerah-daerah yang menjadi prioritas pembangunan sumur-sumur baru di luar jangkauan pipa air minum. Dengan membangun sumur-sumur bor baru di beberapa titik di Kabupaten Tanjung Jabung Timur maka akan dapat diharapkan pemerataan dalam hal masyarakat yang mendapatkan air bersih dan air minum yang berkualitas sehingga target pencapaian MDGs bidang air minum dapat tercapai.

- 9) Untuk mendapatkan sumber-sumber air baku yang baru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tidaklah mudah, maka untuk itu Pemerintah daerah melalui Dinas Pekerjaan Umum akan menginventarisasi kembali sumber-sumber air baku yang baru dengan mengajak kerjasama tim ahli yang terkait termasuk tim dari Dinas Pekerjaan Umum Propinsi Jambi dan Kementerian Pekerjaan umum.
- 10) Untuk menyadarkan masyarakat dalam hal pentingnya menjaga instalasi air minum yang telah terbangun maka dilakukan sosialisasi secara tidak langsung terhadap masyarakat pengguna dan pemakai air minum yang telah dibangun.
- 11) Melakukan sosialisasi ke masyarakat melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Dinas Pekerjaan umum dan juga kegiatan PKK dan lain sebagainya, hal ini dilakukan untuk memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai akan pentingnya sanitasi dan dampak-dampak buruk yang diakibatkan oleh sanitasi yang buruk.
- 12) Kebiasaan membuang sampah ke sungai akan sangat berdampak buruk bagi masyarakat itu sendiri maupun bagi ekosistem yang ada di sungai, untuk mengatasi hal ini maka pemerintah mengadakan sosialisasi dan membuat tempat pembuangan sampah di beberapa tempat untuk mengurangi penumpukan sampah yang ada di lingkungan masyarakat.
- 13) Untuk mengatasi sistem drainase yang buruk maka Pemerintah melalui Dinas Pekerjaan umum dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah membuat Master Plan pembangunan Sistem drainase yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam rangka mengatasi daerah-daerah genangan air danantisipasi banjir sampai dengan tahun-tahun kedepan
- 14) Melaksanakan koordinasi dengan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) sebelum memulai pekerjaan sehingga tidak terjadi klem terhadap pembangunan dalam kawasan cagar alam.

Sarana prasarana transportasi merupakan unsur penting dalam menunjang perekonomian masyarakat sekaligus peluang untuk meningkatkan investasi baik itu



investasi ekonomi maupun sosial. Ketersediaan sarana jaringan transportasi yang menghubungkan seluruh sumber perekonomian masyarakat akan meningkatkan perputaran barang dan jasa antar daerah, kondisi jalan yang baik akan mengurangi biaya operasional bagi para pelaku usaha. Kesemuanya itu pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Perkembangan jaringan transportasi yang menghubungkan antara ibukota Provinsi Jambi ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan jaringan transportasi dalam kecamatan-kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur dapat terlihat dalam tabel 4.13 dibawah ini:

Tabel 4.13
Perkembangan Jalan Kabupaten Tahun 2010-2013

NO	URAIAN / KONDISI	2010		2011		2012		2013	
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%
I	JENIS PERMUKAAN								
a	Diaspal	147,05	16,17	154,64	16,44	96,15	10,06	148,74	15,23
b	Kerikil	177,82	19,56	209,37	22,26	343,85	35,99	356,91	36,55
c	Tanah	584,28	64,27	576,54	61,3	515,40	53,95	470,90	48,22
d	Lainnya	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH I	909,15	100	940,55	100	955,40	100,00	976,55	100,00
II	KONDISI JALAN								
a	Baik	187,37	20,61	210,97	22,43	254,63	26,65	307,22	31,46
b	Sedang	342,28	37,65	344,1	36,58	374,42	39,19	368,75	37,76
c	Rusak	308,93	33,98	283,51	30,14	235,87	24,69	206,94	21,19
d	Rusak berat	70,57	7,76	101,97	10,84	90,48	9,47	93,63	9,59
	JUMLAH II	909,15	100	940,55	100	955,40	100,00	976,55	100,00
III	PERMUKAAN JALAN								
a	ASPAL	-	-	-	-	96,15	10,06	148,74	15,23
b	KELAS B	-	-	-	-	343,85	35,99	356,91	36,55
c	LAINNYA	-	-	-	-	515,4	53,95	470,90	48,22
	JUMLAH III	909,15	100	940,55	100	955,40	100,00	976,55	100,00

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur

Perkembangan jalan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terus mengalami peningkatan. Panjang jalan dari 909,15 Km pada Tahun 2010 meningkat menjadi 976,55 Km pada Tahun 2013 total jalan yang telah dibangun dan ditingkatkan konstruksinya sehingga dapat dilewati kendaraan roda empat.



Sektor infrastruktur ini mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam upaya mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut, Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum melaksanakan pembangunan dan rehabilitasi fasilitas keinfrastrukturan, baik jalan, jembatan, tanggul, maupun air bersih. Berikut hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum.

Tabel 4.14
Perkemangan Sarana dan Prasarana Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	2010	2011	2012	2013
1	Pembangunan jembatan besi	18 unit	22 unit	15 unit	17 unit
2	Rehabilitasi irigrasi	117.588 M ¹	77.820 M ¹	43.500 M ¹	125.080 M ¹
3	Pembangunan tanggul	88.062 M ¹	122.930 M ¹	96.500 M ¹	42.900 M ¹
4	Pembangunan jalan baru	-	-	14,85 Km	21,150 Km
5	Peningkatan jalan	-	-	94,83 Km	118,24 Km
6	Pembangunan Box Culvert	29 unit	22 unit	52 unit	25 unit
7	Penyediaan air bersih (sumur pompa tangan)	58 unit	-	42 unit	22 unit
8	Cakupan air bersih		-	5,60%	15,75 %

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kab. Tanjung Jabung Timur

5. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan

Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Tatakota dan Kebersihan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Tatakota dan Kebersihan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Tatakota dan Kebersihan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan 10 program dan 28 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan



realisasi penyerapan belanja Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan tertera dalam tabel 4.15 dibawah ini.

Tabel 4.15
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Tata Kota
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	2.518.742.000,00	2.477.083.783,00	98,35
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.502.775.200,00	1.437.297.100,00	95,64
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	176.047.200,00	175.957.000,00	99,95
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	49.329.000,00	98,66
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	13.500.000,00	6.997.000,00	51,83
Program jasa adminidtrasi keuangan	440.580.000,00	379.751.800,00	86,19
Program perencanaan tata ruang	377.000.000,00	318.316.000,00	84,43
Program Pemanfaaaatan Ruang	1.770.960.000,00	1.754.727.900,00	99,08
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	557.223.850,00	547.588.550,00	98,27
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	820.175.000,00	815.896.500,00	99,48
JUMLAH	8.227.003.250,00	7.962.944.633,00	96,79

a. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran

Program ini bertujuan untuk pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran di seluruh wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran.

b. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini ditunjang dengan 2 (dua) kegiatan diantaranya penyusunan rencana tata ruang wilayah serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

c. Program Pemanfaatan Ruang

Program ini ditunjang dengan 3 (tiga) kegiatan diantaranya penyediaan sarana dan prasarana pertamanan; pemasangan lampu jalan jalan, taman dan hutan kota; serta pemeliharaan rutin/berkala lampu taman/instalasi lampu mercury.

d. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Program pengendalian dan pemanfaatan ruang bertujuan untuk mengawasi dan mengendalikan pemanfaatan ruang melalui beberapa kegiatan diantaranya penyediaan sarana dan prasarana persampahan; penyusunan ranperda tentang pengendalian pemanfaatan ruang.



Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas sehingga sangat mempengaruhi operasional kinerja pada Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan.
- 2) Sarana dan Prasarana kantor, operasional kendaraan, maupun peralatan pemadam kebakaran dan kebersihan yang terbatas.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Perlu penambahan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas di Bidang masing – masing Kegiatan Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan agar kinerja lebih baik di tahun selanjutnya.
- 2) Penambahan Anggaran dalam menunjang ketersediaan sarana dan prasarana baik prasarana kantor maupun bidang penataan kota, bidang penanggulangan kebakaran serta bidang kebersihan dan pengelolaan pasar.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana Gedung Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan, guna kelancaran operasional kegiatan interen Dinas Tata Kota, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Dalam upaya mengatasi masalah persampahan, Dinas Tata Kota saat ini baru dapat mengelola sampah di dua kecamatan yaitu kecamatan Muara Sabak Barat dan kecamatan Geragai dengan kapasitas sampah \pm 10 kubik per hari.

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis Perencanaan;
2. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pada Tahun 2013, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah melaksanakan 15 program dan 59 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertera dalam tabel 4.16 dibawah ini.

Tabel 4.16
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Bappeda
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Perencanaan Tata Ruang	1.537.325.000,00	1.504.949.200,00	97,89
Program Pemanfaatan ruang	90.000.000,00	72.750.000,00	80,83
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.137.307.000,00	1.062.354.481,00	93,41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	722.881.000,00	696.973.230,00	96,42
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.400.000,00	14.400.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	28.850.000,00	96,17
Program peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	49.600.000,00	47.343.000,00	95,45
Program Pengembangan Data / Informasi	769.625.000,00	715.935.000,00	93,02
Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh	195.000.000,00	183.524.000,00	94,11
Program Perencanaan Pembangunan daerah	1.423.334.000,00	1.411.475.411,00	99,17
Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	715.652.000,00	699.702.639,00	97,77
Program Sosial dan Budaya	1.239.021.000,00	1.110.294.200,00	89,61
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumberdaya Alam	85.000.000,00	80.591.160,00	94,81
Program peningkatan promosi dan kerjasama daerah	153.700.000,00	151.360.000,00	98,48
Program pengembangan E-Government	1.599.444.000,00	1.519.354.640,00	94,99
JUMLAH	9.762.289.000,00	9.299.856.961,00	95,26

a. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini bertujuan untuk menyempurnakan tata ruang Kabupaten Tanjung Jabung Timur disesuaikan dengan keinginan dan dinamika kehidupan masyarakat. Kegiatan pokok yang dilakukan adalah penyusunan rencana detail tata ruang kawasan; koordinasi tentang rencana tata ruang; sosialisasi Perda RTRW Kab. Tanjung Jabung Timur; serta penyusunan ranperda RDTR Ibukota kecamatan Kab. Tanjung Jabung Timur.

b. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang



Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang. kegiatan pokoknya berupa penyusunan rencana tindak revitalisasi kawasan kampung Singkep (pelabuhan terminal Muara Sabak).

c. Program Pengembangan Data/Informasi

Program ini bertujuan untuk pengumpulan data, dan updating data untuk dokumen perencanaan pembangunan, profile daerah, serta proyeksi analisa ekonomi makro dan analisa lainnya dengan kegiatan berupa penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan; penyusunan profile daerah; serta pengumpulan updating dan analisa data dan informasi.

d. Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

Program ini bertujuan untuk pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh dengan kegiatan berupa monitoring, evaluasi bidang infrastruktur wilayah; serta koordinasi, monitoring dan evaluasi bedah rumah SAMUDRA.

e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

Program ini bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan yang akan ditampung pemerintah daerah untuk masa yang akan datang, seperti : RPJP, RPJM, Renstra, RPKD, Renja, KUA, PPAS, dengan kegiatan berupa pengembangan partisipasi masyarakat dalam perumusan program dan kebijakan layanan publik; penyelenggaraan Musrenbang RKPD; koordinasi penyusunan laporan kinerja pemerintah daerah; koordinasi penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPD); monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kegiatan pembangunan; penyusunan standar pelayanan minimal (SPM); review RPJMD tahun 2011-2016; serta aplikasi sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.

f. Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi

Program ini bertujuan untuk merencanakan dan mengukur pembangunan dibidang ekonomi, adapun kegiatan-kegiatannya antara lain : penyusunan indikator ekonomi daerah; koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi; monitoring, evaluasi dan pelaporan; penyusunan publikasi susenas; penyusunan rencana strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tahun 2013-2033; penyusunan Nilai Tukar Petani; serta study pengembangan konservasi BBM ke BBG.

g. Program Perencanaan Sosial dan Budaya



Program ini bertujuan untuk perencanaan dan pengembangan bidang sosial dan budaya, adapun kegiatan yang mendukung program ini antara lain : koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya; monitoring, evaluasi dan pelaporan; sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor pendidikan; strategi penanggulangan kemiskinan daerah (SPKD); sistem informasi dan digitalisasi pembangunan daerah sektor kesehatan; sistem informasi pendidikan berbasis masyarakat (SIPBM); updating data kemiskinan kab. Tanjung Jabung Timur; serta koordinasi, monitoring dan evaluasi program SAMISAKE.

h. Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam

Program ini bertujuan untuk koordinasi penyusunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kegiatan pokok dari program ini berupa koordinasi percepatan sanitasi pemukiman

i. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Daerah

Adapun kegiatan dari program peningkatan promosi dan kerjasama daerah diantaranya berupa koordinasi perencanaan dan pembangunan penanaman modal.

j. Program Pengembangan E-Government

Inti dari program ini guna pengembangan sistem e-government yang telah ada di kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun kegiatan tersebut berupa pengembangan dan pemeliharaan jaringan E-Government; dan pengembangan sistem informasi dan aplikasi.

Secara umum tidak ada permasalahan mendasar yang menghambat pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BAPPEDA Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2013, namun ada beberapa langkah penting sebagai strategi di masa mendatang dalam melaksanakan tugas yang diemban khususnya di bidang perencanaan :

- 1). Mekanisme penyusunan perencanaan kegiatan pembangunan akan dilakukan lebih akurat dan cermat, untuk kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam rencana kinerja berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
- 2). Pemutakhiran data sebagai media informasi dalam mempromosikan daerah akan terus disempurnakan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang tersedia.
- 3). Peningkatan sumber daya aparatur pemerintah dalam bidang perencanaan pembangunan daerah dilakukan secara berkesinambungan.



- 4). Peningkatan kerjasama dengan pihak pemerintah dan swasta dalam rangka pemenuhan dokumen pendukung perencanaan yang berkualitas.
- 5). Peningkatan sarana dan prasarana penunjang perekonomian rakyat dalam rangka kesejahteraan rakyat.
- 6). Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dengan unit-unit kerja yang berada dalam lingkungan organisasi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

7. Kantor Penelitian Pengembangan Daerah

Kantor Penelitian Pengembangan Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Penelitian Pengembangan Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Kantor Penelitian Pengembangan Daerah melaksanakan 5 program dan 25 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Penelitian Pengembangan Daerah tertera dalam tabel 4.17 dibawah ini.

Tabel 4.17
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	288.525.000,00	283.927.000,00	98,41
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	119.550.000,00	116.266.000,00	97,25
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	105.000.000,00	56.750.000,00	54,05
Program penelitian dan pengembangan	560.000.000,00	493.953.000,00	88,21



JUMLAH	1.079.075.000,00	956.896.000,00	88,68
---------------	-------------------------	-----------------------	--------------

a. program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan yang telah dijalankan dari program pengembangan data/informasi meliputi kajian kualitas sumber daya alam berupa bahan dasar keramik untuk industri rumah tangga di kecamatan Rantau Rasau; analisis komoditi unggulan untuk dikembangkan di kabupaten Tanjung Jabung Timur; model pelayanan publik untuk mencapai standar pelayanan prima sesuai dengan kondisi wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur; penelitian pemberdayaan perempuan daerah pesisir dan pengembangan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur; serta evaluasi pelaksanaan program SKPD Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam meningkatkan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Banyak kendala dan hambatan yang dimiliki yang berasal dari lingkup internal berupa kelemahan dalam Kantor Penelitian dan Pengembangan yaitu :

- 1). Jumlah personil yang sangat terbatas yaitu 4 jabatan eselon IV baru terisi 1 jabatan yaitu kasubbag Tatausaha.
- 2). Jumlah personil hanya 10 orang yang terdiri dari 8 orang PNS dan 2 orang honor.
- 3). Belum memiliki tenaga fungsional peneliti.
- 4). Belum memiliki tenaga peneliti yang sudah bersertifikasi.
- 5). Kemampuan PNS yang belum optimal.

Sedangkan untuk solusi yang dilakukan guna meminimalisir permasalahan diatas yaitu :

- 1). Peningkatan sumberdaya yang tersedia melalui kursus, diklat maupun sekolah terutama yang berkaitan dengan penelitian dan pengembangan.
- 2). Pengisian pejabat eselon.
- 3). Mensosialisasikan hasil penelitian baik secara langsung maupun melalui website.
- 4). Mengadakan kegiatan berupa seminar dengan menghadirkan narasumber berkualitas.

8. Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika



Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 6 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika melaksanakan 12 program dan 39 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika tertera dalam tabel 4.18 dibawah ini:

Tabel 4.18
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Perhubungan
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.034.641.396,00	1.018.387.535,00	98,43
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	649.659.900,00	623.008.900,00	95,90
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	34.620.000,00	32.102.000,00	92,73
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	73.502.000,00	98,00
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	16.500.000,00	16.098.000,00	97,56
Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.709.070.500,00	1.677.143.750,00	98,13
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	3.690.508.150,00	1.898.553.432,00	51,44
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas	786.170.000,00	775.141.000,00	98,60
Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	140.080.000,00	128.080.000,00	91,43
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	519.504.955,00	195.044.500,00	37,54
Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	160.500.000,00	141.960.500,00	88,45



program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi	307.140.000,00	293.371.000,00	95,52
JUMLAH	9.123.394.901,00	6.872.392.617,00	75,33

a. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jasa angkutan, adapun program ini didukung oleh beberapa kegiatan berupa peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan; pengembangan sarana dan prasarana pelayanan jasa angkutan; sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan; penyelenggaraan angkutan lebaran, natal, dan tahun baru; serta penyelenggaraan forum lalulintas kabupaten Tanjung Jabung Timur.

b. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat pengguna jasa perhubungan dengan kegiatan berupa pembangunan dermaga.

c. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan lalu lintas, adapun upaya tersebut dicapai melalui kegiatan pengadaan rambu-rambu lalulintas; serta pengadaan pagar pengaman jalan .

d. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

Inti dari program ini ialah pengujian kelayakan kendaraan bermotor, adapun kegiatan yang mendukung berupa pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor.

e. Program Pengembangan Komunikasi , Informasi dan Media Massa

Program ini bertujuan meningkatkan dan memantapkan pertukaran informasi dan komunikasi antar dan intra kelompok masyarakat serta antar lembaga politik dengan rakyat dengan kegiatan berupa pembinaan dan pengembangan jaringan komunikasi dan informasi; serta pengadaan alat studio dan komunikasi.

f. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Program ini bertujuan memonitoring, mengevaluasi dan melaporkan seluruh kegiatan di SKPD ini, selain itu juga dilaksanakan penyusunan kebijakan, norma, standar dan prosedur bidang perhubungan.



g. Program Pengkajian dan Penelitian Bidang Komunikasi Informasi

Program ini bertujuan mengetahui perkembangan komunikasi informasi khususnya di kabupaten Tanjung Jabung Timur, adapun kegiatan untuk mendukung program ini adalah pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi; serta monitoring dan evaluasi telekomunikasi dan warnet. .

Permasalahan yang dihadapi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain sebagai berikut :

- 1). Terbatasnya anggaran untuk biaya operasional petugas retribusi menyebabkan beberapa kegiatan tidak maksimal.
- 2). Minimnya sarana dan prasarana penunjang fisik dikantor dinas maupun di pos pengawasan LLASDP dan LLAJ sebagai ujung tombak pelayanan jasa retribusi berdampak terhadap Penerimaan/Pendapatan Daerah.
- 3). Minimnya personil dan SDM yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi dinas baik administrasi maupun operasional sebagai tenaga teknis bidang LLAJ, ASDP dan laut.

Upaya pemecahan masalah yang dihadapi yaitu :

Mengusulkan penambahan anggaran ditahun berikutnya berdasarkan kebutuhan sehingga program-program yang dianggap strategis dapat terlaksana dan menambah jumlah sarana prasarana serta personil yang memiliki latar belakang pendidikan dibidang perhubungan.

Pencapaian pembangunan pada sektor perhubungan dapat tergambar pada peningkatan sarana prasarana perhubungan seperti dermaga, pelabuhan, angkutan penyeberangan. Sesuai dengan kondisi daerah yang memiliki ratusan sungai maka keberadaan dermaga-dermaga kecil baik yang dikelola oleh masyarakat atau pemerintah daerah sangatlah menentukan denyut nadi perekonomian. Tabel berikut akan menggambarkan pertumbuhan sektor perhubungan tahun 2010-2013.

Tabel 4.19
Perkembangan Sektor Perhubungan Tahun 2010-2013

No	Uraian	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1.	Dermaga (unit)	83	83	83	85
2.	Jumlah Dermaga kayu	67	68	69	
3.	Jumlah Dermaga yang dibangun/direhab. menjadi permanen (unit)	0	1	5	4
4.	Angkutan Penyeberangan (unit)	468	646	752	968
5.	Kantor Pos (unit)	3	3	8	8



6.	Arus penumpang angkutan umum darat (orang)		89.589	94.964	11.558
7.	Arus penumpang angkutan umum laut (orang)	61.426		29.523	32.475
8.	Jumlah Angkutan (unit)		13.760	14.485	15.247

Sumber : Dinas Perhubungan Kab. Tanjung Jabung Timur

Pengembangan sektor perhubungan dilaksanakan terkait dengan peningkatan sarana transportasi. Tantangan dibidang perhubungan masih dirasakan sampai saat ini, dimana sasarannya adalah bagaimana membangun jaringan sarana perhubungan laut/air, dan darat dapat meningkatkan aksesibilitas kecamatan dan desa di pusat-pusat pelayanan publik.

9. Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup

Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 28 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pengendalian Dampak Lingkungan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup melaksanakan 8 program dan 29 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup tertera dalam tabel 4.20 dibawah ini.

Tabel 4.20
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	435.280.500,00	390.955.092,00	89,82
Program Peningkatan sarana dan prasarana Aparatur	186.645.000,00	143.888.000,00	77,09
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.200.000,00	6.850.000,00	95,14
Program Peningkatan Kapasitas	104.750.000,00	95.000.000,00	90,69



Sumber Daya Aparatur			
program peningkatan pengembangan sistem sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	6.650.000,00	6.650.000,00	100,00
Program Pengendalian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup	625.910.000,00	599.733.220,00	95,82
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi SDA dan Lingkungan Hidup	321.930.000,00	315.515.000,00	98,01
Program peningkatan pengendalian polusi	54.980.000,00	49.998.000,00	90,94
JUMLAH	1.743.345.500,00	1.608.589.312,00	92,27

a. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup

Program ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah perusakan dan/ atau pencemaran lingkungan hidup sehingga masyarakat memperoleh kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat. Adapun beberapa kegiatan pokok diantaranya koordinasi penilaian kota sehat/adipura; pemantauan kualitas lingkungan; pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup; pengelolaan B3 dan limbah B3; penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup; koordinasi penyusunan AMDAL; serta peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup.

b. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup dalam rangka mendukung perencanaan pemanfaatan sumber daya alam dan perlindungan fungsi lingkungan hidup. Adapun beberapa kegiatan pokok diantaranya peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan; pelaksanaan gerakan peduli lingkungan hidup; serta penyusunan status lingkungan hidup daerah.

c. Program Peningkatan Pengendalian Polusi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengendalian polusi dan pencemaran sehingga akan tercapai lingkungan yang sehat bebas polusi, adapun kegiatan yang mendukung program ini adalah penyuluhan dan pengendalian polusi dan pencemaran.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan dalam pelaksanaan kegiatan adalah :



- 1). Belum terisinya jabatan strategis di Kantor Pengendalian Dampak Lingkungan.
- 2). Belum ada Peraturan Bupati tentang UKL-UPL dan tentang Izin Lingkungan.
- 3). Masih kurangnya pemahaman pihak sekolah tentang sekolah yang berbasis lingkungan hidup (ADIWIYATA).
- 4). Belum Terakreditasinya laboratorium pada Kantor Dampak Lingkungan.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1). Mengusulkan kepada Bupati melalui BKD untuk pengisian jabatan Kepala seksi Pengawasan dan Pengendalian.
- 2). Untuk pembuatan Peraturan Bupati tentang UKL-UPL dan tentang Izin Lingkungan akan dilaksanakan tahun 2014 karena menunggu Surat Edaran dari Kementerian Negara Lingkungan tentang Arahan Pelaksanaan Pasal 121 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009.
- 3). Sosialisasi kepada pihak sekolah tentang sekolah yang berbasis lingkungan hidup (ADIWIYATA).
- 4). Percepatan akreditasi laboratorium di Kantor Dampak Lingkungan

10. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pendidikan dan Kebudayaan ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kependudukan dan Catatan Sipil;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 6 program dan 29 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tertera dalam tabell 4.21 dibawah ini.

**Tabel 4.21**

Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	714.492.600,00	687.674.685,00	96,25
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	772.210.000,00	757.345.302,00	98,08
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	13.000.000,00	12.300.000,00	94,62
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	69.202.000,00	68.199.000,00	94,62
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	11.750.000,00	9.248.000,00	78,71
Program Penataan Administrasi Kependudukan	1.830.350.800,00	1.811.181.525,00	98,95
JUMLAH	3.411.005.400,00	3.345.948.512,00	98,09

Sedangkan program dan kegiatan pokok Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah **Program Penataan Administrasi Kependudukan**. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kepemilikan dokumen kependudukan dan meningkatkan sistem administrasi pelayanan kependudukan. Untuk mencapai sasaran dibuatlah beberapa kegiatan diantaranya implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating, dan pemeliharaan); koordinasi pelaksanaan kebijakan kependudukan; pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan; peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan; sosialisasi kebijakan kependudukan; peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan; monitoring, evaluasi dan pelaporan; pengembangan akses pelayanan kependudukan dan catatan sipil; serta pelaksanaan sidang keliling bagi kelahiran yang melampaui satu tahun.

Walaupun berbagai keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*) yang dicapai selama ini cukup baik, namun penyelenggaraan urusan kependudukan tetap masih dihadapkan kepada berbagai masalah dan kendala yang kompleks antara lain :

- 1). Jumlah pegawai yang sangat kurang;
- 2). Masih kurangnya pelatihan pegawai;
- 3). Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang arti pentingnya Akta Kelahiran dan kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil (Identitas Diri);



- 4). Masih sangat kecilnya Nilai Guna /Utility akta kelahiran untuk sistem pelayanan publik;
- 5). Rendahnya profesionalitas aparatur;
- 6). Beberapa tenaga operator yang sudah dilatih pada Dirjen Adminduk dimutasikan.
- 7). Pelaksanaan e-KTP banyak terkendala dengan jarak desa yang jauh dan harus ditempuh dengan kendaraan air.
- 8). Masih banyak warga yang belum terdaftar sehingga tidak dapat melakukan perekaman.

Sebagai solusi dan tindak lanjut pembangunan dibidang kependudukan dan catatan sipil pada masa yang akan datang, perlu mempertimbangkan kebijakan dan program sebagai berikut :

- 1). Penambahan pegawai sesuai dengan kebutuhan;
- 2). Meningkatkan pelatihan tenaga pengelolaan SIAK;
- 3). Meningkatkan sosialisasi baik langsung ke masyarakat maupun melalui media elektronik dan billboard motivasi;
- 4). Optimalisasi nilai guna dari akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya sehingga masyarakat memperoleh manfaat atas kepemilikan dokumen tersebut;
- 5). Mencari alat transportasi yang efektif dan efisien untuk menjangkau daerah yang jauh dan sulit;
- 6). Segera melakukan pendaftaran penduduk dan segera melakukan perekaman bagi yang belum merekam.

Untuk pelayanan kependudukan dalam hal pemberian Kartu Tanda Penduduk (KTP), sejalan dengan kebijakan nasional melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan pada tahun 2013 telah merealisasikan Kartu Keluarga sebanyak 95,62 % dari sasaran yang ditetapkan, sedangkan untuk Kartu Tanda Penduduk sebesar 78,69 % dari sasaran yang ditetapkan serta 49,81 % untuk Akta Kelahiran. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.22
Target dan Realisasi Administrasi Kependudukan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2013



No	Uraian	Satuan	2012			2013		
			Sasaran	Realisasi	%	Sasaran*	Realisasi*	%
I	Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk							
1	Kartu Keluarga	KK	72.365	71.042	98,17	74.741	71.471	95,62
2	Kartu Tanda Penduduk	Org	169.606	129.866	76,51	169.606	133.460	78,69
3	Penerbitan surat pindah keluar	Surat	-	1.042		-	866	
4	Penerbitan surat pindah datang	Surat	-	40		-	170	
II	Pelayanan Bidang Pendaftaran Penduduk							
1	Akta Kelahiran	Org	259.899	109.832	42,26	247.256	123.159	49,81
2	Akta Perkawinan	Psgan	-	74		-	122	
3	Akta Perceraian	Psgan	-	1		-	1	
4	Akta Kematian	Org	-	10		-	51	
5	Akta Pengakuan anak	Org	-	-		-	1	
6	Akta Pengangkatan anak	Org	-	9		-	9	
7	Akta Kelahiran diatas 1 th (sidang keliling)	Org	80	72	90,00	-	-	

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Tanjab Timur

11. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 19 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana melaksanakan 13 program dan 38 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan



realisasi penyerapan belanja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tertera dalam tabel 4.23 dibawah ini.

Tabel 4.23
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	753.117.000,00	684.506.420,00	90,89
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	678.299.000,00	629.936.650,00	92,87
Program peningkatan disiplin aparatur	38.600.000,00	38.600.000,00	100,00
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.183.800,00	8.400.000,00	82,48
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian inerja dan keuangan	9.495.000,00	890.000,00	9,37
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	132.113.500,00	120.848.500,00	91,47
Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	118.172.500,00	115.082.500,00	97,39
Program Keluarga Berencana	1.797.941.000,00	1.617.034.540,00	89,94
Program Kesehatan Reproduksi Remaja	47.890.000,00	47.890.000,00	100,00
Program Pelayanan Kontrasepsi	23.675.000,00	23.665.000,00	99,96
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	286.982.000,00	267.037.000,00	93,05
Program Pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	24.250.000,00	24.250.000,00	100,00
Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga	35.872.000,00	35.872.000,00	100,00
JUMLAH	3.956.590.800,00	3.614.012.610,00	91,34

a. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tujuan program ini untuk memperkuat kelembagaan dan jaringan pengarusutamaan gender (PUG) dan anak (PUA) diberbagai bidang pembangunan dengan kegiatan berupa advokasi dan fasilitasi PUG bagi perempuan; serta sosialisasi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak.

b. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

Program ini bertujuan untuk mendorong terakomodasinya peran serta perempuan dalam pembangunan. Adapun kegiatan pokoknya meliputi penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera; serta Gerakan Sayang Ibu (GSI).



c. Program Keluarga Berencana

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ibu dan anak dalam rangka mewujudkan keluarga kecil bahagia, sejahtera yang menjadi dasar terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan mengendalikan kelahiran, sekaligus dalam rangka menjamin terkendalinya pertumbuhan penduduk. Beberapa kegiatan pokok dari program ini diantaranya penyediaan pelayanan keluarga berencana dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin; pelayanan KIE; peningkatan perlindungan hak reproduksi individu; pembinaan keluarga berencana; peningkatan partisipasi pria dalam KB dan KR; serta pengadaan sarana mobilitas tim KB keliling.

d. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, sikap dan perilaku positif remaja tentang kesehatan dan hak-hak reproduksi, guna meningkatkan derajat kesehatan reproduksinya dan mempersiapkan kehidupan berkeluarga dalam mendukung upaya peningkatan kualitas generasi mendatang, kegiatan dari program ini berupa advokasi dan KIE tentang kesehatan reproduksi remaja (KRR); serta memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat.

e. Program Pelayanan Kontrasepsi

Program ini bertujuan untuk pelaksanaan kegiatan keluarga berencana kesehatan manunggal dan pelayanan pemasangan alat kontrasepsi metode operasi wanita dan metode operasi pria dengan kegiatan berupa pelayanan KB metode operasi.

f. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Program ini ditunjang beberapa kegiatan diantaranya fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB; operasional kelompok masyarakat peduli KB; koordinasi pengelolaan program; serta pengelolaan data dan informasi program KB.

g. Program Pengembangan Bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak

Kegiatan yang telah ditetapkan dari program ini berupa pengumpulan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak.

h. Program Penyiapan Tenaga pendamping Kelompok Bina Keluarga



Inti dari kegiatan ini adalah pelatihan bagi tenaga pendamping untuk mencapai keluarga yang sejahtera.

Hambatan dan kendala yang ditemui dalam capaian kinerja pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanjung Jabung Timur antara lain :

- 1) Kualitas sumber daya manusia, masih menjadi kendala sampai tahun 2013 secara spekulasi terlihat dari masih minimnya tenaga motivator yang telah mengikuti Latihan Dasar Umum (LDU) yakni baru 13 orang dari 93 motivator yang ada.
- 2) Sarana dan prasarana pelayanan KB yang dapat dimobilisasi secara cepat (MUYAN) belum ada.
- 3) Sulitnya melaksanakan pelayanan KB dan pergerakan masyarakat perempuan diwilayah terpencil.
- 4) Minimnya instrument dan pemahaman program bagi tenaga di tingkat lapangan khususnya dibidang pemberdayaan perempuan.

Upaya dan solusi yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang ada adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan pelatihan-pelatihan bagi beberapa tenaga lapangan baik di kabupaten maupun provinsi.
- 2) Melaksanakan monev di setiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tanjung Jabung Timur guna meningkatkan kinerja petugas lapangan dan pengetahuan terhadap masyarakat tentang KB.
- 3) Memberikan penyuluhan kepada masyarakat baik langsung maupun tidak langsung dan penyebarluasan informasi melalui brosur, spanduk dan selebaran.

Hasil kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana pada tahun 2013 dapat dilihat antara lain dengan meningkatnya capaian indikator dari tahun sebelumnya. PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efektif mengalami pertumbuhan sebesar 0,24 % dari tahun 2012; PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi mengalami pertumbuhan sebesar 162,86 % dari tahun 2012; Peserta KB baru mengalami pertumbuhan sebesar 0,14 % dari tahun 2012; dan KB aktif pertumbuhan sebesar 0,02 % dari tahun 2012. Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 4.24
Perkembangan Sektor Keluarga Berencana, 2012-2013

No.	Uraian	Tahun		Pertumbuhan (%)
		2012	2013	
1.	PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efektif	42.966 akseptor	43.067 akseptor	0,24
2.	PUS yang melakukan program KB aktif metode kontrasepsi efisien/alat kontrasepsi	420 akseptor	1.104 akseptor	162,86
3.	Peserta KB baru	13.763 akseptor	13.782 akseptor	0,14
4.	KB Aktif	84,36%	84,38%	0,02

Sumber : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab. Tanjab Timur

12. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi melaksanakan 16 program dan 38 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi tertera dalam tabel 4.25 dibawah ini.

Tabel 4.25
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	57.750.000,00	57.702.700,00	99,92
Program pemberdayaan fiskir miskin, KAT dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya	170.800.000,00	169.050.000,00	98,98



Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	535.025.000,00	506.343.700,00	94,64
Program pembinaan anak terlantar	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	130.500.000,00	104.691.000,00	80,22
Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial	95.250.000,00	86.441.000,00	90,75
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	353.302.000,00	335.350.000,00	94,92
Program peningkatan kesempatan kerja	93.432.000,00	87.623.000,00	93,78
Program Perlindungan dan pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	116.700.000,00	108.935.000,00	93,35
Program pembinaan hubungan industrial	58.000.000,00	57.700.000,00	99,48
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	590.837.000,00	571.363.400,00	96,70
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	663.654.000,00	638.724.000,00	96,24
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.250.000,00	12.250.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	86.350.000,00	85.984.000,00	99,58
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	125.300.000,00	125.277.900,00	99,98
Program Pengembangan wilayah transmigrasi	402.690.500,00	358.972.650,00	89,14
JUMLAH	3.506.840.500,00	3.321.408.350,00	94,71

a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya

Program ini bertujuan membantu fakir miskin yang akan melakukan usaha untuk peningkatan kesejahteraan, adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin.

b. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial bertujuan untuk memulihkan fungsi sosial dan memberikan pelayanan dan rehabilitasi sosial. Adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa; pemberian bantuan UEP bagi lansia produktif; serta peringatan hari besar nasional (hari pahlawan).

c. Program Pembinaan Anak Terlantar

Program ini membantu anak terlantar melalui pembekalan hidup, adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan UEP dan pelatihan/kursus.

d. Program Pembinaan para Penyandang Cacat dan Trauma



Program ini membantu para penyandang cacat dan trauma melalui bantuan dana jaminan sosial dan alat bantu, adapun kegiatan yang dilaksanakan berupa pemberian bantuan dana jaminan sosial dan alat bantu bagi penyandang cacat berat dan trauma.

e. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Program ini berupa pemberian bantuan stimulan UEP Tagana dan kelembagaan kessos lainnya.

f. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Peningkatan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui pendidikan formal, pelatihan kerja, dan pengembangan di tempat kerja sebagai satu kesatuan sistem pengembangan SDM yang komprehensif dan terpadu. Adapun kegiatan pokoknya berupa pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja.

g. Program Peningkatan Kesempatan Kerja

Program ini bertujuan untuk memperluas kesempatan kerja sehingga jumlah pengangguran di kabupaten ini dapat berkurang, adapun kegiatan yang mendukung program ini antara lain penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja; serta pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan.

h. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan

Program ini bertujuan menciptakan suasana hubungan kerja yang harmonis antara pelaku produksi melalui peningkatan pelaksanaan hubungan industrial yang merupakan sarana untuk mempertemukan aspirasi pekerja dengan pemberi kerja, kegiatan pokoknya berupa fasilitas penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial; serta peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja.

i. Program Pembinaan Hubungan Industrial

Program ini sebagai upaya pemerintah daerah untuk menjadi fasilitator antara perusahaan dan tenaga kerja, adapun kegiatan yang dilaksanakan yaitu pembentukan/pembinaan LKS Bi/Tripartit.

j. Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi

Program peningkatan kualitas dan produktivitas tenaga kerja ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan, keahlian, dan kompetensi tenaga kerja dan produktivitas. Program ini ditunjang oleh beberapa kegiatan diantaranya berupa



peningkatan kerjasama antar wilayah, antar pelaku dan antar sektor dalam rangka pengembangan kawasan transmigrasi.

Dalam menjalankan program/kegiatan pokoknya, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanjung Jabung Timur dihadapkan pada beberapa permasalahan antara lain:

- 1) Kurangnya sarana infrastruktur BLK seperti sarana untuk pelatihan salon dan mebeulair.
- 2) Kurang memadainya prasarana BLK seperti tempat penginapan.
- 3) Keterbatasan anggaran pelatihan tidak dapat mencukupi antusias masyarakat yang berkeinginan mengikuti pelatihan.
- 4) Bursa kerja online terkendala jaringan internet.
- 5) Penyelesaian kasus permasalahan hubungan industrial masih menggunakan tenaga mediasi provinsi.
- 6) Belum optimalnya penerapan perundang-undangan tenaga kerja.
- 7) Penerima bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) setelah menerima bantuan belum menyampaikan laporan sebagaimana telah ditetapkan.
- 8) Data yang disampaikan pada saat terjadi bencana belum terperinci.
- 9) Alat dan sarana untuk Tagana yang masih terbatas terutama untuk alat evakuasi dan transportasi bagi daerah-daerah terpencil.
- 10) Masih kurangnya tenaga taruna siaga bencana dalam penanganan bencana pada Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Permasalahan yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dicarikan solusi pemecahannya, adapun upaya-upaya yang dilaksanakan diantaranya :

- 1) Permintaan bantuan tenaga instruktur dari Balai Latihan Kerja Provinsi Jambi.
- 2) Dibentuk tiap kelompok dalam pelatihan pengembangan di masyarakat.
- 3) Melaksanakan Bimtek bagi tenaga instruktur tetap BLK Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4) Melaksanakan sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang ketenagakerjaan khususnya kepada perusahaan yang beroperasi di Tanjung Jabung Timur.
- 5) Melaksanakan sosialisasi tentang syarat dan aturan penerima bantuan.
- 6) Melaksanakan sosialisasi tentang tatacara pendataan korban bencana ke aparat desa.



- 7) Penambahan dana operasional penanganan bencana khususnya untuk daerah yang sulit dijangkau.
- 8) Penambahan tenaga Tagana di setiap kecamatan sehingga diharapkan tanggap darurat siaga bencana akan lebih baik.

Dibidang ketenagakerjaan, jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan baik PMA maupun PMDN pada periode 2010-2013 selalu meningkat setiap tahunnya, peningkatan ini linear dengan peningkatan jumlah PMA maupun PMDN. Keadaan ini membuat rasio daya serap tenaga kerja semakin kecil atau dengan kata lain pergerakan penyerapan tenaga kerja tidak lebih besar dari pertumbuhan PMA maupun PMDN atau perusahaan yang masuk merupakan jenis perusahaan yang padat modal bukan merupakan perusahaan padat karya. Daya serap tenaga kerja mulai meningkat pada tahun 2013, hal ini terjadi karena adanya peningkatan jumlah tenaga kerja akan tetapi jumlah PMA maupun PMDN menurun.

Tabel 4.26
Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Tahun 2010-2013

No	Uraian	2010	2011	2012	2013
1	Jumlah tenaga kerja yang bekerja pada perusahaan PMA/PMDN	3.031	3.517	4.127	4.328
2	Jumlah seluruh PMA/PMDN	20	25	31	27
3	Rasio daya serap tenaga kerja	152	141	133	160

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Tanjab Timur

Tahun 2013, Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah mendistribusikan bantuan untuk 97 KK dan 12 kelompok dengan nilai bantuan sebesar Rp. 443.500.000,00

Tabel 4.27
Bantuan yang Didistribusikan Tahun 2013

NO	NAMA BANTUAN	JUMLAH PENERIMA (Keluarga/Kel./Org)	NILAI BANTUAN (Rupiah)
1	Sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin	7 KUBE dan 6 KK	158.000.000
2	Bantuan UEP bagi Lansia produktif	63 KK	118.000.000
3	Bantuan alat bantu bagi penyandang cacat berat dan taruma	28 KK	96.500.000
4	Bantuan UEP bagi Tagana dan kelembagaan kessos lainnya	212 Kelompok	71.000.000

Sumber : Dinas Sosnakertrans Kab. Tanjab Timur

13. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah



Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 5 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melaksanakan 9 program dan 43 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah tertera dalam tabel 4.28 dibawah ini.

Tabel 4.28
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran:	516.394.400,00	502.761.300,00	97,36
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	426.198.000,00	403.112.450,00	94,58
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.950.000,00	10.200.000,00	85,36
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	30.000.000,00	24.347.000,00	81,16
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	318.399.600,00	294.802.000,00	92,59
Program Penciptaan iklim usaha kecil menengah yang kondusif	140.700.000,00	135.895.000,00	96,58
Program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah	523.859.000,00	472.651.000,00	90,22
Program pengembangan Sistem pendukung usaha bagi UMKM	409.425.000,00	349.418.100,00	85,34
Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	426.079.000,00	240.877.600,00	56,53
JUMLAH	2.803.005.000,00	2.434.064.450,00	86,84



a. Program Penciptaan Iklim Usaha-Usaha Kecil Menengah yang Kondusif

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi terselenggaranya lingkungan usaha yang efisien secara ekonomi, non diskriminatif bagi kelangsungan dan peningkatan kinerja usaha mikro, kecil dan menengah dengan kegiatan diantaranya fasilitasi pengembangan koperasi dan UKM; serta fasilitasi permasalahan proses produksi UKM.

b. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas manajemen pengelolaan koperasi / KUD. Dengan manajemen yang profesional diharapkan koperasi dapat berkembang dengan pesat. Hal ini dilakukan dengan kegiatan antara lain : penyelenggaraan pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/KUD; memfasilitasi peningkatan kemitraan usaha mikro kecil menengah; peningkatan kerjasama di bidang HAKI; penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan; serta peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasam UMKM.

c. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fungsi faktor-faktor yang mendukung usaha UMKM. Pelaksanaan dari program ini seperti sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan; koordinasi pemanfaatan fasilitas pemerintah untuk usaha kecil menengah dan koperasi; koordinasi penggunaan dana pemerintah bagi UMKM; pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerintah bagi UMKM; peningkatan jaringan kerjasama antar lembaga; penyelenggaraan promosi produk UMKM; serta pengembangan kebijakan dan program ekonomi lokal.

d. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kelembagaan koperasi agar mampu tumbuh dan berkembang secara sehat sebagai wadah kepentingan bersama untuk memperoleh efisiensi kolektif sehingga citra koperasi semakin membaik dengan kegiatan diantaranya koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperasi; pembangunan sistem informasi perencanaan pengembangan perkoperasian; sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian; pembinaan, pengawasan, dan penghargaan koperasi berprestasi; peningkatan dan pengembangan jaringan kerjasama usaha koperasi; serta penyebaran model-model pola pengembangan koperasi.



Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Timur secara keseluruhan dalam pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan menghadapi kendala antara lain:

- 1) Kondisi alam yang sulit dijangkau secara cepat dan mahal biaya transportasi;
- 2) Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap koperasi dan UMKM;
- 3) Masih lemahnya kesadaran berkoperasi dan arti pentingnya koperasi oleh anggota;
- 4) Masih lemahnya koordinasi antara dinas instansi dalam rangka pembinaan koperasi dan UMKM;
- 5) Masih rendahnya kesadaran dan aspirasi anggota masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang bernilai jual dalam meningkatkan pendapatan koperasi dan masyarakat;
- 6) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan;
- 7) Masih terbatasnya alokasi dana yang tersedia untuk menunjang program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan masalah-masalah tersebut, maka upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan masalah adalah:

- 1) Memenuhi sarana dan prasarana transportasi yang memadai dengan biaya yang murah di setiap desa/kelurahan/kecamatan dalam kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap UKM.
- 3) Meningkatkan koordinasi antar dinas instansi dalam rangka pembinaan terhadap UKM dan pelaku usaha.
- 4) Mengupayakan peningkatan kesadaran masyarakat dalam mengelola SDA yang tersedia menjadi barang dengan nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga.
- 5) Meningkatkan alokasi dana yang memadai dalam menunjang program/kegiatan yang telah ditetapkan.

Capaian kinerja koperasi ditunjukkan berbagai ukuran seperti :1) Jumlah koperasi, 2) Jumlah anggota, 3) Simpanan, 4) Modal, 5) Volume usaha, dan 6) Sisa Hasil Usaha (SHU). Sampai dengan Tahun 2013, koperasi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik KUD maupun non KUD berjumlah 287 unit, sebanyak 116 unit diantaranya termasuk koperasi aktif, selebihnya merupakan koperasi tidak aktif.



Jumlah anggota dari 287 unit koperasi tersebut sebanyak 24.393 orang yang terdiri dari 7.600 orang merupakan anggota KUD dan 16.793 orang merupakan anggota Non KUD.

Tabel 4.29
Jumlah KUD dan Non KUD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur 2013

NO	KECAMATAN	KOPERASI		AKTIF		TIDAK AKTIF		ANGGOTA	
		KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD	KUD	NON KUD
1	Muara Sabak Barat	2	25	-	13	2	12	-	1.565
2	Muara Sabak Timur	5	41	2	10	3	31	3.277	1.965
3	Kuala Jambi	1	17	1	10	-	7	292	595
4	Dendang	6	29	-	13	6	16	675	4.630
5	Mendahara	3	37	-	10	3	27	182	2.008
6	Mendahara Ulu	1	16	1	5	-	11	352	1.332
7	Geragai	5	28	1	17	4	11	400	1.849
8	Rantau Rasau	8	9	3	7	5	2	1.166	343
9	Berbak	3	3	-	2	3	1	831	199
10	Nipah Panjang	4	26	-	12	4	14	254	1.447
11	Sadu	3	15	1	8	2	7	171	860
	JUMLAH	41	246	9	107	32	139	7.600	16.793

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kab. Tanjab Timur

KUD di kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai penyerapan modal baik bersumber dari sendiri maupun pihak luar sebesar Rp. 5.749.256.623,00; volume usaha sebesar Rp. 5.749.256.623,00 dan simpanan sebesar Rp. 338.555.200,00; serta sisa hasil usaha sebesar Rp. 141.201.890,00. Sedangkan untuk non KUD mempunyai penyerapan modal baik bersumber dari sendiri maupun pihak luar sebesar Rp. 14.133.793.596,00; volume usaha sebesar Rp. 20.293.865.023,00 dan simpanan sebesar Rp. 3.303.142.230,00; serta sisa hasil usaha sebesar Rp. 1.702.246.883,00.

Tabel 4.30
Jumlah Simpanan, Modal, Volume Usaha dan SHU KUD 2013

NO	KECAMATAN	KUD	SIMPANAN (Rp)	PERMODALAN (Rp)	VOLUME USAHA (Rp)	SHU (Rp)
1	Muara Sabak Barat	2	0	0	0	0
2	Muara Sabak Timur					



		5	101.029.000	2.234.244.176	3.250.322.670	11.927.160
3	Kuala Jambi	1	4.613.750	10.978.725	15.436.755	6.364.975
4	Dendang	6	56.992.000	1.292.739.706	680.990.450	22.424.565
5	Mendahara	3	14.830.000	81.980.213	101.782.676	17.965.700
6	Mendahara Ulu	1	12.000.000	100.686.537	0	0
7	Geragai	5	66.181.500	240.774.031	68.030.725	23.292.000
8	Rantau Rasau	8	33.305.025	568.544.759	87.377.950	18.201.525
9	Berbak	3	18.622.300	709.026.234	57.956.070	8.467.600
10	Nipah Panjang	4	14.668.350	627.579.941	39.063.230	18.555.785
11	Sadu	3	16.313.275	84.075.375	49.645.740	14.002.580
	JUMLAH	41	338.555.200	5.749.256.623	4.350.606.266	141.201.890

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kab. Tanjab Timur

Tabel 4.31
Jumlah Simpanan, Modal, Volume Usaha dan SHU Non KUD 2013

NO	KECAMATAN	Non KUD	SIMPANAN (Rp)	PERMODALAN (Rp)	VOLUME USAHA (Rp)	SHU (Rp)
1	Muara Sabak Barat	25	380.833.500	980.701.230	1.837.694.911	93.505.906
2	Muara Sabak Timur	41	428.276.940	3.081.414.923	5.992.551.371	248.835.794
3	Kuala Jambi	17	484.039.650	1.155.154.879	1.150.477.116	337.201.807
4	Dendang	29	903.421.510	2.264.039.404	5.596.498.114	413.925.101
5	Mendahara	37	255.565.300	1.331.588.280	1.527.151.419	215.162.090
6	Mendahara Ulu	16	163.950.000	1.551.425.580	2.211.941.757	47.969.580
7	Geragai	28	202.148.000	1.556.764.216	621.625.345	47.133.055
8	Rantau Rasau	9	52.070.000	169.901.450	142.962.880	81.885.150
9	Berbak	3	39.605.000	337.199.203	448.387.950	76.389.500
10	Nipah Panjang	26	212.064.990	879.054.211	643.042.560	32.319.500
11	Sadu	15	181.167.340	826.550.220	121.531.600	107.919.400
	JUMLAH	246	3.303.142.230	14.133.793.596	20.293.865.023	1.702.246.883

Sumber : Dinas Koperasi UMKM Kab. Tanjab Timur

14. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja

Kantor Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 24 Tahun 2008 tentang Uraian



Tugas Jabatan Struktural Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang keamanan dan ketertiban;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang keamanan dan ketertiban;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang keamanan dan ketertiban; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada Tahun 2013, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan 7 program dan 25 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja tertera dalam tabel 4.32 dibawah ini.

Tabel 4.32
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.382.472.400,00	1.345.543.257,00	97,33
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	595.480.000,00	574.345.800,00	96,45
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	140.430.400,00	135.307.000,00	96,35
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	237.993.500,00	182.675.000,00	76,76
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	17.000.000,00	10.614.000,00	62,44
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	162.800.000,00	138.794.100,00	85,25
Program pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman umum,serta penegakan oerda dan peraturan kepala daerah	65.552.000,00	61.139.000,00	93,27
JUMLAH	2.601.728.300,00	2.448.418.157,00	94,11

Anggaran yang dialokasi untuk Kantor Satuan Polisi Pamong Praja pada prinsipnya hanya digunakan untuk operasional pengamanan aset daerah, penegakkan Peraturan Daerah dan ketertiban masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban antara lain :

- 1) Kepegawaian anggota Pol-PP masih banyak berstatus tenaga honor dan tenaga kontrak.
- 2) Tingkat pendidikan anggota Pol-PP yang bervariasi.



- 3) Prosedur tetap (Protap) belum dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 4) Penyikapan terhadap situasi masih rendah, lebih menunggu perintah atau instruksi.
- 5) Kelembagaan masih belum berpedoman kepada Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Belum adanya Juknis tentang Pelatihan Dasar Polisi Pamong Praja.
- 7) Pemberdayaan PPNS belum optimal dimasing-masing SKPD.
- 8) PPNS belum termasuk jabatan fungsional.

Berdasarkan uraian di atas, upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanjung Jabung Timur untuk mengurangi atau meminimalisir permasalahan yang ada antara lain dengan:

- 1) Mengusulkan pengangkatan tenaga honor/kontrak menjadi CPNS kepada Bupati melalui BKD.
- 2) Pelaksanaan pendidikan singkat sebagai martikulasi pengetahuan anggota.
- 3) Penyusunan Prosedur tetap (Protap) yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.
- 4) Pelatihan daya responsif anggota terhadap lingkungan sekitar.
- 5) Berkoordinasi dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah mengenai kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja.
- 6) Penyusunan petunjuk teknis pelatihan dasar Polisi Pamong Praja.
- 7) Sosialisasi dan melaksanakan pelatihan secara berkala kepada PPNS

15. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 23 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat; dan



4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan 11 program dan 38 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat tertera dalam tabel 4.33 dibawah ini.

Tabel 4.33
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	822.464.400,00	813.835.807,00	98,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	630.506.000,00	625.557.009,00	99,22
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	11.500.000,00	11.500.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Manusia	28.000.000,00	17.449.000,00	62,32
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	235.936.000,00	235.226.300,00	99,70
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1.274.742.000,00	403.472.000,00	31,65
Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	489.951.300,00	480.064.875,00	97,98
Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	240.435.000,00	50.276.800,00	99,21
Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	50.676.800,00	236.835.900,00	98,50
Program Pendidikan Politik Masyarakat	453.608.000,00	432.871.100,00	95,43
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	769.637.800,00	553.727.300,00	71,95
JUMLAH	5.007.457.300,00	3.860.816.091,00	77,10

a. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran warga masyarakat dalam rangka memelihara dan mewujudkan kehidupan berbangsa, bernegara, bermasyarakat dan beragama melalui pembinaan dan pelatihan anggota linmas dalam upaya peningkatan pemahaman anggota terhadap kelinmasan serta menggandakan pelaksanaan rangkaian acara dalam rangka peringatan hari-hari besar nasional agar berjalan dengan tertib dan aman. Adapun kegiatan pokoknya meliputi penyiapan tenaga pengendali keamanan dan kenyamanan lingkungan; pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan; serta koordinasi kegiatan orang asing, LSM asing (NGO) dan lembaga asing di daerah.



b. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kerukunan umat beragama, organisasi masyarakat dan kerukunan bangsa, dengan kegiatan berupa Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); serta Nation Bulding Character/pembangunan karakter bangsa.

c. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan rasa dan sikap nasionalisme organisasi masyarakat dan generasi muda dengan kegiatan diantaranya pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan; kerjasama pemerintah daerah dengan Ormas, LSM dan OKP; serta peningkatan wawasan kebangsaan pelajar tingkat SLTA.

d. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Program ini bertujuan untuk memberantas penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat sehingga akan tercipta lingkungan yang aman dan nyaman terbebas dari penyakit masyarakat. Adapun program ini didukung oleh kegiatan berupa penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba.

e. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan etika berpolitik bagi ormas, orsos, dan masyarakat melalui penyuluhan. Adapun kegiatannya berupa Komunitas Intelijen Daerah (KOMINDA); bimbingan teknis tentang bantuan keuangan partai politik; Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM); serta sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang politik.

f. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan tim penanggulangan bencana, aparat kecamatan/desa dan warga masyarakat rawan bencana, lokasi bencana dan korban bencana alam, tercukupinya kebutuhan masyarakat yang kekurangan air bersih melalui droping air bersih serta merelokasi warga yang berada di daerah rawan bencana yang ditunjang dengan kegiatan berupa pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara; sosialisasi manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana; sosialisasi perundang-undangan penanggulangan bencana (PB); serta bimbingan teknis aparatatur penanggulangan bencana.



Penyelenggaraan urusan kesatuan bangsa, politik dan perlindungan Masyarakat di Kabupaten Tanjung Jabung Timur tetap masih dihadapkan kepada berbagai hambatan dan kendala yang cukup kompleks dan cenderung dinamis. Beberapa permasalahan pokok yang dihadapi antara lain:

- 1) Kurangnya personil yang ada di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada saat ini dan juga sebagian personil yang kurang menguasai bidang tugasnya.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan operasional (kendaraan roda dua) pada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang mana kegiatan operasionalnya lebih banyak dilapangan dan pada saat ini kendaraan roda 2 (dua) di Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur hanya ada 5 (lima) unit dimana 1 unit sudah tidak layak pakai
- 3) Kondisi ORMAS, LSM, PARPOL dan Organisasi lainnya keberadaan yang terpencar di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan pembinaannya maupun untuk menghubungi yang berakibat belum tercapainya salah satu kegiatan yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 4) Belum terbentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sehingga penanganan bencana yang terjadi mengalami sedikit keterlambatan.

Berdasarkan uraian diatas, permasalahan ataupun kendala yang dihadapi merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi dan diatasi dengan berbagai upaya untuk mengurangi atau meminimalisir masalah antara lain:

- 1) Meningkatkan disiplin kerja pegawai yang sangat minim jumlahnya sehingga dapat mendukung pelaksanaan kegiatan/program kerja Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Menata dan menginventarisir kembali keberadaan ORMAS/LSM/PARPOL dan Organisasi lainnya yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sehingga mempermudah jangkauan dan meningkatkan koordinasi lintas sektoral yang nantinya dapat mendukung percepatan pembangunan daerah.
- 3) Mengajukan permintaan penambahan personil kepada Bupati Tanjung Jabung Timur Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sehingga diharapkan dapat meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanjung Jabung Timur terutama struktural eselon IV /a .



- 4) Mengoptimalkan penggunaan prasarana dan sarana yang ada untuk mendukung pelaksanaan kegiatan.
- 5) Memperdayakan Satgas Linmas Kabupaten sebanyak 31 orang, Satgas Linmas Kecamatan sebanyak 110 orang, Satgas Linmas Desa/Kelurahan sebanyak 465 orang untuk deteksi dini sekaligus evakuasi dan penanggulangan bencana.
- 6) Mengajukan pembentukan kelembagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga bisa terfokus dalam penanggulangan bencana, mulai dari prabencana, saat terjadinya bencana dan pasca terjadinya bencana.

Pada tahun 2013, di kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 33 Organisasi Masyarakat (Ormas) dimana 19 diantaranya tidak terdaftar, 33 Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dimana 5 diantaranya tidak terdaftar, dan 5 Organisasi Kepemudaan (OKP) dimana 2 diantaranya tidak terdaftar.

Kehidupan demokrasi juga tumbuh dan berkembang hal ini ditandai dengan terbentuknya 30 pengurus daerah partai politik, namun dalam Pemilu Legislatif tahun 2009 lalu hanya 11 partai politik yang memperoleh kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten. Saat ini lembaga DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 30 anggota, 4 diantaranya perempuan.

Tabel 4.34
Jumlah Partai Politik yang Memiliki Kursi di DPRD
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Periode 2009-2014

NO	LAMBANG	NAMA PARTAI	JUMLAH KURSI
1.		PARTAI AMANAT NASIONAL	12
2.		PARTAI GOLONGAN KARYA	3
3.		PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	3
4.		PARTAI HATI NURANI RAKYAT	3
5.		PARTAI DEMOKRAT	2
6.		PARTAI DEMOKRASI KEBANGSAAN	2
7.		PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	1
8.		PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	1
9.		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1
10.		PARTAI KARYA PEDULI BANGSA	1
11.		PARTAI BULAN BINTANG	1
JUMLAH			30

Sumber : Badan Kesbangpol linmas Kab. Tanjung Jabung Timur

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 bahwa Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada jenis belanja bantuan keuangan, objek belanja bantuan keuangan kepada partai politik dan rincian objek belanja nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran penganggaran,



pelaksanaan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan kepada partai politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik. Adapun besaran bantuan keuangan kepada partai politik dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2013 sebesar Rp. 689.717.200,00.

Tabel 4.35
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

NO	NAMA	BANTUAN
1	2	3
1	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - PAN	258.277.600,00
2	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Partai Golkar	62.566.800,00
3	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - PDI Perjuangan	111.547.200,00
4	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Hanura	45.818.400,00
5	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Partai Demokrat	48.334.400,00
6	Belanja Bantuan Keuangan Parpol – Partai Demokrasi Kebangsaan	38.624.000,00
7	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Gerindra	26.778.400,00
8	Belanja Bantuan Keuangan Parpol – Partai Keadilan Sejahtera	23.942.800,00
9	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Partai Kebangkitan Bangsa	21.501.600,00
10	Belanja Bantuan Keuangan Parpol - Partai Karya Peduli Bangsa	25.255.200,00
11	Belanja Bantuan Keuangan Parpol – Partai Bulan Bintang	27.070.800,00
Jumlah		689.717.200,00

Sumber : DPKAD Kab. Tanjung Jabung Timur

16. Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD; dan
4. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.



Pada Tahun 2013, Sekretariat DPRD melaksanakan 5 program dan 38 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat DPRD tertera dalam tabel 4.36 dibawah ini.

Tabel 4.36
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Sekretariat DPRD
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	7.232.587.200,00	6.380.194.106,00	88,21
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.181.772.800,00	4.582.179.288,00	88,43
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	234.335.000,00	223.324.325,00	95,30
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	130.500.000,00	54.594.900,00	41,84
Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	6.174.075.000,00	5.470.614.650,00	88,61
JUMLAH	18.953.270.000,00	16.710.907.269,00	88,17

Adapun program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD antara lain yaitu **Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah**. Program ini mempunyai kegiatan berupa hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama; rapat-rapat paripurna; kegiatan reses; kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah; peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD; sosialisasi peraturan perundang-undangan; penyusunan rancangan peraturan daerah hak inisiatif; kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD keluar daerah. Dalam menjalankan fungsi legestasinya, pada tahun 2013 ini telah berhasil dihasilkan sebanyak 11 perda.

Tabel 4.37
Peraturan Daerah yang Dihasilkan Tahun 2013

NO	PERATURAN DAERAH		TENTANG
	NOMOR	TAHUN	
1	1	2013	APBD KAB. Tanjab Timur TA. 2013
2	2	2013	Pelaksanaan PertanggungJawaban APBD Th. 2012
3	3	2013	Perubahan APBD Th. 2013
4	4	2013	Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
5	5	2013	Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
6	6	2013	Pencabutan Empat Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Berbak
7	7	2013	Bangunan dan Gedung
8	8	2013	Penyelenggaraan Jalan Daerah



9	9	2013	Perubahan Badan Hukum Perusahaan Daerah Sabak Holding Company menjadi Perseroan Terbatas Sabak Holding Company
10	10	2013	Perubahan Atas Perda Nomor 5 Tahun 2001 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
11	11	2013	Perubahan Atas Perda Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada PT. Bank Jambi
12	12	2013	Penyelenggaraan Pelayanan Publik
13	13	2013	Tanggung Jawab Sosial Lingkunga Perusahaan
14	14	2013	Pembentukan Organisasi Tata Kerja Lembaga Lain
15	15	2013	Penyelenggaraan Kearsipan Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
16	16	2013	Penyelenggaraan Pendidikan Gratis dan Berkualitas
17	17	2013	APBD Tahun Anggaran 2014
18	18	2013	Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
19	19	2013	Penanggulangan Bahaya Kebakaran
20	20	2013	Pengelolaan Persampahan

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

17. Sekretariat Daerah

Sekretariat Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 35 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sekretariat Daerah mempunyai fungsi :

1. Penyusunan kebijakan pemerintahan daerah; pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah;
2. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah;
3. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Sekretariat Daerah melaksanakan 22 program dan 93 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Sekretariat Daerah tertera dalam tabel 4.38 dibawah ini.

Tabel 4.38
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
---------	----------	-----------	---



Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	10.906.508.600,00	10.090.968.451,00	92,52
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.634.894.000,00	4.189.487.856,00	90,39
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	171.900.000,00	161.040.450,00	93,68
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	132.000.000,00	103.950.000,00	78,75
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	25.295.000,00	23.295.000,00	92,09
Program Peningkatan kualitas Iman dan Taqwa Generasi Qurani	4.968.337.000,00	4.490.437.758,00	90,38
program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	166.390.000,00	154.906.500,00	93,10
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.540.376.800,00	1.429.842.416,00	92,82
Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	220.900.000,00	216.834.000,00	98,16
Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	742.157.100,00	710.496.300,00	95,73
Program Penataan Daerah Otonomi	1.060.700.000,00	982.486.900,00	92,63
Program Penataan Perangkat Daerah	511.865.000,00	501.698.700,00	98,01
Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah	118.425.000,00	117.881.000,00	99,54
Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	258.060.000,00	94.787.650,00	36,73
Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan Dan Pemanfaatan Tanah	146.400.000,00	129.195.000,00	88,25
program pembinaan dan pengembangan aparatur	113.000.000,00	0,00	0,00
program keagamaan dan kemasyarakatan	100.000.000,00	86.922.000,00	86,92
program fasilitasi organisasi kemasyarakatan, keagamaan dan profesi	79.550.000,00	37.400.000,00	47,01
program pembangunan infrastruktur pedesaan	618.238.300,00	588.576.187,00	95,20
program pembinaan generasi muda	109.050.000,00	59.916.700,00	54,94
Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1.863.430.000,00	1.706.228.140,00	91,56
Program Kerjasama Informasi dengan mas Media	4.629.000.000,00	4.548.059.094,00	98,25
JUMLAH	33.116.476.800,00	30.424.410.102,00	91,87

a. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)



Program ini bertujuan untuk mencegah dan memberantas penyakit-penyakit sosial yang ada di masyarakat dengan kegiatan berupa penyuluhan tentang bahaya narkoba.

b. Program Peningkatan Kualitas Iman dan Taqwa Generasi Muda Qurani

Program ini ditunjang oleh beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan MTQ tingkat kabupaten; pelaksanaan TC MTQ tingkat kabupaten; pelaksanaan MTQ tingkat propinsi; pelaksanaan Safari Ramadhan dan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha; pengembangan Qori-Qoriah, Hafizh-Hafizhah dan kaligrafer potensial; sunatan massal; kegiatan pesantren kilat anak yatim; pelaksanaan festival anak saleh Indonesia; pelaksanaan TC festival anak saleh Indonesia tingkat kabupaten; pelaksanaan festival anak saleh Indonesia tingkat provinsi; pelaksanaan TC MTQ tingkat provinsi; pengembangan pondok pesantren Tahfizh; serta pelaksanaan kegiatan Jema'ah haji dan Umroh.

c. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Program ini dimaksudkan untuk membina dan memfasilitasi wirausahawan dengan modal yang diberikan pemerintah daerah sehingga diharapkan usaha yang dijalankan akan dapat lebih berkembang, adapun kegiatan yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan dan pengelolaan kredit modal kerja pedesaan/kelurahan.

d. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan dari program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH diantaranya pengawasan tim raskin ke 11 kecamatan tentang distribusi raskin; pengawasan, pengkajian, pengendalian dan penyaluran dana KUPEM; peningkatan koordinasi dan pengawasan kegiatan lintas sektoral bidang ekonomi; pengawasan distribusi pupuk bersubsidi; pengendalian kegiatan pembangunan; sistem administrasi pelaporan kegiatan pembangunan; penyusunan program kerja pembangunan; koordinasi dan pengendalian pertambangan dan energi; koordinasi dan pengendalian dampak lingkungan hidup; koordinasi dan pengendalian kehutanan, perkebunan dan pertanian; monitoring, evaluasi dan sosialisasi kebakaran lahan dan hutan; koordinasi dan pengendalian potensi daerah; serta pelaksanaan penyaluran santunan kematian.

e. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat



Inti dari program ini guna penanganan kasus-kasus yang berhubungan dengan pemerintah daerah, adapun kegiatannya ialah penanganan kasus-kasus Pemkab (advokasi dan kuasa hukum).

f. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

Program penataan peraturan perundang-undangan memiliki kegiatan diantaranya penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan; legislasi rancangan peraturan perundang-undangan; fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan; publikasi peraturan perundang-undangan; kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan perundang-undangan daerah; serta penyusunan abstrak produk hukum daerah.

g. Program Penataan Daerah Otonomi Baru

Kegiatan dari program ini diantaranya pengelolaan pemerintahan umum; penataan dan pengawasan batas daerah; peningkatan kapasitas Camat; serta pembakuan nama rupa bumi.

h. Program Penataan Perangkat Daerah

Program penataan perangkat daerah memiliki kegiatan berupa penataan kelembagaan perangkat daerah; serta standar kompetensi jabatan; serta penyusunan prosedur indeks kepuasan masyarakat, standar Operasional Prosedur; Standar Pelayanan Minimal dan Reformasi Birokrasi.

i. Program Penyusunan dan Penyempurnaan Tupoksi Perangkat Daerah

Program ini bertujuan untuk lebih mengefektikan pelaksanaan pemerintahan dari sisi pembagian tugas pokok. Adapun kegiatannya berupa penyusunan dan penyempurnaan tupoksi daerah.

j. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana dan Prasarana Daerah

Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah dengan kegiatan diantaranya pendirian Bank Perkreditan Rakyat; pengembangan, promosi daerah; serta BUMD.

k. Program Penataan Penguasaan Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

Program ini dimaksudkan untuk meminimalisir sengketa lahan yang terjadi di wilayah kabupaten Tanjung Jabung Timur. Program ini ditunjang dengan kegiatan berupa fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan.

l. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur



Dalam rangka upaya meningkatkan kualitas pegawai negeri sipil diperlukan pembinaan dan pengembangan aparatur, sebagai upayanya dilaksanakan kegiatan berupa pembinaan kader KORPRI.

m. Program Keagamaan dan Kemasyarakatan

Melalui program ini diharapkan akan terwujud kehidupan agamis. Adapun kegiatan yang dilaksanakan ialah pembinaan dan pengembangan pondok pesantren; serta peringatan hari-hari besar keagamaan.

n. Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan

Program ini ditujukan untuk pelaksanaan lelang secara on-line dengan kegiatan Sistem Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

o. Program Pembinaan Generasi Muda

Program ini ditunjang dengan kegiatan berupa penyelenggaraan kegiatan Tabligh Akbar.

p. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

Kegiatan dari program pengembangan komunikasi , informasi dan media massa diantaranya berupa pengadaan barang dan jasa dokumentasi; pembuatan majalah/cetakan berkala; penyediaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan media center; serta penataan dan pengelolaan studio dan komunikasi.

q. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media

Program kerjasama informasi dengan mass media memiliki kegiatan berupa penyebarluasan informasi pembangunan daerah; penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintah daerah; berlangganan majalah dan surat kabar harian, mingguan, bulanan; publikasi penerangan masyarakat, sosialisasi dan promosi; serta penataan, pengkajian dan pengembangan sistem data, informasi dan komunikasi.

Permasalahan yang dihadapi selama tahun 2013 oleh Sekretariat Daerah antara lain:

- 1). Masih kurangnya kasubbag dalam pelaksanaan administrasi dalam beberapa bagian di Sekretariat Daerah.
- 2). Kurangnya sarana penunjang kerja.
- 3). Lambannya penyerapan dana KMK oleh masyarakat karena salah satu syarat peminjaman adalah agunan berupa sertifikat, sementara masyarakat hanya memiliki sporadik.
- 4). Data PPLS tentang RTS-PM raskin sudah tidak sesuai dengan fakta lapangan.



- 5). Penebusan raskin yang dilakukan oleh pihak desa selalu lambat karena tidak semua masyarakat dapat melakukan setoran secara tepat waktu.
- 6). Tagihan kredit KUEM yang menunggak dikarenakan kesadaran kreditur dalam pembayaran dan pindah alamat tanpa pemberitahuan
- 7). Pengecer dan distributor tidak pernah melaporkan jadwal penyaluran dan penebusan, jenis pupuk, jumlah pupuk dan penerima pupuk bersubsidi.
- 8). Rumitnya syarat pembentukan BPR dari Bank Indonesia.

Solusi yang dapat dilakukan guna meminimalisir permasalahan yang timbul, antara lain :

- 1). Memberdayakan personil yang ada agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
- 2). Memaksimalkan sarana penunjang yang ada.
- 3). Perlu ditinjau ulang tentang syarat pinjaman berupa agunan sertifikat.
- 4). BPS harus melaksanakan pendataan ulang di tahun 2014 sehingga penerima raskin dapat tepat sasaran.
- 5). Penganggaran untuk penyaluran dari titik distribusi ke titik bagi pada ADD ataupun ADK agar ditingkatkan.
- 6). Adanya kebijakan dari Pemerintah Provinsi terhadap jaminan nasabah KUEM yang macet yaitu dengan pemutihan pinjaman dan mengeksekusi jaminan /agunan.
- 7). Perlu adanya koordinasi dan penekanan terhadap distributor dan pengecer tentang penyaluran pupuk bersubsidi.

Sejalan dengan implementasi Otonomi Daerah, berbagai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan perlu diatur lebih lanjut melalui Peraturan Daerah, Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati. Tabel berikut akan menggambarkan produk hukum yang dihasilkan tahun 2010-2013.

Tabel 4.39
Jumlah Produk Hukum
Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2010-2013

NO	NAMA PERATURAN	2010	2011	2012	2013
1	Peraturan Daerah	3 produk	11 produk	11 produk	20 produk
2	Peraturan Bupati	23 produk	18 produk	43 produk	42 produk
3	Keputusan Bupati	309 produk	430 produk	513 produk	527 produk

Sumber : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur.

Dalam upaya peningkatan kualitas iman dan taqwa generasi muda Qurani, kabupaten Tanjung Jabung Timur selama tahun 2013 telah berhasil meraih beberapa prestasi, antara lain : terbaik I Tilawah Cabang Cacat Netra, terbaik I Kaligrafi cab.



Dekorasi, terbaik I Kaligrafi cab. Hiasan Mushaf, terbaik I cabang M2IQ, juara I cabang Tilawatil Qur'an (Putri), juara I cabang Hafalan Juz 'Amma (Putri), juara I cabang Ceramah Agama (Putri), juara I cabang Mewarnai (Putra), juara I cabang Mewarnai (Putri), juara I cabang Cerita Islami (Putra).

18. Badan Kepegawaian Daerah

Badan Kepegawaian Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Kepegawaian Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Kepegawaian daerah;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Kepegawaian daerah.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Kepegawaian daerah; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Badan Kepegawaian Daerah melaksanakan 8 program dan 52 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Kepegawaian Daerah tertera dalam tabel 4.40 dibawah ini.

Tabel 4.40
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Kepegawaian Daerah
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.169.500.000,00	1.102.706.459,00	94,29
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	515.377.500,00	506.700.435,00	98,32
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	465.344.000,00	423.894.600,00	91,09
Program Fasilitasi Pindah/Purna Tugas PNS	84.957.000,00	84.393.800,00	99,34
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00
Program Pendidikan Kedinasan	2.180.260.000,00	2.046.231.050,00	93,85
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	216.730.000,00	211.276.000,00	97,48
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	2.805.100.500,00	2.220.266.368,00	79,15



JUMLAH	7.453.269.000,00	6.611.468.712,00	88,71
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------

a. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin pegawai negeri sipil lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kegiatan dari program peningkatan disiplin aparatur berupa pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya; rekapitulasi evaluasi absensi PNS lingkup Tanjab Timur; pengadaan kartu tanda pengenal (ID CARD); pemeriksaan kesehatan (*general check up*) PNS yang sakit; serta pengambilan sumpah PNS.

b. Program Fasilitas Pindah/Purna Tugas PNS

Dengan kegiatan diantaranya pemulangan pegawai yang pensiun; pemulangan pegawai yang tewas dalam melaksanakan tugas; serta prosesan usulan pensiun dan pangkat pengabdian.

c. Program Pendidikan Kedinasan

Kegiatan dari program ini antara lain peningkatan keterampilan dan profesionalisme; pendidikan dan penjejangan struktural Diklatpim II dan III; serta pendidikan dan penjejangan struktural Diklatpim IV.

d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Adapun kegiatannya dari program ini diantaranya berupa evaluasi dan pemrosesan pemberian Tunjangan Kesejahteraan Daerah (TKD); serta sosialisasi peraturan kepegawaian tentang pembinaan disiplin dan pemberhentian PNS.

e. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Untuk menunjang program pembinaan dan pengembangan aparatur, dibuatlah beberapa kegiatan seleksi penerimaan calon PNS; penataan sistem administrasi pengurusan kenaikan pangkat otomatis PNS; pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi; proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS; pemberian bantuan penyelenggaraan penerimaan praja IPDN; pengelolaan kenaikan gaji berkala dan cuti PNS; pengembangan sistem informasi manajemen kepegawaian Daerah; pelayanan kartu taspen, taperum, dan kartu pegawai; operasional tim bidang pertimbangan jabatan dan kepangkatan; pemberian bantuan pendidikan di PTN/PTS; penyelenggaraan diklat dan ujian sertifikasi pengadaan barang dan jasa; penyusunan formasi PNS; penempatan PNS/distribusi PNS; pemetaan PNS lingkup kab. Tanjung Jabung Timur; penyelenggaraan diklat teknis administrasi kepegawaian; seleksi penerimaan



CPNS (seleksi penerimaan honorer kategori II); pembekalan masa persiapan pensiun; serta training ESQ bagi pejabat struktural.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2013, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1). Belum optimalnya pengisian jabatan struktural pada setiap SKPD.
- 2). Minimnya jumlah pejabat struktural eselon II yang mengikuti diklat penjenjangan karir.
- 3). Minimnya sumberdaya aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi.
- 4). PNS masih memiliki pengetahuan dan pemahaman yang minim tentang peraturan kepegawaian dan disiplin PNS.
- 5). Keterbatasan anggaran dalam penyusunan rencana pembinaan karir.
- 6). Proses pelayanan administrasi yang tidak tepat waktu karena keterlambatan penyerahan berkas dari SKPD.

Dari beberapa permasalahan yang dihadapi sebagaimana diuraikan diatas, maka ada beberapa upaya yang harus dilakukan untuk mengurangi, meminimalisir dan menyelesaikan permasalahan tersebut yaitu sebagai berikut :

- 1). Pengembangan sumberdaya aparatur sesuai dengan keahlian, kompetensi dan beban kerja.
- 2). Prioritas pejabat struktural eselon II untuk mengikuti diklat penjenjangan karir sehingga memiliki kompetensi dan pola pikir yang sesuai dalam jabatan struktural eselon II.
- 3). Pengembangan standar operasional prosedur pelayanan kepegawaian yang efisien dan efektif dalam menunjang pelayanan prima BKD kepada seluruh PNS.
- 4). Mengintensifkan sosialisasi dan koordinasi antar instansi terhadap pelaksanaan peraturan kepegawaian.
- 5). Peningkatan kapasitas anggaran guna penyusunan rencana pembinaan karir bagi para PNS.

Berikut merupakan komposisi pegawai lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010-2013.

Tabel 4.41
Komposisi Aparatur Negara Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2010-2013



No	Aparatur Negara	2010	2011	2012	2013
Σ PNS		4.521	4.702	4.603	4.561
1	Golongan I	95	68	67	68
2	Golongan II	1.392	1.380	1.308	1.280
3	Golongan III	2.302	2.284	2.102	2.101
4	Golongan IV	732	970	1126	1,112
Σ Pejabat eselon		394	420	477	563
1	Eselon I	-	-	-	-
2	Eselon II	20	25	26	26
3	Eselon III	132	156	141	160
4	Eselon IV	242	239	310	322
5	Eselon V				56
Σ Menurut Pendidikan		4.521	4.702	4.603	4.561
1	SD	45	72	69	58
2	SMP	80	81	78	69
3	SLTA	1.127	1.061	1.032	990
4	DI & DII	649	875	839	741
5	DIII	844	563	549	560
6	S1 & DIV	1.756	2.033	2.008	2.066
7	S2	20	17	28	67
8	S3	-	-	-	-

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Tanjung Jabung Timur

19. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah melaksanakan 6 program dan 44 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan



realisasi penyerapan belanja Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tertera dalam tabel 4.42 dibawah ini.

Tabel 4.42
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.946.950.500,00	3.666.952.099,00	92,91
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.531.442.400,00	1.369.841.155,00	89,45
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	26.211.000,00	21.446.000,00	81,82
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	142.050.000,00	129.000.000,00	90,81
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	188.754.500,00	151.207.025,00	80,11
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan daerah	5.151.108.600,00	4.450.070.582,00	86,39
JUMLAH	10.986.517.000,00	9.788.516.861,00	89,10

a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Program ini ditunjang dengan kegiatan diantaranya penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD; penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan penyusunan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD; penyusunan sistem informasi keuangan daerah; bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah; peningkatan manajemen aset/barang daerah; intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah; pendataan objek pajak dan retribusi daerah; sistem informasi dan manajemen gaji; pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; pengamanan aset milik pemerintah; pengendalian keuangan daerah; penyusunan laporan keuangan akuntansi wilayah; sosialisasi pajak dan retribusi daerah dalam rangka peningkatan PAD; operasional UPTD wilayah timur; operasional UPTD wilayah barat;serta penyusunan Sistem Informasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) .

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun anggaran 2013, masih terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dapat



mempengaruhi keberhasilan dan kegagalannya. Beberapa permasalahan tersebut, antara lain :

- 1) Dalam upaya meningkatkan pencapaian sistem keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabilitas dirasa masih rendahnya tingkat keberhasilan koordinasi dengan SKPD lain.
- 2) Dalam upaya meningkatkan pengelolaan manajemen aset/khususnya dalam sertifikasi lahan milik Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Timur, peran dari instansi vertikal (BPN) masih terkendala birokrasi yang panjang.

Solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi dan meminimalisir permasalahan tersebut adalah :

- 1) Melakukan rapat koordinasi secara rutin dan wajib dihadiri oleh pejabat yang berwenang mengambil kebijakan.
- 2) Melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan instansi vertikal yang berkompeten dalam rangka memperpendek birokrasi dan rentang waktu.

20. Inspektorat

Inspektorat merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 30 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Inspektorat Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Inspektorat mempunyai fungsi :

1. Perencanaan program pengawasan;
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan.

Pada Tahun 2013, Inspektorat melaksanakan 8 program dan 34 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Inspektorat tertera dalam tabel 4.43 dibawah ini.

Tabel 4.43
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Inspektorat
Tahun Anggaran 2013



PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	572.061.900,00	563.479.472,00	98,50
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	382.750.000,00	379.509.980,00	99,15
Program Peningkatan disiplin aparatur	13.250.000,00	13.250.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	258.650.000,00	258.650.000,00	100,00
Program peningkatan pengembangan sistem palaporan capaian kinerja dan keuangan	16.000.000,00	15.997.000,00	99,98
Program Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	1.869.436.000,00	1.864.583.250,00	99,74
Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	259.000.000,00	258.867.350,00	99,95
Program penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	29.960.000,00	29.635.200,00	98,92
JUMLAH	3.401.107.900,00	3.383.972.252,00	99,50

a. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Program ini memiliki beberapa kegiatan diantaranya pelaksanaan pengawasan internal secara berkala; tindak lanjut hasil temuan pengawasan; koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif; evaluasi berkala temuan hasil pengawasan; review, monitoring dan evaluasi; koordinasi, monitoring dan evaluasi Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi; Pelaksanaan SAP untuk mencapai opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP); pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintah desa; ekspose hasil pemeriksaan dan penyusunan LHP; monitoring dan penyelesaian TP-TGR; serta percepatan tindak lanjut.

b. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelaksanaan program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan kegiatan berupa pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; serta pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja.

c. Program Penataan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan



Program ini didukung melalui kegiatan penyusunan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan.

Beberapa permasalahan/kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pengawasan SKPD antara lain :

- 1). Kurangnya sumber daya manusia di bidang pengawasan karena keterbatasan jumlah dan kualitas auditor.
- 2). Adanya kecenderungan perubahan kebijakan pemerintah pusat sehingga perlu adanya koordinasi yang intens dan menyeluruh.
- 3). Masih adanya OBRIK/SKPD yang belum sepenuhnya mampu menyelesaikan tindaklanjut hasil pemeriksaan. Hal ini disebabkan oleh belum adanya saksi yang tegas terhadap obrik yang tidak atau belum melaksanakan tindaklanjut hasil pemeriksaan.
- 4). kurangnya pemahaman obrik terhadap rekomendasi dari temuan pemeriksaan.
- 5). Sulitnya menindaklanjuti temuan yang berhubungan dengan pihak ketiga.
- 6). Masih kurangnya kesadaran Objek Pemeriksaan (SKPD) mengenai tupoksi inspektorat sebagai leading sektor dalam hal pengawasan dan pembinaan, sehingga pada saat pemeriksaan dan pengawasan dilakukan, obrik tidak mengindahkan kegiatan pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan inspektorat.

Solusi yang dilaksanakan untuk meminimalisir permasalahan tersebut:

- 1). Pengiriman staf untuk mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi tenaga auditor lebih ditingkatkan.
- 2). Koordinasi lebih intens untuk meningkatkan sinergi dengan pihak-pihak yang terkait dan antar APIPDA.
- 3). Pemutakhiran data yang berkaitan dengan temuan dan hasil pengawasan akan lebih diintensifkan.
- 4). Pendekatan dengan objek pemeriksaan (SKPD) lebih ditingkatkan sehingga pelaksanaan pengawasan dan pembinaan akan berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.

Tabel 4.44

Target dan Realisasi Pemeriksaan Internal dan Review



Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2012-2013

No	Kegiatan	2012			2013		
		Target	Realisasi	Ket	Target	Realisasi	Ket
A	Pengawasan Internal secara Berkala						
1	Pemeriksaan Kasus Pengaduan	15 Kasus	16 Kasus		17 Kasus	18 Kasus	
2	Reguler/sertijab	43 Obr	28 Obr		43 Obr	36 Obr	
3	Sidak	3 Paket	3 Paket	1 pkt untuk 11 kec.	3 Paket	3 Paket	1 pkt untuk 11 kec.
4	Dana BOS	11 kec	0 Kec		11 kec	5 Kec	
B	Review Monitoring & Evaluasi						
1	Review Laporan Keuangan	32 SKPD	32 SKPD		32 SKPD	32 SKPD	
2	LAKIP	32 SKPD	32 SKPD		32 SKPD	32 SKPD	
3	Monitoring ADD	6 kec	19 Obr	1 kec utk 93 desa/kel.	6 kec	6 kec	
4	Monitoring Penutupan Kas	3 Paket	3 Paket	1 pkt utk 32 SKPD, 11 kec	4 Paket	4 Paket	1 pkt utk 32 SKPD, 11 kec
5	Pre-audit/monitoring khusus	-	-		17 kasus	47 kasus	Monitoring Aset

Sumber : Inspektorat Kab. Tanjung Jabung Timur

21. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 25 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Perizinan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Perizinan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Perizinan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan 8 program dan 29 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu tertera dalam tabel 4.45 dibawah ini.

Tabel 4.45
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Pelayanan Terpadu



Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	670.368.500,00	650.679.053,00	97,06
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	282.026.000,00	265.622.415,00	94,18
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	7.400.000,00	7.400.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	50.000.000,00	44.750.000,00	89,50
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	9.000.000,00	8.848.000,00	98,31
Program Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	354.919.500,00	350.189.500,00	98,67
Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	501.070.000,00	491.464.850,00	98,08
program penataan peraturan perundang-undangan	70.000.000,00	65.035.500,00	92,91
JUMLAH	1.944.784.000,00	1.883.989.318,00	96,87

a. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pelayanan dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, kegiatan yang dilaksanakan antara lain berupa penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik; dan sosialisasi sistem informasi terhadap layanan publik.

b. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah

Tujuan program ini adalah untuk menjalin dan meningkatkan hubungan ekonomi, sosial dan budaya antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Daerah lainnya yang saling menguntungkan. Adapun kegiatan pokoknya dari program ini meliputi penataan pelayanan perizinan satu pintu; pendataan pelayanan perizinan satu pintu; dan evaluasi dan penertiban pelayanan perizinan terpadu.

Berbagai permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu selama tahun 2013, diantaranya :

- 1) Masih terbatasnya kemampuan SDM aparatur Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melakukan proses pelayanan perizinan.
- 2) Masih kurangnya SDM aparatur (kuantitas) pada KPPT, masih terdapatnya penggunaan tenaga honor pada proses pelayanan perizinan dan belum terisinya kasubbag TU.
- 3) Kelembagaan yang masih berstatus kantor sehingga koordinasi dengan SKPD teknis berkaitan dengan perizinan masih belum optimal.



- 4) PTSP-PM (Pelayanan Terpadu Satu Pintu Penanaman Modal) yang belum ada di KPPT masih melekat pada SKPD Bappeda.
- 5) Aturan/regulasi daerah yang berkaitan dengan perizinan yang masih lemah.
- 6) Kurang optimalnya peran tim teknis dalam proses pelayanan perizinan.
- 7) Kondisi Geografis yang masih sulit terjangkau sehingga masyarakat yang jauh untuk mengurus perizinan menjadi kendala.
- 8) Letak bangunan KPPT yang kurang strategis. KPPT merupakan salah satu instansi pelayanan publik di bidang perizinan yang idealnya secara administratif mudah dipahami, jelas, transparan, pasti dan secara tata letak kantor juga mudah dilihat publik.

Solusi yang dapat dilakukan oleh Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu untuk meminimalisir / memecahkan masalah, antara lain :

- 1) Mengikuti pelatihan/bintek tentang pelayanan perizinan sehingga dapat meningkatkan kemampuan SDM aparatur dalam melaksanakan tugasnya secara profesional.
- 2) Mengusulkan untuk penambahan pegawai khususnya pada bagian pelayanan perizinan dan pengisian pejabat struktural pada KPPT.
- 3) Pengusulan status kelembagaan menjadi badan untuk penguatan kelembagaan. Dengan status badan koordinasi menjadi kuat dan untuk bidang penanaman modal masuk menjadi salah satu bidang pada lembaga PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu).
- 4) Perlu diadakan forum evaluasi tim teknis dan forum evaluasi tim pengawasan terpadu dan penertiban perizinan untuk memperoleh gambaran tentang pelaksanaan kerja tim teknis serta tim pengawasan terpadu, penertiban dan untuk menerima masukan /saran perbaikan pelaksanaan kerja tim yang dapat dijadikan rekomendasi di tahun berikutnya.
- 5) Mengotimalkan pelaksanaan pelayanan perizinan ditempat dengan menggunakan mobil pelayanan keliling.
- 6) Menyiapkan aturan/regulasi daerah yang berkaitan dengan perizinan sebagai dasar kepastian hukum bagi penyelenggara perizinan maupun penerima izin.

Keberadaan KPPT di Kabupaten Tanjung Jabung Timur merupakan suatu prestasi yang bisa dibanggakan. Kebijakan ini pada dasarnya untuk memberi batasan yang lebih tegas antara institusi yang membuat kebijakan dengan institusi yang melaksanakan kebijakan dan operasional.



Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dibidang Perizinan Terpadu Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat 29 jenis perizinan yang dilimpahkan ke KPPT Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 telah memberikan pelayanan perizinan ± 8.150 izin. Izin yang dikeluarkan dari tahun 2008 sampai dengan 2012 terus meningkat setiap tahunnya, periode tahun 2013 ada sebanyak 2.229 izin yang dikeluarkan. Peningkatan ini mengindikasikan investasi maupun pembangunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur semakin menggembirakan. Untuk lebih rincinya dapat dilihat dari tabel 4.46 berikut.

Tabel. 4.46
Jumlah Izin yang Dikeluarkan, 2008-2013

NO	JENIS IZIN	2008	2009	2010	2011	2012	2013	TOTAL
1	IMB	35	194	118	80	231	109	767
2	SITU	13	169	237	267	476	452	1.614
3	SIUP	22	162	230	260	449	455	1.578
4	TDP	19	143	228	263	460	456	1.569
5	HO	0	0	177	235	475	447	1.334
6	SIUJK	5	95	65	30	62	51	310
7	Praktek Dokter	0	9	16	16	5	8	54
8	Praktek Bidan	0	8	12	75	49	32	176
9	Praktek Perawat	0	2	3	6	1	2	14
10	Toko Obat	0	3	3	2	0	2	10
11	Reklame	1	5	4	5	245	168	428
12	Apotek	0	0	0	0	0	1	1
13	IPM	3	11	19	77	30	11	151
14	IUI	0	0	1	1	0	1	3
15	TDI	0	0	1	4	2	14	21
16	IUP	0	0	0	1	1	0	2
17	IUP-Pengelolaan	0	1	0	0	0	0	1
18	IUP-Budidaya	1	2	2	0	0	3	7
19	Galian C	2	2	2	9	13	12	40
20	Izin lokasi	8	2	4	11	4	2	37
21	Izin prinsip	5	12	4	1	0	0	22
22	Izin Klinik	0	0	0	1	1	2	4
23	TDG	0	0	0	3	2	2	7
	JUMLAH	114	820	1.127	1.346	2.505	2.229	8.150

Sumber : Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Tanjung Jabung Timur

22. Kecamatan



Sebelas Kecamatan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 41 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. 11 Kecamatan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai fungsi :

1. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
3. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan/ atau kelurahan; dan
7. melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/ atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan

Total program dan kegiatan yang dilaksanakan 11 kecamatan pada tahun 2013 sebanyak 80 program dan 258 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja pada 11 kecamatan tertera dalam tabel 4.47 dibawah ini.

Tabel 4.47
Anggaran dan Realisasi Penyerapan 11 Kecamatan
Lingkup Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun Anggaran 2013

NO	KECAMATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	KECAMATAN MUARA SABAK BARAT	3.789.331.534,35	3.555.692.533,00	93,83
2	KECAMATAN MUARA SABAK TIMUR	2.708.652.534,35	2.326.274.773,00	85,88
3	KECAMATAN MENDAHARA	2.330.891.534,35	2.144.661.315,00	92,01
4	KECAMATAN MENDAHARA ULU	2.181.021.534,35	2.076.103.743,00	95,19
5	KECAMATAN GERAGAI	2.098.753.534,35	1.736.721.925,00	82,75
6	KECAMATAN KUALA JAMBI	1.943.993.386,35	1.855.736.600,00	95,46
7	KECAMATAN DENDANG	2.384.930.534,35	2.157.912.600,00	90,48
8	KECAMATAN BERBAK	2.026.226.598,35	1.707.996.007,00	84,29
9	KECAMATAN RANTAU RASAU	2.207.621.534,35	2.045.947.738,00	92,68
10	KECAMATAN NIPAH PANJANG	2.707.067.534,35	2.518.900.885,00	93,05
11	KECAMATAN SADU	2.105.546.534,35	1.951.215.787,00	92,67
	JUMLAH	26.484.036.793,85	24.077.163.906,00	90,91

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



Program ini berisikan kegiatan penunjang administrasi perkoantoran seperti jasa surat menyurat, jasa komunikasi, air dan listrik, jasa perlengkapan dan peralatan kantor, jasa kebersihan kantor, penyediaan alat tulis kantor, makan dan minum serta rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

b. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini lebih menitikberatkan pada sarana infrastruktur dan pemeliharaan fasilitas kantor seperti pembangunan, pengadaan, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana dan prasarana aparatur.

c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Pada program ini berisikan kegiatan tentang pengadaan pakaian dinas pegawai di kecamatan

d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini berisikan tentang penyusunan capaian kinerja dan keuangan kecamatan yang disusun dalam dokumen pelaporan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban.

e. Program Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi

Program ini merupakan program dari provinsi Jambi yang bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin sehingga kesejahteraan kehidupan dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Selain bedah rumah, bantuan yang diberikan antara lain berupa beasiswa, alsintan, motor roda tiga, dan sertifikasi tanah.

f. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa

Subtansi dari program ini ialah alokasi anggaran di kelurahan baik untuk operasional/rutin maupun pembangunan di masing-masing kelurahan. Anggaran ini dikelola oleh masing-masing kelurahan yang ada.

g. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik khususnya pelayanan dibidang administrasi kependudukan, kegiatan yang mendukung program ini berupa penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik.

h. Program Pemberdayaan Masyarakat Miskin

Program ini merupakan program dari kabupaten Tanjung Jabung Timur yang bertujuan untuk penguatan ekonomi masyarakat miskin sehingga



kesejahteraan kehidupan dapat dirasakan oleh masyarakat miskin. Adapun kegiatan yang mendukung program ini ialah bedah rumah.

Adapun target dan realisasi dari program Samisake di 11 kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.48
Target dan Realisasi Program Samisake
Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Tahun 2013

No	Kecamatan	TARGET		REALISASI		%
		Unit	Anggaran (Rp)	Unit	Anggaran (Rp)	
I	BEDAH RUMAH					
1	Rantau Rasau	58	580.000.000	58	580.000.000	100
2	Sadu	45	450.000.000	45	450.000.000	100
3	Mendahara	64	640.000.000	64	640.000.000	100
4	Geragai	34	340.000.000	34	340.000.000	100
5	Muara Sabak Timur	55	550.000.000	53	530.000.000	96,36
6	Kuala Jambi	38	380.000.000	38	380.000.000	100
7	Berbak	44	440.000.000	44	440.000.000	100
8	Mendahara Ulu	56	560.000.000	56	560.000.000	100
9	Dendang	60	600.000.000	56	553.564.968	92,26
10	Muara Sabak Barat	50	500.000.000	50	500.000.000	100
11	Nipah Panjang	46	460.000.000	46	460.000.000	100
Total		550	5.500.000.000	544	5.433.564.968	98,79
II	SERTIFIKASI					
1	Rantau Rasau	-	-	-	-	-
2	Sadu	45	45.000.000	-	-	-
3	Mendahara	72	72.730.534	-	-	-
4	Geragai	34	34.000.000	-	2.786.182	8,19
5	Muara Sabak Timur	39	39.000.000	-	-	-
6	Kuala Jambi	5	5.000.000	-	-	-
7	Berbak	61	61.650.000	-	-	-
8	Mendahara Ulu	26	26.030.534	-	-	-
9	Dendang	58	58.000.000	-	-	-
10	Muara Sabak Barat	59	59.000.000	-	-	-
11	Nipah Panjang	74	74.000.000	-	-	-
Total		473	474.411.069	-	2.786.182	8,19
III	BEASISWA					
1	Rantau Rasau	199	171.500.000	195	168.500.000	98,25
2	Sadu	198	163.950.000	198	163.500.000	99,73
3	Mendahara	127	119.500.000	92	85.750.000	71,76
4	Geragai	410	382.419.753	285	274.000.000	71,65
5	Muara Sabak Timur	98	97.500.000	84	82.750.000	84,87



6	Kuala Jambi	368	354.419.753	293	273.000.000	77,03
7	Berbak	220	197.000.000	131	114.500.000	58,12
8	Mendahara Ulu	176	159.500.000	123	99.500.000	62,38
9	Dendang	82	78.000.000	68	61.750.000	79,17
10	Muara Sabak Barat	149	147.350.000	81	64.250.000	43,60
11	Nipah Panjang	26	27.500.000	18	15.500.000	56,36
Total		2.053	1.898.639.506	1.568	1.403.000.000	73,90
IV	ALSINTAN					
1	Rantau Rasau	-	-	-	-	-
2	Sadu	3	84.000.000,00	3	83.700.000,00	99,64
3	Mendahara	-	-	-	-	-
4	Geragai	2	45.580.534,35	2	44.345.000,00	97,29
5	Muara Sabak Timur	1	28.000.000,00	1	26.845.000,00	95,88
6	Kuala Jambi	1	26.882.386,35	-	-	-
7	Berbak	2	45.580.534,35	2	43.700.000,00	95,87
8	Mendahara Ulu	-	-	-	-	-
9	Dendang	2	56.000.000,00	2	53.690.000,00	95,88
10	Muara Sabak Barat	2	56.880.534,35	2	54.550.000,00	95,90
11	Nipah Panjang	2	45.730.534,35	2	44.775.000,00	97,91
Total		15	388.654.524	14	351.605.000	90,47
V	RODA 3					
1	Rantau Rasau	1	25.730.534,35	1	25.000.000,00	97,16
2	Sadu	1	27.580.534,35	1	25.000.000,00	90,64
3	Mendahara	-	-	-	-	-
4	Geragai	-	-	-	-	-
5	Muara Sabak Timur	1	25.730.534,35	1	25.000.000,00	97,16
6	Kuala Jambi	-	-	-	-	-
7	Berbak	1	28.000.000,00	1	27.000.000,00	96,43
8	Mendahara Ulu	1	26.700.000,00	1	25.000.000,00	93,63
9	Dendang	1	27.230.534,35	1	25.000.000,00	91,81
10	Muara Sabak Barat	-	-	-	-	-
11	Nipah Panjang	6	168.000.000,00	6	150.000.000,00	89,29
Total		12	328.972.137	12	302.000.000	91,80
VI	BANTUAN MODAL					
1	Rantau Rasau	11	55.000.000,00	11	55.000.000,00	100,00
2	Sadu	10	54.700.000,00	2	10.000.000,00	18,28
3	Mendahara	-	-	-	-	-
4	Geragai	6	30.230.247,00	6	30.000.000,00	99,24
5	Muara Sabak Timur	17	85.000.000,00	17	85.000.000,00	100,00
6	Kuala Jambi	12	61.728.395,00	-	-	-
7	Berbak	12	60.000.000,00	11	55.000.000,00	91,67
8	Mendahara Ulu	12	60.000.000,00	11	55.000.000,00	91,67
9	Dendang	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	100,00



10	Muara Sabak Barat	12	62.000.000,00	3	15.000.000,00	24,19
11	Nipah Panjang	10	50.000.000,00	10	50.000.000,00	100,00
Total		104	524.658.642	73	361.000.000	68,81
VII	LISTRIK GRATIS					
1	Rantau Rasau	-	-	-	-	-
2	Sadu	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	100,00
3	Mendahara	-	-	-	-	-
4	Geragai	-	-	-	-	-
5	Muara Sabak Timur	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	100,00
6	Kuala Jambi	3	4.200.000,00	3	4.200.000,00	100,00
7	Berbak	-	-	-	-	-
8	Mendahara Ulu	-	-	-	-	-
9	Dendang	5	7.000.000,00	5	7.000.000,00	100,00
10	Muara Sabak Barat	5	7.000.000,00	-	-	-
11	Nipah Panjang	5	7.000.000,00	4	5.600.000,00	80,00
Total		28	39.200.000	22	30.800.000	78,57

Sumber : 11 Kecamatan kab. Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah.

Sedangkan target dan realisasi dari program Bedah Rumah Samudra di 11 kecamatan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 4.49
Target dan Realisasi Program Bedah Rumah Samudra
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

No	Kecamatan	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%
1	Muara Sabak Timur (40 Unit dan 71 Persil)	Material	340.000.000	340.000.000	-	100
		Upah Tukang	60.000.000	60.000.000	-	100
		Sertifikat	71.000.000	-	71.000.000	-
2	Geragai (63 Unit dan 104 Persil)	Material	535.500.000	535.500.000	-	100
		Upah Tukang	94.500.000	94.500.000	-	100
		Sertifikat	104.000.000	10.518.000	93.482.000	10,11
3	Dendang (55 Unit dan 98 Persil)	Material	467.500.000	461.158.200	6.341.800,00	98,64
		Upah Tukang	82.500.000	82.500.000	-	100
		Sertifikat	98.000.000	-	98.000.000	-
4	Muara Sabak Barat (65 Unit dan 96 Persil)	Material	552.500.000	552.500.000	-	100
		Upah Tukang	97.500.000	97.500.000	-	100
		Sertifikat	96.000.000	-	96.000.000	-
5	Mendahara (36 Unit dan 65 Persil)	Material	306.000.000	306.000.000	-	100
		Upah Tukang	54.000.000	54.000.000	-	100
		Sertifikat	65.000.000	-	65.000.000	-
6	Mendahara Ulu (29 Unit dan 53 Persil)	Material	246.500.000	246.500.000	-	100
		Upah Tukang	43.500.000	43.500.000	-	100
		Sertifikat	53.000.000	-	53.000.000	-



7	Kuala Jambi (7 Unit dan 17 Persil)	Material	59.500.000	59.500.000	-	100
		Upah Tukang	10.500.000	10.500.000	-	100
		Sertifikat	17.000.000	-	17.000.000	-
8	Rantau Rasau (79 Unit dan 120 persil)	Material	671.500.000	671.500.000	-	100
		Upah Tukang	118.500.000	118.500.000	-	100
		Sertifikat	120.000.000	-	120.000.000	-
9	Berbak (33 Unit dan 112 Persil)	Material	280.500.000	280.500.000	-	100
		Upah Tukang	49.500.000	49.500.000	-	100
		Sertifikat	112.000.000	-	112.000.000	-
10	Nipah Panjang (51 Unit dan 87 Persil)	Material	433.500.000	433.500.000	-	100
		Upah Tukang	76.500.000	76.500.000	-	100
		Sertifikat	87.000.000	-	87.000.000	-
11	Sadu (42 Unit dan 77 Persil)	Material	357.000.000	357.000.000	-	100
		Upah Tukang	63.000.000	63.000.000	-	100
		Sertifikat	77.000.000	-	77.000.000	-

Sumber : 11 Kecamatan kab. Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah.

Selain Samisake dan Samudra, 11 kecamatan di kabupaten Tanjung Jabung Timur juga melaksanakan pembangunan menggunakan 11 excavator yang didistribusikan di 11 kecamatan.

Tabel 4.50
Penggunaan Excavator di 11 Kecamatan Tahun 2013

NO	KECAMATAN	KEGIATAN	VOLUME	LOKASI
1	2	3	4	5
1	Rantau Rasau	1 Pembuatan saluran dan badan jalan	3,5 x 500 M	Rantau Rasau
		2 Perbaikan saluran dan badan jalan	3,5 x 500 M	Rantau Rasau
		3 Perbaikan saluran dan jalan	3,5 x 2.600	Rantau jaya
		4 Perbaikan saluran dan jalan	3,5 x 500 M	Rantau jaya
		5 Pembuatan saluran dan badan jalan	3,5 x 500 M	
		6 Perbaikan saluran dan jalan	3,5 x 3.800 M	Karya bakti
		7 Pembuatan saluran dan badan jalan	3,5 x 300 M	Karya bakti
		8 Pembuatan saluran dan badan jalan	3,5 x 4.500 M	Bangun karya
		9 Pembuatan saluran dan badan jalan	3,5 x 4.300 M	Bandar jaya
2	Mendahara Ulu	1 Pembuatan badan jalan dan tanggul	P : 14.000 M x L : 4 M	Desa sinar Wajo, Mencolok, Sungai Beras
		2 Pembersihan Lingkungan Perkantoran	P : 0,5 Ha	kantor camat
		3 Pembuatan Parit dan Drainase	P : 1.950 M x L : 3 M	RT.01, 02, 03 menuju sungai mendahara desa pematang rahim
		4 Pembuatan parit dan Normalisasi parit	p : 4.800 M x L : 3 M	RT.05, 06, 07, 09 dan 12 desa pematang rahim
3	Muara Sabak Timur	1 Pembuatan tanggul Perkebunan	P : 10.000 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Parit 0 s/d Parit 1 desa Kuala Simbur
		2 Pembuatan tanggul Perkebunan	P : 6.000 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Parit 1 Desa Kuala Simbur
		3 Pembuatan tanggul Perkebunan	P : 4.000 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Tanjung Merah RT 1 dan 2 Desa Kota harapan



4	Mendahara	1	Tanggul Kebun	3.800 M	Parit Gantung
		2	Tanggul Kebun	3.500 M	Sungai lembah dalam
		3	Tanggul Kebun	4.500 M	Parit ngantik
		4	Tanggul Kebun	3.700 M	Sungai siput
		5	Tanggul Kebun	4.300 M	Sungai bakung dalam
5	Geragai	1	Pembuatan Jalan	P : 2.000 M x L : 3 M	Parit slamet langan tengah
		2	Pembuatan Parit	P : 2.000 M x L : 3 M	Parit slamet langan tengah
		3	Pembuatan Jalan	P : 100 M x L : 3 M	kantor camat geragai
		4	Pembuatan Parit	P : 600 M x 1 M	kantor camat geragai
		5	Steking lokasi kelompok tani	20 Ha	Dusun Geragai desa langan ulu
		6	Pembuatan Jalan	P : 2.500 M x L : 3 M	Dusun Geragai desa langan ulu
		7	Pembersihan saluran primer dan jalan yang satu	P : 2000 M x L ; 10 M	Desa suka maju
		8	Pembuatan Jalan	P : 4.000 M x L : 3 M	Parit slamet langan tengah
		9	Pembuatan Parit	P : 4.000 M x L : 3 M	Parit slamet langan tengah
		10	Steking lokasi kelompok tani	20 Ha	Dusun Geragai desa langan tengah
		11	Pembuatan Parit	P : 2.000 M x L : 1 M	Dusun Geragai desa langan tengah
		12	Normalisasi saluran jembatan tersumbat/buntu	P : 200 M x L ; 50 M	Desa suka maju
		13	Pembuatan badan jalan	P : 3.500 M x L : 3 M	Desa kota baru
		14	Pembuatan badan jalan	P : 3.500 M x L : 3 M	Des Rantau Karya
6	Sadu	1	Pembangunan tanggul lapangan sepak bola	P : 500 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Belakang kantor desa sungai benuh
		2	Pembangunan badan jalan	P : 1.300 M x L : 3 M x T : 1,5 M	dusun II - Dusun III
		3	Pembangunan badan jalan	P : 2.000 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Parit Ban dusun III (parit ban-parit I B)
		4	Pembangunan badan jalan	P : 750 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Parit Ban dusun III (parit I B-parit III)
		5	Pembangunan badan jalan	P : 750 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Parit Ban dusun III (parit III-parit V)
		6	Pembangunan saluran air	P : 3.000 M x L : 3 M	Parit Ban dusun III (parit ban-parit I B)
		7	Pembangunan saluran air	P : 3.500 M x L : 3 M	Parit Ban dusun III (parit I B-parit III)
		8	Pembangunan badan jalan	P : 6.100 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Parit Ban dusun III (parit V - batas labuhan pering)
7	Nipah Panjang	1	Pembuatan halaman kantor desa	P : 15 M x L : 20 M	Desa sungai jeruk
		2	Perbaikan jalan putus sungai jeruk-sadu	P : 15 M x L : 5 M x T : 3 M	Parit III
		3	Pembuatan Tanggul	P : 400 M x L : 3 M x T : 1,5 M	Parit III
		4	Pembuatan Tanggul dan jalan	P : 2.000 M x L : 7 M x T : 1 M	Parit IV
		5	Perbaikan gorong-gorong	P : 5 M x L : 73 M x T : 2,5 M	Jalan sungai jeruk-simpang datuk
		6	Penimbunan halaman lokasi MTQ	P : 30 M x L : 15 M	Parit III
		7	Pembuatan tanggul cetak sawah	P : 6.000 M x L : 3 M x T : 2 M	Parit I
		8	Rehab tanggul	P : 7.000 M x L : 3 M x T : 1,6 M	Dusun mekar rahayu
		9	Pembuatan halaman rumah dinas camat	P : 40 M x L : 2 M x T : 2 M	Nipah Panjang II
		10	Pembuatan tanggul cetak sawah	P : 7.000 M x L : 2 M x T : 1,5 M	Parit sialang desa pemusiran (masih dalam pengerjaan)
		11	Pembuatan tanggul cetak sawah	P : 5.000 M x L : 2 M x T : 1,5 M	Parit sungai jeruk



8	Muara Sabak barat	12	Pembuatan tanggul cetak sawah	P : 4.000 M x L : 2 M x T : 1,5 M	Parit sialang desa pemusiran
		1	pekerjaan Pembersihan lahan (steking)	24 Ha	Kelompok tani parit hidayah Rano
		2	pembersihan parit	P : 2.500 M x L : 3 M	parit hidayah Rano
		3	Pembuatan got lapangan bola kaki	P : 400 M x 1 M x : 1 M	Kelurahan Rano
		4	pembuatan jalan baru	P : 300 M x L : 3 M	parit hidayah Rano
		5	pembuatan tanggul	P : 2.500 M x 3 M x 2 M x 1,5 M	parit hidayah Rano
		6	pembuatan tanggul	P : 1.750 M x 3 M x 2 M x 1,5 M	Kelompok tani sumber rezeki kel. Rano
		7	pembuatan tanggul	P : 3.400 M x 3 M x 2 M x 1,5 M	Kelompok tani suka jaya kel. Nibung putih
		8	pembuatan tanggul	P : 5.240 M x 3 M x 2 M x 1,5 M	Kelompok tani nyiur makmur kel.singkep
9	Berkak	9	pembuatan tanggul	P : 3.100 M x 3 M x 2 M x 1,5 M	Kelompok tani lubuk bakung parit culum II
		1	Penimbunan jala besar Provinsi di SK.7	P : 2.000 M x L : 3 M x T : 1 M	kelurahan Simpang
		2	Penggalian Primer di SK. 7	P : 1.500 M x L : 2,5 M x T : 1,5 M	kelurahan Simpang
		3	pembuatan jalan di SK.7	P : 1.500 M x L : 3 M x T : 1 M	kelurahan Simpang
		4	Penimbunan jalan dermaga Rawasari	P : 100 M x L : 3 M x T : 1 M	kelurahan Simpang
		5	Penimbunan pintu air	P : 25 M x L : 3 M x T : 2 M	kelurahan Simpang
		6	Pembuatan Jalan baru dari pengayutan besar-belakang kantor Camat	P : 2.500 M x L : 3 M x T : 1 M	kelurahan Simpang
		7	Pebaikan tanggul di SK. 7	P : 500 M x L : 3 M x T : 1,5 M	kelurahan Simpang
		8	Penimbunan/perbaikan jalan Provinsi di SK.7	P : 700 M x L : 4 M x T : 0,8 M	kelurahan Simpang
		9	Penimbunan lahan kelompok tani RT. 18	P : 10 M x L : 10 M x T : 2 M	kelurahan Simpang
10	Kuala Jambi	10	Penggalian Pait dan penimbunan jalan di dusun Penggayut	P : 2.600 M x L : 3 M x T : 1,5 M	kelurahan Simpang
		1	Pembangunan areal bazar dan parkir untuk kegiatan MTQ	Luas : 1.034 M	Kelurahan Kampung Laut
		2	Pembangunan lapangan sepak bola Kantor camat untuk area MTQ	P : 200 M x L : 140 M	Kelurahan Kampung Laut
		3	Pembuatan tanggul di area kompleks perkantoran	v : 3.520 M3	Kelurahan Kampung Laut
		4	Pembangunan tanggul penahanan air pasang pada areal kebun masyarakat parit lapis RT. 20	T : 1,5 M x L : 3 s/d 4 M	Kelurahan Kampung Laut
		5	Pembangunan jalan rintisan di parit lapis	T ; 1 m x 6 m	Kelurahan Kampung Laut
		6	Service areal tanggul penahanan air pasang pada area kebun kelapa masyarakat di parit V RT 18/19	T: 0,75 m x L : 3 m	Kelurahan Kampung Laut
		7	Pembersihan rumah dinas camat	L: 54 M	Kelurahan Kampung Laut
		8	Pembuatan kolam 1 rumah dinas camat	Lebar : 6 m x dalam : 2 m	Kelurahan Kampung Laut
		9	Pembuatan kolam II rumah dinas camat	Lebar : 14 m x dalam : 2 m	Kelurahan Kampung Laut
		10	Pembuatan Parit di rumah dinas camat	Lebar : 2 m x dalam : 1,5 m	Kelurahan Kampung Laut
		11	Penimbunan Parit lama	L: 27 m	Kelurahan Kampung Laut



		12	Pembangunan tanggul penahan air pasang pada area kebun masyarakat di parit timur RT. 13/14 Dusun Raja wali	T: 1,2 m x L : 4 m	Kuala lagan
11	Dendang	1	Normalisasi Parit dan pembuatan badan jalan	P : 2.200 M x L: 5 M x T: 0,7 M	Sk 5 dan sk 7 dusun kaman desa catur rahayu
		2	pembuatan badan jalan	P : 1.100 M x L: 6 M x T: 1 M	Sk 13 dan Sk 14, desa catur rahayu
		3	Normalisasi Parit kiri dan kanan dan pembuatan badan jalan	P : 2.500 M x L: 6 M x T: 1 M	Sk 0 s/d Sk 5, desa Sidu mukti
		4	Pembuatan parit dan perbaikan jalan	P: 400	Sk 5 dusun tanjung sari
		5	Pembuatan badan jalan dan normalisasi parit	P : 2.200 M x L: 6 M x T: 1 M	kelurahan rantau indah RW. 3 dan 6
		6	Pembuatan badan jalan dan normalisasi parit	P : 1.000 M x L: 6 M x T: 1 M	kelurahan rantau indah sk 5 dan 6
		7	Pembuatan badan jalan dan normalisasi parit	P : 750 M x L: 4 M x T: 0,7 M	kelurahan rantau indah
		8	Pembuatan parit baru	P : 2.750 M x L: 3 M x T: 3 M	Parit 18 dan 19 desa koto kandis
		9	Pembuatan badan jalan	P : 2.750 M x L: 5 M x T: 0,7 M	Parit 18 dan 19 desa koto kandis
		10	Pembuatan badan jalan dan parit (baru rencana)	P : 3 M x L: 4 M x T: 0,5 M	rantau indah
		11	Pembuatan badan jalan dan parit (baru rencana)	P : 2.500 M x L: 4 M x T: 1 M	desa jati mulyo

Sumber : 11 Kecamatan kab. Tanjung Jabung Timur, 2013, data diolah.

23. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan (BPMPD/K)

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 39 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan melaksanakan 12 program dan 33 kegiatan. Secara terperinci jumlah



anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan tertera dalam tabel 4.51 dibawah ini.

Tabel 4.51
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa/Kelurahan
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	411.348.500,00	389.233.392,00	94,62
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.422.615.000,00	1.377.725.979,00	96,84
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.100.000,00	10.100.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	32.000.000,00	25.749.000,00	80,47
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	8.385.000,00	8.379.000,00	99,93
Program penyedia jasa administrasi keuangan	21.910.000,00	21.785.000,00	99,43
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan	1.049.085.000,00	1.027.814.700,00	97,97
Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	544.817.500,00	492.419.900,00	90,38
Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	625.260.000,00	572.720.458,00	91,60
Program Pengembangan sarana/prasarana perumahan dan lingkungan desa/kelurahan	111.300.000,00	110.749.400,00	99,51
Program Penguatan Otonomi Desa	490.990.000,00	473.486.200,00	96,43
Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna	202.610.000,00	202.550.500,00	99,97
JUMLAH	4.930.421.000,00	4.712.713.529,00	95,58

a. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Kegiatan dari program ini diantaranya pemberdayaan lembaga dan organisasi masyarakat pedesaan; pembinaan penguatan kapasitas monitoring dan evaluasi PNPM; serta pembinaan, monitoring dan evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD).

b. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

Adapun beberapa kegiatan yang telah dijalankan dari program peningkatan partisipasi masyarakat diantaranya pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa; pengembangan usaha ekonomi desa/kelurahan; pengelolaan dan pembangunan pasar desa; pendataan aset desa; serta peningkatan pembinaan posyandu.



c. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bagi aparatur pemerintahan desa dalam pembangunan kawasan perdesaan, dengan kegiatan berupa pembinaan aparatur pemerintah desa/kelurahan; dan penyusunan profil desa.

d. Program Pengembangan Sarana/Prasarana Perumahan dan Lingkungan Desa/ Kelurahan

Program ini bertujuan untuk menciptakan rumah dan lingkungan sehat di desa/kelurahan, adapun program ini akan didukung melalui kegiatan berupa penataan lingkungan sehat.

e. Program Penguatan Otonomi Desa

Dengan kegiatan berupa penetapan dan penegasan tapal batas desa/kelurahan; dan fasilitasi pelayanan pengembangan adat istiadat dan nilai budaya masyarakat.

f. Program Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Teknologi Tepat Guna

Program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mendorong aplikasi teknologi tepat guna, dengan kegiatan berupa fasilitasi kelembagaan dan pengelolaan teknologi tepat guna.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa/Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa permasalahan internal antara lain terbatasnya personil seperti petugas teknis di bidang-bidang.

Upaya yang dilakukan antara lain dengan melibatkan personil di sekretariat pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan teknis dengan bimbingan dan pengawasan dari Kepala Badan maupun Kepala Bidang bersangkutan.

Disamping menjalankan tugas-tugas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tiap desa. BPMPD/K juga berperan dalam menyusun formulasi kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD). ADD merupakan output dari kebijakan Nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat Desa dengan instrumennya berupa pengalokasikan dana transfer berupa dana perimbangan untuk pembangunan desa yang besarnya minimal dari 10% dari Dana perimbangan yang diterima masing-masing daerah.

Untuk lebih memacu pemberdayaan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa, Pemda meningkatkan Alokasi Dana Desa melalui APBD 2013, yang jumlahnya



mencapai Rp. 27,24 milyar. Dengan demikian pada Tahun anggaran 2013 direncanakan setiap desa akan memperoleh Rp. 265 juta sampai dengan Rp. 624 juta. Anggaran ADD ini diperuntukan antara lain untuk kegiatan konstruksi yang dilaksanakan secara swakelola dan operasional kantor desa.

24. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data

Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Perpustakaan, Dokumentasi dan Pengolahan Data mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Arsip, Pengolahan Data dan Perpustakaan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data melaksanakan 8 program dan 24 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan Belanja Kantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data tertera dalam tabel 4.52 dibawah ini.

Tabel 4.52
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah	99.699.350,00	99.015.350,00	99,31
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	468.593.850,00	461.950.387,00	98,58
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	735.430.000,00	710.743.000,00	96,64
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	8.850.000,00	7.100.000,00	80,23
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	18.000.000,00	9.500.000,00	52,78
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	4.300.000,00	4.300.000,00	100,00



Program Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	780.779.250,00	778.924.250,00	99,76
program peningkatan kualitas pelayanan informasi	114.100.000,00	113.927.500,00	99,85
JUMLAH	2.229.752.450,00	2.185.460.487,00	98,01

a. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan

Tujuan program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat dengan memperluas pengetahuan melalui buku. Untuk mencapai sasaran program tersebut dibuatlah kegiatan berupa pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar; pembinaan perpustakaan desa; dan peningkatan mutu pelayanan informasi perpustakaan.

b. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi

Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan diperlukan penilaian sebagai dasar dari perbaikan pelayanan, pada program ini disusun Indeks Kepuasan Masyarakat.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Perpustakaan, Dokumentasi Arsip dan Pengolahan Data dalam pelaksanaan kegiatan adalah :

- 1) Terbatasnya jumlah tenaga / SDM, sarana dan prasarana yang ada dikantor Perpustakaan, Dokumentasi, Arsip dan Pengolahan Data.
- 2) Masih rendahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk membaca.
- 3) Kondisi geografis yang sulit terjangkau sehingga masyarakat yang jauh untuk meminjam buku menghabiskan waktu yang lama.

Adapun solusi yang diambil untuk mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Melaksanakan Magang dan BinteK serta pelatihan guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia Pengolahan Buku Perpustakaan, dan Arsip Daerah.
- 2) Mempersiapkan Software dan Perangkat Teknologi seperti Komputer agar pelayanan dapat cepat dan tepat.
- 3) Melaksanakan Sosialisasi dan Standarisasi pelayanan melalui media cetak, elektronik dan pertemuan langsung ditingkat Kecamatan dan Kabupaten.
- 4) Mengusulkan pada anggaran tahun berikutnya untuk penambahan Pegawai / Pejabat Struktural untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan lapangan.



Perpustakaan Kabupaten Tanjung Jabung sampai dengan tahun 2013 telah memiliki koleksi buku sebanyak 25.583 eksemplar dengan 7.189 judul buku. Sedangkan jumlah buku yang ada di desa sebanyak 41.738 eksemplar dengan 63.238 judul buku.

Tabel 4.53
Perkembangan Koleksi Buku
Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data, 2011-2013

NO	URAIAN	2011	2012	2013
1	Jumlah buku di kabupaten	14.727 eksemplar	18.773 eksemplar	25.583 eksemplar
2	Judul buku di kabupaten	4.315 judul buku	5.827 judul buku	7.189 judul buku
3	Jumlah buku di desa	35.790 eksemplar	41.738 eksemplar	41.738 eksemplar
4	Judul buku di desa	54.290 judul	63.238 judul	63.238 judul
5	Jumlah Perpustakaan di Desa/Kelurahan	93 unit	93 unit	93 unit

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Pengolahan Data Kab. Tanjung Jabung Timur

B. URUSAN PILIHAN

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan

Dinas Pertanian Tanaman Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 12 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Pertanian Tanaman Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Pertanian Tanaman Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Pertanian Tanaman Pangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada Tahun 2013, Dinas Pertanian Tanaman Pangan melaksanakan 12 program dan 34 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Pertanian Tanaman Pangan tertera dalam tabel 4.54 dibawah ini.



Tabel 4.54
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Pertanian TPH
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	643.101.400,00	632.267.713,00	98,32
Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	579.630.000,00	573.124.200,00	98,88
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	20.300.000,00	20.207.000,00	99,54
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	47.515.000,00	47.126.000,00	99,18
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	93.375.000,00	92.224.500,00	98,77
Program perlindungan dan konservasi sumber daya hutan dan lahan	149.000.000,00	148.545.000,00	99,69
program peningkatan kesejahteraan petani	244.160.375,00	241.103.000,00	98,75
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/perkebunan)	6.169.929.025,00	6.138.590.587,00	99,49
program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	142.324.000,00	134.668.620,00	94,62
program peningkatan penerapan teknologi pertanian	1.272.589.800,00	1.269.105.300,00	99,73
program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	2.523.854.000,00	2.493.394.200,00	98,79
program pengembangan sumber daya saran dan prasarana pertanian	310.636.000,00	309.801.200,00	99,73
JUMLAH	12.196.414.600,00	12.100.157.320,00	99,21

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program peningkatan kesejahteraan petani ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Untuk mencapai sasaran program tersebut, dibuatlah beberapa kegiatan antara lain : pelatihan petani dan pelaku agribisnis; serta penilaian lomba-lomba pertanian.

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian pangan, meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, meningkatkan mutu hasil panen, menurunkan angka kehilangan hasil, meningkatkan produktivitas lahan kering, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan hortikultura, pengembangan system tunda jual di kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan kegiatannya diantara pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; penanganan pasca panen dan



pengolahan hasil pertanian; pengembangan intensifikasi tanaman padi, palawija; pengembangan perbenihan/perbibitan; pengelolaan lahan dan air; serta pengembangan intensifikasi tanaman palawija.

c. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan

Adapun kegiatan dari program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan berupa promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggulan daerah.

d. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Kegiatan dari program ini antara lain berupa peningkatan sarana dan prasarana teknologi pertanian.

e. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian dan perkebunan memiliki kegiatan berupa penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan; dan pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan; penyediaan prasarana dan sarana pengolahan lahan; serta perluasan areal pertanian.

f. Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarna Pertanian

Program ini didukung dengan kegiatan pembinaan statistik, monitoring dan evaluasi pertanian.

Peningkatan atau pencapaian yang diraih Dinas Pertanian Tanaman Pangan cukup signifikan, namun masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya ;

- 1) Tidak tersedia benih (tidak tepat waktu).
- 2) Benih belum memenuhi standar kualitas benih.
- 3) Alih fungsi lahan yang tinggi.
- 4) Produksi dan produktivitas menurun.
- 5) Kesuburan tanah rendah.
- 6) Tata Air Mikro belum baik atau sempurna.
- 7) Varietas lokal.
- 8) Tanpa olah tanah dan tanpa pemupukan.
- 9) Gangguan OPT tinggi
- 10) Alsintan terbatas (handtraktor, powerthresher).
- 11) Akses inovasi teknologi rendah
- 12) Kelembagaan petani belum berkembang.
- 13) Motivasi petani rendah.
- 14) Tenaga kerja terbatas.



- 15) Infrastruktur belum baik.
- 16) Akses permodalan yang sulit.
- 17) Harga produk yang rendah.

Beberapa langkah tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- 1) Bantuan benih tepat waktu musim tanam.
- 2) Tersedianya benih unggul yang sesuai dengan kondisi lahan.
- 3) Adanya ranperda lahan pangan pertanian berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan kesuburan tanah dengan pemupukan berimbang.
- 5) Pengelolaan tata air mikro.
- 6) Menggunakan varietas unggul.
- 7) Pengolahan tanah yang optimal.
- 8) Tersedianya obat-obatan pertanian untuk mengatasi OPT
- 9) Tersedianya Alsisntan
- 10) Melaksanakan pelatihan mengenai teknologi pertanian (budidaya).
- 11) Melaksanakan Gerakan Tanam Serentak Dua Kali Setahun (Gertak Tanpa Dusta) dan kegiatan Satu Kali Tanam Dua Kali Panen (Senam Dupa).

Kabupaten Tanjung Jabung Timur mempunyai potensi yang besar pada sektor pertanian. Untuk mendukung sektor ini, orientasi pengembangan sektor pertanian adalah : i) Mengembangkan komoditi berbasis lokal, ii) Mengembangkan sektor produksi, iii) Pengembangan kawasan sektor pertumbuhan, dan iv) Melanjutkan kebijakan Pemerintah dalam bidang Pertanian khususnya perlindungan lahan tanaman pangan berkelanjutan.

Potensi komoditi hortikultura terus berkembang, baik oleh swadaya, pemerintah daerah maupun intervensi pengembangan pemerintah. Dalam hal ini dikenal beberapa jenis komoditi diantaranya yaitu jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar. Komoditas jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar merupakan komoditi yang dominan pada tahun 2013. Dikaitkan dengan kondisi lahan yang sebagian besar adalah gambut, maka jenis komoditi ini dapat dikembangkan karena jenis tanaman ini memang mempunyai perakaran serabut yang dapat tumbuh lebih baik dibanding dengan jenis tanaman berakar tunggang.

Tabel 4.55
Perkembangan Produksi Padi dan Palawija Tahun 2013(Ton)

NO	KECAMATAN	PADI	JAGUNG	KEDELAI	KACANG TANAH	KACANG HIJAU	UBI KAYU	UBI JALAR
----	-----------	------	--------	---------	-----------------	-----------------	-------------	--------------



		Produksi (ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)	Produksi (Ton)
1	Mendahara	0	46,82	0	0	0	286,48	51,16
2	Mendahara Ulu	1.250	673,63	29,76	1,22	0	262,96	22,25
3	Geragai	2.413	168,75	0	9,79	5,95	335,23	81,58
4	Dendang	9.764	321,36	45,22	18,42	3,71	1.425,53	378,83
5	Ma. Sabak Timur	19.990	129,48	5,04	20,66	1,21	277,45	133,74
6	Ma Sabak Barat	1.394	84,48	0	0	0	528,48	22,29
7	Kuala Jambi	278	19,12	1,22	1,29	6,07	53,06	29,65
8	Rantau Rasau	16.277	28,49	89,63	19,70	4,90	377,43	111,41
9	Berbak	26.654	306,14	251,28	12,33	47,46	208,26	37,27
10	Nipah Panjang	25.014	56,61	9,03	14,63	0	676,30	88,99
11	Sadu	6.935	60,61	2,52	0	0	79,88	14,63
	JUMLAH	104.429	1.878,85	411,51	98,60	69,24	4.483,83	970,04

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Peningkatan produksi padi tahun 2013 merupakan keberhasilan dari program gerakan serentak tanam padi dua kali setahun (GERTAK TANPA DUSTA) yang ditargetkan seluas 1.845 hektar dan teralisasi seluas 1.792 hektar (luas panen) dengan produktifitas sebesar 3,85 ton/Ha pada periode ini.

Tabel 4.56
Target dan Realisasi Program Gertak Tanpa Dusta Tahun 2013

Uraian	2013		
	Target	Realisasi	Produktifitas
Gertak Tanpa Dusta	1.845 Ha	1.792 Ha	3,85 ton/Ha

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Produktivitas tanaman padi pada tahun 2013 tertinggi di kecamatan Rantau Rasau sebesar 42,62 kw/ha, komoditi jagung di kecamatan Mendahara Ulu yaitu sebesar 32,29 kw/ha, komoditi kedelai di kecamatan Berbak sebesar 13,96 kw/ha, komoditi kacang tanah di kecamatan Kuala Jambi sebesar 12,91 kw/ha, komoditi kacang hijau di kecamatan Dendang dan Rantau Rasau sebesar 12,35 kw/ha, komoditi ubi kayu di kecamatan Rantau Rasau sebesar 139,79 kw/ha, komoditi ubi jalar di kecamatan Berbak sebesar 74,53 kw/ha.

Tabel 4.57
Luas Lahan dan Produktifitas Komoditi Pertanian Tahun 2013



NO	KECAMATAN	PADI		JAGUNG		KEDELAI		KACANG TANAH		KACANG HIJAU		UBI KAYU		UBI JALAR	
		Lahan (Ha)	Produk tiftas (Kw)	Lahan (Ha)	Produk tiftas (Kw)	Lahan (Ha)	Produk tiftas (Kw)	Lahan (Ha)	Produk tiftas (Kw)	Lahan (Ha)	Produk tiftas (Kw)	Lahan (Ha)	Produk tiftas (Kw)	Lahan (Ha)	Produk tiftas (Kw)
1	Mendahara	0	0	15	31,21	0	0	0	0	0	0	22	130,22	7	73,08
2	Mendahara Ulu	302	41,40	205	32,86	24	12,40	1	12,20	0	0	20	131,48	3	74,18
3	Geragai	600	40,21	54	31,25	0	0	8	12,24	5	11,89	25	134,09	11	74,16
4	Dendang	2.370	41,20	103	31,20	35	12,92	15	12,28	3	12,35	104	137,07	51	74,28
5	Muara Sabak Timur	5.057	39,53	41	31,58	4	12,61	17	12,15	1	12,12	21	132,12	18	74,30
6	Muara Sabak Barat	562	24,80	27	31,29	0	0	0	0	0	0	40	132,12	3	74,30
7	Kuala Jambi	1	27,76	6	31,86	1	12,19	1	12,91	5	12,13	4	132,66	4	74,12
8	Rantau Rasau	3.819	42,62	9	31,65	66	13,58	16	12,31	4	12,35	27	139,79	15	74,27
9	Berbak	7.506	35,51	96	31,89	180	13,96	10	12,33	39	12,17	15	138,84	5	74,53
10	Nipah Panjang	6.224	40,19	18	31,45	7	12,90	12	12,19	0	0	50	135,26	12	74,16
11	Sadu	2.351	29,50	19	31,90	2	12,60	0	0	0	0	6	133,13	2	73,16
	JUMLAH	28.792	36,27	593	31,85	319	12,90	80	12,33	57	12,15	334	134,25	131	74,05

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Meskipun sektor pertanian telah mencapai hasil yang menggembirakan tetapi hasil tersebut masih berkemungkinan untuk ditingkatkan baik melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi. Peningkatan melalui intensifikasi seperti penggunaan alat-alat pertanian yang baik dan modern.

Tabel 4.58
Perkembangan, Kondisi dan Kebutuhan Alat-alat Pertanian per Tahun 2013

No	Nama alat	Total Kebutuhan Alat	2013		Total Alat yang tersedia sampai dengan Tahun 2013		Kebutuhan Tambahan
			Target	Realisasi	Baik	Rusak	
1	Handtraktor	814 unit	26 unit	26 unit	328 unit	0 unit	486 unit
2	Power Threaser	651 unit	17 unit	17 unit	252 unit	0 unit	399 unit
3	Dryer	20 unit	0 unit	0 unit	4 unit	0 unit	16 unit

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kab. Tanjung Jabung Timur

2. Dinas Peternakan

Dinas Peternakan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Peternakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Peternakan;



2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Peternakan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Peternakan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Peternakan melaksanakan 11 program dan 29 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Peternakan tertera dalam tabel 4.59 dibawah ini.

Tabel 4.59
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Dinas Peternakan
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.122.080.100,00	1.088.891.041,00	97,04
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	491.800.000,00	409.338.400,00	83,23
Program Peningkatan Disiplin Aparatur:	23.880.000,00	22.830.000,00	95,60
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	17.036.800,00	16.500.000,00	96,85
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.400.000,00	29.400.000,00	100,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	178.264.000,00	164.944.000,00	92,53
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)	342.876.000,00	338.107.000,00	98,61
Program Pencegahan dan penanggulangan Penyakit Ternak	638.192.000,00	361.547.700,00	56,65
Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1.116.876.000,00	1.101.377.001,00	98,61
Program Peningkatan Pemasaran hasil produksi peternakan	85.650.000,00	85.485.900,00	99,81
Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian	627.940.000,00	625.424.559,00	99,60
JUMLAH	4.673.994.900,00	4.243.845.601,00	90,80

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program ini bertujuan untuk mendorong berkembangnya usaha peternakan dengan wawasan bisnis yang dapat mendukung pertumbuhan pendapatan masyarakat. dengan kegiatannya antara lain pelatihan petani dan pelaku agribisnis; serta penilaian lomba-lomba peternakan.

b. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)



Program ini bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan dan keberlanjutan ketahanan pangan sampai ke tingkat rumah tangga sebagai bagian dari ketahanan nasional. Adapun kegiatan pokoknya meliputi peningkatan mutu dan keamanan pangan; dan pemanfaatan perkarangan untuk pengembangan ternak.

c. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

Program ini bertujuan untuk mengetahui masalah peternakan, memelihara kesehatan dan mencegah penyakit menular ternak, dengan kegiatannya berupa pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak.

d. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan populasi dan menjaga kesehatan ternak, mendistribusikan bibit ternak kepada masyarakat serta meningkatkan pengelolaan bibit ternak yang didistribusikan kepada masyarakat, dengan kegiatannya antara lain pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak; dan pengembangan agribisnis peternakan.

e. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan

Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan bertujuan untuk membantu/memfasilitasi kelompok peternak dalam meningkatkan usahanya dengan kegiatannya berupa promosi atas hasil produksi peternakan unggulan daerah.

f. Program Pengembangan Sumber Daya Sarana dan Prasarana Pertanian

Program ini bertujuan untuk menjaga kesehatan hewan ternak yang ada di masyarakat, dengan kegiatannya antara lain pembinaan sumber daya sarana, prasarana keswan dan kesmavet; dan pembinaan statistik, monitoring dan evaluasi peternakan.

Peningkatan atau pencapaian yang diraih Dinas Peternakan cukup signifikan, namun masih terkendala oleh beberapa faktor diantaranya :

- 1). Masih rendah dan terbatasnya kemampuan sumberdaya manusia peternak.
- 2). Masih rendahnya kualitas bibit ternak.
- 3). Masih rendahnya mutu produk hasil peternakan.
- 4). Belum memadainya sarana dan prasarana pasar ternak.
- 5). Keterbatasan modal peternak untuk mengembangkan usaha peternakan.
- 6). Masih tingginya tingkat penularan penyakit hewan menular.

Sedangkan beberapa tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah :



- 1). Meningkatkan kualitas dan sumber daya aparatur dan sumberdaya peternak.
- 2). Mengoptimalkan kegiatan inseminasi buatan (IB).
- 3). Manfaatkan dan mengoptimalkan teknologi tepat guna.
- 4). Meningkatkan sarana dan prasarana pasar ternak.
- 5). Memfasilitasi kemudahan akses modal usaha bagi peternak dan mendorong peran swasta dalam pembangunan peternakan.
- 6). Meningkatkan pelayanan kesehatan hewan.

Dari kinerja sektor Peternakan selama 3 tahun terakhir ini menunjukkan pengembangan populasi ternak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur hal ini seperti terlihat pada tabel berikut :

Tabel 4.60
Perkembangan Ternak Menurut Jenis, 2011-2013

Tahun	Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Ayam Buras	Itik
2011	13.327	178	32.378	115	621.988	30.860
2012	14.703	187	38.742	116	996.971	36.890
2013	15.377	142	34.743	143	1.707.709	44.859
Pertumbuhan 2012-2013 (%)	4,58	(24,06)	(10,32)	23,28	71,29	21,60

Sumber : Dinas Peternakan kab. Tanjung Jabung Timur

3. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 22 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.



Pada Tahun 2013, Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan melaksanakan 9 program dan 42 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan tertera dalam tabel 4.61 dibawah ini.

Tabel 4.61
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Badan Penyuluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.726.673.350,00	1.688.887.550,00	97,81
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.924.189.400,00	1.894.420.750,00	98,45
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00
Program Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	20.000.000,00	5.000.000,00	25,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	309.947.000,00	306.858.920,00	99,00
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	2.426.039.900,00	2.282.599.468,00	94,09
proram peningkatan penerapan teknologi pertanian	120.580.000,00	115.643.000,00	95,91
program pningkatan produksi pertanian/perkebunan	110.560.000,00	104.185.150,00	94,23
Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan	1.010.954.900,00	927.389.759,00	91,73
JUMLAH	7.703.544.550,00	7.379.584.597,00	95,79

a. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

Program peningkatan kesejahteraan petani bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani melalui pemberdayaan dan peningkatan akses petani terhadap sumberdaya usaha pertanian. dengan kegiatannya berupa penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis; peningkatan kemampuan lembaga petani; operasional UPTB BP3K di 11 kecamatan; pemberdayaan kelembagaan penyuluhan; serta pekan daerah dan jambore nasional.

b. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian

Program ini sebagai upaya peningkatan hasil pertanian secara intensifikasi, adapun kegiatan yang mendukung program ini berupa pelatihan dan bimbingan pengoperasian teknologi pertanian/perkebunan tepat guna.

c. Program Peningkatan produksi Pertanian/Perkebunan



Program ini dilaksanakan dengan kegiatan penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan.

d. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan PKS (Pengetahuan, Ketrampilan dan Sikap) baik bagi penyuluh maupun petani dengan kegiatannya antara lain peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian/perkebunan; penyuluhan dan pendampingan bagi pertanian/perkebunan; serta pemberdayaan komisi penyuluh kabupaten.

Permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan saat ini :

- 1) Keterbatasan sumberdaya manusia penyuluh baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya.
- 2) Sarana dan prasarana serta kelengkapan yang belum memadai.
- 3) Administrasi di tingkat BP3K kecamatan yang belum sepenuhnya tertib.
- 4) Masih kurangnya ketersediaan anggaran dan dibandingkan luasan tupoksi yang diemban BP4K.

Beberapa langkah tindak lanjut yang diupayakan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah:

- 1) Pengusulan penambahan pegawai serta mengikutsertakan aparatur BP4K dan penyuluh dalam berbagai pendidikan maupun pelatihan.
- 2) Melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang keberhasilan program.
- 3) Mengoptimalkan kinerja pegawai dengan menerapkan disiplin dan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.
- 4) Penertiban administrasi di BP3K.
- 5) Upaya penambahan alokasi anggaran.
- 6) Membentuk dan memperdayakan kelembagaan penyuluh yang telah ada dan membentuk kelembagaan petani.

Sampai dengan tahun 2013, Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki 108 orang penyuluh yang terdiri dari penyuluh PNS sebanyak 52 orang atau 52 %, penyuluh swadaya sebanyak 45 orang atau 45 % dan sisanya sebanyak 3 orang merupakan tenaga bantuan pemerintah pusat.

Tabel 4.62



Jumlah Penyuluh dan Status Penyuluh per Kecamatan Tahun 2013

NO	KECAMATAN	JUMLAH PENYULUH	STATUS PENYULUH		
			PNS	SWADAYA	THL- TBPP
1	Mendahara	9	3	5	1
2	Mendahara Ulu	8	5	3	0
3	Geragai	7	5	2	0
4	Dendang	9	4	5	0
5	Muara Sabak Timur	13	9	4	0
6	Muara Sabak Barat	7	4	3	0
7	Kuala Jambi	8	2	6	0
8	Rantau Rasau	10	5	3	2
9	Berbak	8	2	6	0
10	Nipah Panjang	11	6	5	0
11	Sadu	10	7	3	0
	Koordinator Penyuluh	0	0	0	0
	JUMLAH	100	52	45	3

Sumber : BP4K kab. Tanjung Jabung Timur

Selain penyuluh, perkembangan bidang penyuluhan tahun 2010-2013 juga dapat dilihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

Tabel 4.63
Perkembangan Bidang Penyuluhan Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	2011	2012	2013
1	Pos Penyuluh	6 unit	13 unit	21 unit
2	Poktan	1.119 kelompok	1.159 kelompok	1.195 kelompok
3	Gapoktan	93 kelompok	93 kelompok	93 kelompok

Sumber : BP4K kab. Tanjung Jabung Timur

4. Kantor Ketahanan Pangan

Kantor Ketahanan Pangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 26 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kantor Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis bidang Ketahanan Pangan;
2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah bidang Ketahanan Pangan.



3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Kantor Ketahanan Pangan melaksanakan 6 program dan 29 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Kantor Ketahanan Pangan tertera dalam tabel 4.64 dibawah ini.

Tabel 4.64
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran Kantor Ketahanan Pangan
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	939.048.300,00	859.095.615,00	91,49
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	481.961.500,00	457.147.640,00	94,85
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	10.300.000,00	9.950.000,00	96,60
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	35.000.000,00	28.550.000,00	81,57
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	9.900.000,00	4.078.500,00	41,20
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	2.061.697.500,00	1.906.237.300,00	92,46
JUMLAH	3.537.907.300,00	3.265.059.055,00	92,29

Program yang dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan adalah **program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan)**, program ini bertujuan untuk menjamin ketahanan pangan, meningkatkan kemandirian pangan, meningkatkan produksi, produktivitas dan mutu produk pertanian, meningkatkan mutu hasil panen, menurunkan angka kehilangan hasil, meningkatkan produktivitas lahan kering, memonitoring dan mengevaluasi kegiatan pembangunan hortikultura, pengembangan system tunda jual di kabupaten Tanjung Jabung Timur. Adapun kegiatan pokok diantaranya penanganan daerah rawan pangan; pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan; pengembangan cadangan pangan daerah; pengembangan desa mandiri pangan; pengembangan lumbung pangan desa; peningkatan mutu dan keamanan pangan; pameran ketahanan pangan tingkat nasional provinsi; koordinasi perumusan program ketahanan pangan; penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat; serta penilaian lomba-lomba ketahanan pangan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Kantor Ketahanan Pangan dalam menjalankan program dan kegiatan tahun 2013 antara lain:

- 1) Sumber daya manusia kurang memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitas



- 2) Sarana dan Prasarana serta kelengkapan organisasi yang belum memadai.
- 3) Sistem kerja yang belum sepenuhnya berjalan optimal.
- 4) Administrasi yang belum sepenuhnya tertib dan taat aturan.
- 5) Masih kurangnya ketersediaan dana langsung untuk pemberdayaan masyarakat berupa modal usaha kelompok di desa rawan pangan.
- 6) Kondisi masyarakat yang heterogen baik suku, agama, ras dan antara golongan maupun tingkatan pendidikan.
- 7) Percepatan diversifikasi berjalan lambat dikarenakan pemahaman masyarakat tentang pentingnya konsumsi pangan sesuai dengan pola harapan masih rendah, demikian juga dengan konsumsi pangan beragam bergizi dan berimbang belum terlaksana dengan baik.
- 8) Masih lemahnya koordinasi lembaga yang terkait dengan ketahanan pangan dan stakeholder ketahanan pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan.
- 9) System transportasi yang memadai dan belum sepenuhnya terjangkau.
- 10) Belum memanfaatkan secara optimal pangan lokal yang ada bagi usaha promosi komoditas unggulan daerah.
- 11) Masih kurangnya pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan ketahanan pangan.

Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut, diperlukan solusi sebagai berikut :

- 1) Menambah/mengusulkan penambahan pegawai serta mengikutsertakan aparatur Kantor Ketahanan Pangan dalam pendidikan dan pelatihan.
- 2) Meningkatkan jumlah dukungan kegiatan untuk Peningkatan Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan mengedepankan aspek ketersediaan, distribusi dan konsumsi serta keamanan pangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3) Mendorong dan memfasilitasi kecukupan, ketersediaan pangan tingkat kabupaten/kota.
- 4) Meningkatkan antisipasi dini terjadinya kerawanan pangan melalui pelatihan-pelatihan, mekanisme aliran data rawan pangan dan memberikan bantuan pangan.
- 5) Melaksanakan secara intensif koordinasi lintas pelaku dan sektoral yang terkait dengan ketahanan pangan.
- 6) Mengoptimalkan dukungan anggaran maupun sarana untuk terwujudnya kesejahteraan Masyarakat di Daerah Rawan Pangan.



Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai dengan 2013 memiliki 14 Desa Mandiri Pangan yang tersebar di 6 kecamatan. Pembinaan Desa Mandiri Pangan ini terdiri dari 4 tahap dengan jangka waktu 4 tahun. Tahun pertama merupakan tahap persiapan, tahun kedua merupakan tahap penumbuhan, tahun ketiga merupakan tahap pengembangan, dan tahun keempat merupakan tahap desa mandiri pangan. Jika pada tahun keempat persentase KK miskin dibawah 30 % maka desa tersebut telah layak atau berhasil menjadi Desa Mandiri Pangan Kemandirian. Saat ini terdapat 8 desa yang telah berstatus Desa Mandiri Pangan Kemandirian.

Tabel 4.65
Perkembangan Desa Mandiri Pangan sampai dengan Tahun 2013

NO	KECAMATAN	DESA	ΣKK	Σ KEL. MISKIN PADA AWAL USULAN	Σ KEL. MISKIN SETELAH PENGEMBANGAN			TAHUN USULAN	% KK MISKIN TAHUN 2012	TAHAPAN
					2011	2012	2013			
1	Mendahara	-	-	-	-	-	-	-		
2	Mendahara Ulu	-	-	-	-	-	-	-		
3	Geragai	Kota Baru	380	216	96	36	33	2006	9	Desa Mapan Kemandirian
		Rantau Karya	234	192	23	23	23	2006	10	Desa Mapan Kemandirian
		Suka Maju	609	198	155	98	32	2009	5	Desa Mapan Kemandirian
4	Dendang	Catur Rahayu	457	166	166	151	151	2007	33	Desa Mapan Kemandirian
		Jati Mulyo	185	65	65	40	91	2009	49	Desa Mapan Kemandirian
		Sido Mukti	905	281	281	155	99	2010	11	Pengembangan
5	Muara Sabak Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	
6	Muara Sabak Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	
7	Kuala Jambi	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Rantau Rasau	Harapan Makmur	659	332	242	112	105	2007	16	Desa Mapan Kemandirian
		Rantau Jaya	853	328	213	125	118	2009	14	Desa Mapan Kemandirian
		Bandar Jaya	2.053	354	354	255	239	2011	12	Penumbuhan
9	Berbak	Rantau Rasau	806	246	246	212	212	2012	26	Persiapan
10	Nipah Panjang	Nipah Panjang II	2.057	637	360	355	272	2008	13	Desa Mapan Kemandirian
		Simpang Datuk	273	92	92	88	58	2010	21	Pengembangan
		Pemusiran	326	112	112	109	59	2011	18	Penumbuhan
11	Sadu	Sungai Jambat	780	257	257	191	191	2012	24	Persiapan
J U M L A H			10.577	3.476	2.831	1.950	1.683		18	

Sumber : Kantor Ketahanan Pangan kab. Tanjung Jabung Timur

5. Dinas Kehutanan dan Perkebunan



Dinas Kehutanan dan Perkebunan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kehutanan dan Perkebunan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kehutanan dan Perkebunan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kehutanan dan Perkebunan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Kehutanan dan Perkebunan melaksanakan 11 program dan 40 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kehutanan dan Perkebunan tertera dalam tabel 4.66 dibawah ini.

Tabel 4.66
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)	1.893.129.600,00	1.875.091.775,00	99,05
Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	381.120.000,00	315.695.000,00	82,83
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	595.265.400,00	569.551.861,00	95,68
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	684.585.000,00	524.983.400,00	76,69
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	29.510.000,00	29.510.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	75.000.000,00	15.125.000,00	20,17
program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	5.000.000,00	3.525.000,00	70,50
Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan	1.424.925.000,00	1.414.515.000,00	99,27
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan	1.165.607.000,00	1.087.150.900,00	93,27
program pembinaan dan penertiban industri hasil hutan	90.500.000,00	84.254.000,00	93,10
Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan	675.225.519,00	386.946.500,00	57,31
JUMLAH	7.019.867.519,00	6.306.348.436,00	89,84



a. Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan)

Program peningkatan ketahanan pangan (pertanian/perkebunan) mempunyai beberapa kegiatan diantaranya pengembangan kawasan dan peningkatan usaha masyarakat dibidang perkebunan; dan pengelolaan lahan dan air

b. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Program ini ditunjang dengan kegiatan berupa pengembangan bibit unggul pertanian/perkebunan; dan pengembangan/peremajaan kebun kelapa rakyat.

c. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program ini bertujuan untuk mengkoordinasi penyelenggaraan reboisasi dan penghijauan hutan dengan terlaksananya koordinasi dengan Dinas/Instansi terkait, dengan kegiatannya antara lain pengadaan bibit tanaman kegiatan rahabilitasi hutan dan lahan; pemeliharaan penanaman rehabilitasi hutan dan lahan tahun 2012 (T+1); penanaman rehabilitasi hutan dan lahan; penanaman tanaman sabuk hijau (green belt) pada daerah Sempadan Sungai.

d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Lahan

Kegiatan dari program ini diantaranya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan; pengamanan hutan dan peredaran hasil hutan; pengendalian hama tanaman perkebunan; pembuatan demplot tanaman mangrove; serta pengelolaan hutan berbasis masyarakat.

e. Program Pembinaan dan Penertiban Industri Hasil Hutan

Program ini bertujuan untuk pembinaan, penertiban dan pengawasan eksploitasi hasil hutan, adapun program ini ditunjang oleh kegiatan pembinaan dan pengawasan produksi serta tertib usaha kehutanan.

f. Program Perencanaan dan Pengembangan Hutan

Kegiatan dari program ini diantaranya pendampingan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan; pengelolaan data statistik dan monitoring; monitoring dan evaluasi kegiatan kehutanan dan perkebunan; identifikasi kawasan hutan; penilaian usaha perkebunan; serta penyusunan rencana pengelolaan rehabilitasi hutan dan lahan.

Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sampai Tahun 2013 dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi adalah antara lain sebagai berikut:



- 1) Tidak semua pemilik kebun memiliki izin usaha perkebunan dan memberi laporan produksi sehingga berdampak pada penilaian usaha perkebunan.
- 2) Belum adanya pabrik kelapa sawit di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 3) Petani masih banyak menggunakan bibit tidak unggul sehingga kualitas TBS rendah.
- 4) Ganggu kelapa dalam dari insterusi air laut.
- 5) Belum ada industri pengolahan kepala dalam secara terpadu dalam skala industri.
- 6) Lahan tidur masyarakat berupa lahan gambut masih sangat luas, diperlukan pemilihan komoditi khusus.
- 7) Batas fisik kawasan hutan lindung dengan lahan masyarakat.
- 8) Kebakaran hutan pada musim kemarau.
- 9) Komoditi tanaman hutan yang sesuai dengan kondisi hutan dan dapat meningkatkan income masyarakat.
- 10) Masih terdapat lahan dalam kawasan hutan yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
- 11) Sulitnya akses dan tingginya biaya untuk melakukan rehabilitasi hutan lindung gambut bekas terbakar.

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengurangi atau meminimalisir masalah adalah antara lain :

- 1) Inventarisasi perkebunan kepala sawit.
- 2) Sosialisasi Permentan No 98 Tahun 2013 dan mewajibkan pemilik perkebunan melaporkan perkembangan usaha perkebunannya.
- 3) Menarik investor pabrik pengelolaan sawit.
- 4) Pengadaan kecambah kepala sawit unggul dan pengawasan peredaran kecambah.
- 5) Menarik investor pabrik pengelolaan kelapa dalam.
- 6) Kajian komoditi tanaman untuk lahan gambut, seperti singkong gajah.
- 7) Inventarisasi batas fisik kawasan hutan dan mengusulkan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan untuk rekonstruksi batas.
- 8) Pelatihan petugas dan masyarakat dalam menangani kebakaran hutan dan mengadaan sarana prasarana pemadaman hutan.
- 9) Penanaman pohon jelutung (*drya sp*) di lahan masyarakat dan kawasan hutan.
- 10) Pengusulan pemanfaatan kawasan hutan di beberapa kecamatan melalui program pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
- 11) Pembuatan kanal/parit untuk akses sekaligus sebagai tata air di perkebunan kelapa dalam.



Luas areal lahan hutan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013 adalah tetap yaitu seluas 248.174 hektar. Adapun komposisi dari luas tersebut masing-masing adalah 3.829 hektar atau 1,54 % dari kawasan hutan merupakan Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau Pantai Timur, 138.244 hektar atau 55,70 % dari kawasan hutan merupakan kawasan Taman Nasional Berbak, 3.995 hektar atau 1,61 % merupakan kawasan pelestarian Tahura sekitar Tanjung, 23.750 hektar atau 9,57 % merupakan hutan lindung gambut, dan 78.356 hektar atau 31,57 % merupakan hutan produksi tetap.

Tabel 4.67
Luas Hutan Menurut Kawasan Tahun 2011-2013

NO	JENIS HUTAN/KAWASAN	2011 (Ha)	2012 (Ha)	2013 (Ha)	%
1	Kawasan Suaka Alam Hutan Bakau Pantai Timur	3.829	3.829	3.829	1,54
2	Taman Nasional Berbak	138.244	138.244	138.244	55,70
3	Kawasan Pelestarian Tahura sekitar Tanjung	3.995	3.995	3.995	1,61
4	Hutan Lindung Gambut	23.750	23.750	23.750	9,57
5	Hutan Produksi Tetap	78.356	78.356	78.356	31,57
	J U M L A H	248.174	248.174	248.174	100,00

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Tanjung Jabung Timur

Kondisi lahan di Tanjung Jabung Timur yang sangat spesifik dengan lahan gambutnya telah menciptakan kawasan hutan yang sebagian besar telah dilindungi melalui perangkat hukum. Aktivitas pembangunan kehutanan dilaksanakan dengan menyediakan bibit dan pembuatan drainase. Disamping itu dilaksanakan juga pembangunan kehutanan dengan pola perhutanan rakyat yang dimaksudkan agar masyarakat dapat secara aktif membantu pelestarian hutan. Dengan terlaksananya program di bidang kehutanan diharapkan agar masyarakat memperoleh keuntungan dari kegiatan pelestarian hutan. Sesuai dengan itu keberadaan TNB (Taman Nasional Berbak) dan Hutan Lindung Gambut serta Cagar Alam Mangrove merupakan tipe hutan yang harus dilestarikan sepanjang masa mengingat fungsi ekologisnya yang demikian dominan tidak saja untuk kehidupan di tingkat lokal, akan tetapi sampai ke tingkat global.

Dengan mempertimbangkan secara seksama kondisi hutan lindung di Tanjung Jabung Timur maka orientasi kegiatan tahun 2013 diperuntukkan guna pelestarian dengan cara melibatkan masyarakat seoptimal mungkin, termasuk juga pelibatan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Selain itu perlu upaya peningkatan



nilai tambah agroindustri yang berkaitan langsung maupun tidak langsung terhadap perekonomian wilayah ini.

Perkebunan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur terdapat beberapa komoditi, yaitu karet, sawit, kelapa dalam, pinang, lada, kakao, kelapa hibrida. Dari komoditi tersebut produksi kepala dalam merupakan unggulan pertama dan disusul dengan produksi sawit. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.68 berikut :

Tabel 4.68
Perkembangan Komoditi Perkebunan Tahun 2012-2013

Komoditi	2012			2013		
	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Petani (KK)	Luas (Ha)	Produksi (ton)	Petani (KK)
Karet	7.800	2.627	5.264	7.750	2.673	5.264
Kelapa Sawit	27.043	33.121	9.178	29.143	33.223	9.198
Kelapa Dalam	58.620	50.148	22.643	58.650	50.234	22.848
Kelapa Hibrida	69	49	45	69	49	45
Lada	119	7	773	69	7	794
Kakao	355	140	673	355	126	673
Pinang	8.844	5.719	8.341	8.845	5.777	8.390
Kopi Robusta	3.269	1.027	2.456	3.269	1.027	2.456
Kemiri	9	2	31	9	2	31

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Tanjung Jabung Timur

Dinas Kehutanan dan Perkebunan pada tahun 2013 telah merealisasikan bantuan bibit tanaman perkebunan sebanyak 6 komoditi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4.69
Realisasi Bantuan Bibit Tanaman Perkebunan Tahun 2012-2013

NO	KOMODITI	2012		2013	
		REALISASI		REALISASI	
		Σ Bibit (buah/batang)	Luas Lahan (Ha)	Σ Bibit (buah/batang)	Luas Lahan (Ha)
1	Karet	14.700	29	11.875	25
2	Lada	6.000	10	7.000	11,6
3	Pinang	4.450	11	-	-
4	Kakao	-	-	6.000	6,2
5	Kelapa Dalam	27.750	185	-	-
6	Kopi	-	-	9.000	12
JUMLAH		25.200	52.900	33.875	55

Sumber : Dinas Kehutanan dan Perkebunan kab. Tanjung Jabung Timur



6. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 18 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Energi dan Sumber Daya Mineral;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral melaksanakan 8 program dan 33 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral tertera dalam tabel 4.70 dibawah ini.

Tabel 4.70
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Energi Sumber Daya Mineral
Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	692.852.090,00	683.453.429,00	98,64
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	12.000.000,00	9.900.000,00	82,50
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	60.000.000,00	54.150.000,00	90,25
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	155.350.000,00	155.231.400,00	99,92
Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan	478.200.000,00	375.693.300,00	78,56
Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan	16.527.762.000,00	15.971.398.775,00	96,63
Program Pengembangan dan Rekayasa Sumber Daya Mineral	170.250.000,00	169.327.400,00	99,46
JUMLAH	18.104.414.090,00	17.427.154.304,00	96,26



a. Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan

Program ini bertujuan untuk mencapai optimalisasi pemanfaatan dan pengawasan sumber daya bidang pertambangan yang ditunjang dengan kegiatan diantaranya koordinasi dan pendataan tentang hasil produksi di bidang pertambangan; dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penambangan bahan galin C.

b. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Ketenagalistrikan

Program ini bertujuan untuk pengembangan/perluasan jaringan listrik pedesaan, koordinasi pengembangan ketenagalistrikan serta perencanaan jaringan listrik pedesaan, yang ditunjang dengan kegiatan diantaranya koordinasi pengembangan ketenagalistrikan; pengadaan alat-alat jaringan dan listrik; pembangunan pengembangan jaringan listrik kecamatan Mendahara, Muara Sabak Barat, Nipah Panjang, Kuala Jambi, Dendang, Berbak, Muara Sabak Timur, Sadu; perencanaan ketenagalistrikan; serta pemeliharaan dan pengawasan jaringan listrik.

c. Program Pengembangan dan Rekayasa Sumber Daya Mineral

Kegiatan dari program ini berupa inventarisasi sumber daya mineral; dan penentuan potensi air bawah tanah.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan tentunya ada permasalahan yang dihadapi, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Tanjung Jabung Timur menghadapi permasalahan dilapangan sebagai berikut :

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia
2. Belum terpenuhinya formasi berdasarkan disiplin ilmu
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia masih kurang.
4. Tegangan listrik masih rendah
5. Sulitnya melakukan pembebasan tanah dan tanaman tumbuh
6. Pelaku usah dibidang pertambangan belum sepenuhnya paham tentang perizinan di bidang pertambangan
7. Sulitnya mendapat data pertambangan migas.
8. Lokasi di pulau Harapan tidak memungkinkan untuk dibangun jaringan karena sulitnya pemeliharaan.
9. Jaringan listrik di kelurahan Sabak Ulu tidak jadi dibangun karena akses jalan belum dibangun oleh Dinas PU.

Adapun solusi yang telah dilakukan untuk minimalisir permasalahan tersebut diantaranya :



1. Wilayah kecamatan atau desa yang belum tersentuh SIS dalam 10 tahun kedepan yang dikarenakan kendala teknis akan dibantu PLTS melalui program dari Dinas ESDM Provinsi Jambi.
2. Dengan dibangunnya gardu induk di kabupaten Tanjung Jabung Timur akan meningkatkan daya sehingga terpenuhi kebutuhan listrik di daerah yang tegangan listriknya rendah.
3. Pendekatan dengan masyarakat yang terkena langsung pembangunan jaringan listrik secara kekeluargaan.
4. Koordinasi yang intens dengan Dinas ESDM Provinsi Jambi dan PT. PLN baik secara langsung maupun tidak langsung.
5. Melakukan updating data pertambangan migas.

Potensi Pertambangan di Tanjung Jabung Timur demikian dominan, ini dapat dilihat perannya sebagai kontributor utama dalam PDRB sampai pada Tahun 2012. Dalam kaitan ini dapat dilihat dua perusahaan asing yaitu PETRONAS dari Malaysia dan PETRO CHINA dari China yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi gas dan minyak bumi di wilayah ini. Kabupaten Tanjung Jabung Timur memiliki cadangan minyak bumi \pm 250 juta Barrel sedangkan gas alam cair potensinya 2 Milyard Feed Qubic Gas sebagai potensi sumber daya non hayati. Untuk periode Desember 2011 sampai dengan November 2013 lift minyak bumi Petrochina Jabung Ltd. mencapai 1.653.570 barrel atau rata-rata per hari \pm 4.593 barrel. Sedangkan lifting gas bumi Petrochina Jabung Ltd. tahun 2013 mencapai 26.370.100 MMBTU.

Sebagai upaya pencapaian rasio 75/100 electricity pada akhir tahun 2015 bersamaan dengan pencapaian pembangunan millenium (*Millenium Development Goal's*). Kabupaten Tanjung Jabung Timur melalui Dinas EDSM sampai dengan tahun 2013 telah berhasil mencapai *Rasio electricity* untuk kecamatan sebesar 100 %, untuk desa / kelurahan 75 %, sedangkan untuk rumah tangga 73 %.



Tabel 4.71

Capaian Bidang Sumber Daya Mineral dan Ketenagalistrikan
Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	CAPAIAN			KETERANGAN
		2011	2012	2013	
I	BIDANG SUMBER DAYA MINERAL				
1	Lifting minyak bumi	1.565.550 barrel	1.333.420 barrel	1.653.570 barrel	
2	Lifting Gas Bumi	22.914.590,04 MMBTU	29.043.620 MMBTU	26.370.100 MMBTU	
II	BIDANG KETENAGALISTRIKAN				
1	Ratio Electricity Kecamatan	81,82%	90,91%	100%	
2	Ratio Electricity Desa/Kelurahan	55%	61%	75%	
3	Ratio Electricity Rumah Tangga	52%	62%	73%	
4	PLTS		1 unit	-	PLTS terpusat (60 KK) di desa Rawasari Kec. Rantau Rasau

Sumber : Dinas ESDM kab. Tanjung Jabung Timur

7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga

Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 16 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kebudayaan, Parawisata, Pemuda dan Olahraga;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga melaksanakan 14 program dan 43 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan



realisasi penyerapan belanja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga tertera dalam tabel 4.72 dibawah ini.

Tabel 4.72
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Pariwisata, Seni Budaya, Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	102.500.000,00	97.264.000,00	94,89
Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1.685.844.000,00	1.649.849.000,00	97,86
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1.040.710.000,00	1.002.327.500,00	96,31
Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	194.746.700,00	80.731.200,00	41,45
Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	1.076.539.000,00	1.048.944.000,00	97,44
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana olahraga	2.522.525.000,00	1.094.492.000,00	43,39
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	645.939.500,00	600.381.975,00	92,95
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	503.528.300,00	456.950.250,00	90,75
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	14.950.000,00	0,00	0,00
program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	14.000.000,00	0,00	0,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	354.042.500,00	322.798.100,00	91,17
Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	758.800.000,00	738.986.300,00	97,39
Program pengembangan destinasi pariwisata	480.800.000,00	474.825.000,00	98,76
program pengembangan kemitraan	44.000.000,00	43.500.000,00	98,86
JUMLAH	9.438.925.000,00	7.611.049.325,00	80,63

a. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya

Program ini bertujuan meningkatkan apresiasi dan kecintaan masyarakat terhadap budaya dan produk dalam negeri yang bersifat kasat mata (*tangible*) maupun tidak kasat mata (*intangible*). dengan kegiatan antara lain pengelolaan dan pengembangan pelestarian peninggalan sejarah purbakala, museum dan peninggalan bawah air; dan pengelolaan karya cetak dan karya rekam.

b. Program Pengelolaan Keragaman Budaya

Program ini bertujuan menciptakan keserasian hubungan antar unit sosial dan antar budaya dalam rangka menurunkan ketegangan dan ancaman konflik di daerah. dengan kegiatan berupa pengembangan kesenian dan kebudayaan



daerah; fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah; serta festival budaya tepian sungai bumi melayu.

c. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

Bertujuan untuk Meningkatkan peran lembaga kepemudaan dalam pengembangan pemuda. dengan kegiatan antara lain seleksi dan pelatihan paskibraka; pembinaan kepemudaan; pembinaan organisasi kwartir cabang gerakan pramuka kab. Tanjabtim.

d. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

Program ini didukung oleh kegiatan berupa penunjang pelaksanaan program SP-3 Kabupaten Tanjung Jabung Timur; serta seleksi kegiatan kepemudaan.

e. Program Pembinaan dan Perasyarakatan Olahraga

Program pembinaan dan perasyarakatan olah raga bertujuan untuk mensosialisasikan kegiatan olah raga kepada masyarakat. dengan kegiatan berupa pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah; pembinaan olahraga tradisional; serta pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat.

f. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan prestasi olahraga dengan kegiatan berupa peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olahraga; pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana olahraga; serta rehabilitasi sedang/berat sarana olahraga.

i. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Program ini bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus mempromosikan kekayaan budaya Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik di dalam maupun diluar negeri; serta pengembangan teknologi informasi pemasaran pariwisata

j. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan sarana dan prasarana pariwisata melalui kegiatan peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata.

k. Program Pengembangan Kemitraan

Dalam pengembangan sektor kepariwisataan diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, stakeholder maupun masyarakat untuk di program ini dilaksanakan kegiatan peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata



Nilai sosial budaya yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat lokal merupakan aset pembangunan yang tidak terperiikan nilainya. Sedang atraksi budaya dan objek wisata merupakan modal dasar untuk pengembangan perekonomian kerakyatan dimasa mendatang. Berbagai atraksi dan objek wisata yang perlu dikelola dan dikembangkan diantaranya adalah Taman Nasional Berbak, Mandi Syafar, dan Makam Orang Kayo Hitam.

Pengembangan pariwisata di daerah lebih efektif jika dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten bersama Pemerintah Provinsi, dengan melibatkan para pihak terkait serta dibantu sepenuhnya oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Langkah awal bisa dicoba melalui kerjasama pariwisata pengembangan “*sister city dibidang Pariwisata*” dengan Daerah/Kota yang sudah maju pariwisatanya.

Sementara itu Lembaga Adat Melayu yang ada saat ini harus senantiasa mampu mengikuti perkembangan dan memapah dinamika kehidupan masyarakat. Untuk itu bangunan lembaga adat berikut perangkat organisasinya yang ada saat ini seyogyanya dapat difungsikan dan dikembangkan secara lebih maksimal. Sedangkan untuk perkembangan dibidang olah raga masih perlu ditingkatkan lagi, baik sarana dan perlengkapan maupun prestasi para atlet.

Berikut tabel perkembangan seni, budaya dan olahraga Tahun 2013 menurut kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Tabel 4.73
Capaian Seni, Budaya dan Olahraga Menurut Kecamatan
Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

NO	Kecamatan	2013			
		Jumlah grup kesenian	Jumlah gedung kesenian	Jumlah klub olahraga	Jumlah gedung olahraga
1	Kecamatan Muara Sabak Barat	4	3	25	15
2	Kecamatan Muara Sabak Timur	3	1	32	22
3	Kecamatan Mendahara	3	1	19	9
4	Kecamatan Mendahara Ulu	1	1	18	8
5	Kecamatan Geragai	3	1	21	11
6	Kecamatan Dendang	2	1	20	10
7	Kecamatan Kuala Jambi	4	1	19	9
8	Kecamatan Sadu	-	1	19	9
9	Kecamatan Nipah Panjang	2	1	20	10



10	Kecamatan Berbak	-	1	17	7
11	Kecamatan Rantau Rasau	17	1	23	13
JUMLAH		39	13	233	123

Sumber : Dinas Budparpora kab. Tanjung Jabung Timur

8. Dinas Kelautan dan Perikanan

Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kelautan dan Perikanan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Kelautan dan Perikanan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pada Tahun 2013, Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan 12 program dan 38 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Kelautan dan Perikanan tertera dalam tabel 4.74 dibawah ini.

Tabel 4.74
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1.041.932.100,00	963.564.314,00	92,48
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	490.450.000,00	477.829.100,00	97,43
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	28.450.000,00	28.450.000,00	100,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	45.000.000,00	35.500.000,00	78,89
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	87.500.000,00	64.248.000,00	73,43
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	27.739.703.500,00	27.612.214.300,00	99,54
Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	2.227.090.000,00	2.166.176.400,00	97,26



Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	316.500.000,00	288.037.000,00	91,01
Program Pengembangan Budidaya Perikanan	4.556.712.400,00	4.411.875.100,00	96,82
Program Pengembangan Perikanan Tangkap	2.105.743.000,00	1.895.576.900,00	90,02
Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1.594.200.000,00	1.342.207.900,00	84,19
program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar	498.400.000,00	445.772.508,00	89,44
JUMLAH	40.731.681.000,00	39.731.451.522,00	97,54

a. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir melalui pengembangan kultur kewirausahaan, penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dan kegiatan usaha ekonomi produktif lainnya berbasis sumberdaya lokal dan berkelanjutan. dengan kegiatannya berupa pemberian bantuan paket perikanan; pembinaan kelompok ekonomi masyarakat pesisir; peningkatan sarana dan prasarana ekonomi.

b. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan peran masyarakat dalam pengamanan pemanfaatan sumberdaya laut. dengan kegiatannya berupa pengawasan dan pengendalian SDI.

c. Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan sumberdaya laut secara bertanggung jawab, serta penegakkan hukum terhadap pencurian dan pengrusakan sumberdaya laut. dengan kegiatannya berupa penyuluhan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut .

d. Program Pengembangan Budidaya Perikanan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan bibit ikan unggul dengan menyempurnakan Balai Benih Ikan, menyediakan sarana/prasarana operasional Balai Benih Ikan dan Tambak Dinas, pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan dan pembinaan serta pengembangan perikanan. Kegiatan pokoknya berupa pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan; pengembangan budidaya keramba dan tambak/kolam; dan biaya operasional BBI.



e. Program Pengembangan Perikanan Tangkap

Program ini bertujuan untuk mengembangkan hasil perikanan tangkap baik melalui pengembangan teknologi maupun sumber daya manusia, adapun kegiatan antara lain pendampingan pada kelompok nelayan perikanan tangkap; peningkatan sarana dan prasarana perikanan tangkap; serta biaya operasional PPI kecamatan.

f. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan dan pemasaran ikan sehingga nelayan mendapat jaminan pasca melaut. Kegiatan ini didukung oleh kegiatan kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan; pengujian bahan kimia berbahaya terhadap mutu produk perikanan; peningkatan sarana pengolahan dan pemasaran serta pengembangan distribusi pasar; serta operasi pabrik es dan cold storage.

g. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar

Program ini bertujuan meningkatkan SDM nelayan sehingga memiliki keahlian untuk meningkatkan nilai tambah ikan, adapun kegiatannya adalah kajian kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar; dan penerapan teknologi kawasan budidaya perikanan.

Terdapat beberapa kendala/hambatan yang dihadapi dalam mencapai sasaran pembangunan dibidang kelautan dan perikanan. Hambatan dan kendala yang dihadapi tersebut antara lain:

- 1). Masih sering terjadinya pelanggaran jalur penangkapan.
- 2). Minimnya pengetahuan dan keterampilan secara teknis baik nelayan umum petani ikan dalam budidaya usaha perikanan.
- 3). Kurangnya permodalan yang dapat disediakan dan belum dapat berkembangnya investor yang berusaha dibidang perikanan secara profesional.
- 4). Seringnya masyarakat yang menggunakan bahan penangkap ikan yang merusak lingkungan (deskrutif).
- 5). Penanganan masalah pelanggaran hukum seperti perizinan, peraturan daerah, dan peraturan lainnya.

Berbagai solusi sebagai tindak lanjut dalam menanggulangi masalah-masalah dibidang kelautan dan perikanan, perlu mempertimbangkan agar dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

- 1). Memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi dibidang perikanan.
- 2). Meningkatkan produksi perikanan tangkap.



- 3). Meningkatkan produksi perikanan budidaya.
- 4). Meningkatkan mutu dan nilai tambah produk hasil perikanan.
- 5). Penataan ruang, pemberdayaan masyarakat dan pengendalian sumber daya ikan.

Dengan luas wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang memiliki potensi ekonomis di sektor perikanan sampai dengan tahun 2013 menghasilkan produksi ikan sebagaimana tabel 4.75 :

Tabel 4.75
Perkembangan Produksi Ikan Menurut Sub Sektor
Di Kab. Tanjung Jabung Timur Tahun 2011-2013

NO	SUB SEKTOR	2011	2012	2013
1	Perairan Laut	23.118 ton	23.678 ton	25.430 ton
2	Perairan Umum	671 ton	678,7 ton	685 ton
3	Kolam	239 ton	274 ton	300 ton
4	Tambak	397 ton	496 ton	512 ton
5	Kerambah Jaring Apung (KJA)	82 ton	176 ton	200 ton
J U M L A H		24.507 ton	25.302,70 ton	27.127 ton
6	Benih Ikan	180.000 ekor	210.000 ekor	240.000 ekor

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang menyadari akan potensi perikanan di kabupaten ini dan kondisi kesejahteraan nelayan memberikan bantuan kapal nelayan (pompong) berikut alat tangkapnya. Tahun 2013 telah didistribusikan sebanyak 725 unit pompong.

Tabel 4.76
Target dan Realisasi Bantuan Kapal Nelayan (Pompong)
per Kecamatan Dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012-2013

NO	KECAMATAN	TARGET (unit)	REALISASI (unit)	PERSENTASE
1	Mendahara	100	108	108%
2	Mendahara Ulu	-	-	-
3	Geragai	30	52	173%
4	Dendang	10	11	110%
5	Muara Sabak Timur	90	130	144,44%
6	Muara Sabak Barat	-	-	-
7	Kuala Jambi	120	142	118%
8	Rantau Rasau	-	-	-
9	Berbak	-	-	-



10	Nipah Panjang	100	172	172%
11	Sadu	100	110	110%
JUMLAH 2013		550	725	131,82%
JUMLAH 2012		550	480	87,27%
TOTAL		1.100	1.205	109,55%

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Tanjung Jabung Timur

9. Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan merupakan salah satu unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 7 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas terhadap unit pelaksana teknis Dinas dalam lingkup Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pada Tahun 2013, Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaksanakan 12 program dan 38 kegiatan. Secara terperinci jumlah anggaran dan realisasi penyerapan belanja Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertera dalam tabel 4.77 dibawah ini.

Tabel 4.77
Anggaran dan Realisasi Penyerapan Anggaran
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun Anggaran 2013

PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
Program Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	272.577.000,00	268.835.585,00	98,63
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan dalam negeri	3.072.333.500,00	2.797.822.378,00	91,07
Program Pelayanan Administrasi	671.843.500,00	642.782.604,00	95,67
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	237.752.500,00	215.438.740,00	90,61
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	15.500.000,00	14.560.000,00	93,94
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	25.000.000,00	24.910.000,00	99,64
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	121.150.000,00	115.265.000,00	95,14



Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi	79.140.000,00	78.140.000,00	98,74
Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	394.060.000,00	361.288.800,00	91,68
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	247.000.000,00	242.495.000,00	98,18
Program Penataan Struktural Industri	104.320.500,00	103.476.059,00	99,19
Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensi	109.730.000,00	103.490.000,00	94,31
JUMLAH	5.350.407.000,00	4.968.504.166,00	92,86

a. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan

Program ini bertujuan untuk mendorong pemberdayaan dan perlindungan industri dalam negeri, serta pengawasan barang beredar. Adapun kegiatan dari program ini berupa peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa; operasionalisasi dan pengembangan UPT kemetrollogian daerah; serta operasi pasar.

b. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang efisien dan efektif serta mengembangkan sistem usaha dan lembaga perdagangan yang berpihak kepada ekonomi kerakyatan. kegiatan pokoknya berupa pengembangan pasar dan distribusi barang/produk; temu usaha misi dagangan dan pasar lelang agro; pembukaan outlet kabupaten Tanjung Jabung Timur; bazar pasar murah; pembangunan pasar sehat tradisional; serta sosialisasi distribusi barang-barang bersubsidi.

c. Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi

Program ini ditujukan untuk mendorong daya saing dengan peningkatan produktivitas dan efisiensi sistem produksi serta peningkatan kapasitas teknologi pada sistem produksi di dunia usaha dan industri dan peningkatan sinergi antar berbagai elemen sistem inovasi, dengan kegiatan diantaranya koordinasi modal ventura bagi industri berbasis teknologi.

d. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah

Tujuan program ini adalah mewujudkan Industri Kecil dan Menengah (IKM) sebagai basis pengembangan industri regional, dengan kegiatan pokoknya berupa pembinaan industri kecil dan menengah dalam memperkuat jaringan klaster industri; pemberian kemudahan izin usaha industri kecil dan menengah; dan fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta.



e. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

Program ini dimaksudkan untuk penyerapan dan penerapan teknologi budidaya, produksi dan kemasan untuk meningkatkan daya saing komoditi andalan di pasaran dengan kegiatan berupa pembinaan kemampuan teknologi industri.

f. Program Penataan Struktur Industri

Tujuan program ini adalah untuk memperkuat dan memperbaiki struktur industri baik dalam hal konsentrasi penguasaan pasar maupun dalam hal kedalaman jaringan pemasok bahan baku dan bahan pendukung, komponen, dan barang setengah-jadi untuk industri hilir, dengan kegiatan berupa penyediaan sarana maupun prasarana klaster industri.

g. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial

Program ini ditunjang kegiatan pokok berupa pembinaan dan pengawasan sentra-sentra potensial.

Program dan kegiatan yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelaksanaannya masih ditemui beberapa permasalahan antara lain :

- 1) Masih terbatasnya kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur teknis dan auditor dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha sehingga ditemui adanya pemanfaatan peralatan industri kecil dan menengah belum dimanfaatkan secara optimal.
- 2) Masih lemahnya koordinasi dalam perencanaan sehingga adanya pembangunan fisik dilapangan belum dapat diselesaikan seperti pembangunan fasilitas pusat sentra jajan yang dilaksanakan.
- 3) Masih rendahnya kesadaran dan aspirasi masyarakat untuk mengelola SDA yang ada menjadi barang yang mempunyai nilai jual dalam meningkatkan pendapatan keluarga terutama berkaitan dengan sektor industri kecil dan menengah.
- 4) Masih terbatasnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam melaksanakan tugas lapangan.

Solusi yang dilakukan guna meminimalisir permasalahan diatas, antara lain :

- 1) Perlu adanya pendidikan teknis dalam meningkatkan kemampuan, pengetahuan dan keterampilan SDM aparatur dalam melakukan pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan khususnya dalam pekerjaan fisik.



- 3) Meningkatkan pembinaan dan motivasi serta pola pikir masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dalam meningkatkan pendapatan keluarga terutama berkaitan dengan sektor industri kecil dan menengah.
- 4) Pemenuhan fasilitas sarana transportasi dalam peningkatan dan pembinaan IKM dan pelaku usaha perdagangan.
- 5) Perlu pendanaan yang lebih signifikan dalam pembinaan terhadap IKM dan pelaku usaha sebagai motor penggerak dalam mendorong ekonomi kerakyatan IKM.

Usaha kecil dan menengah merupakan bagian penting penyokong perekonomian satu daerah. Industri Kecil dan Menengah (IKM) potensial tahun 2012 ada 274 IKM potensial dan 1 industri menengah besar dengan nilai investasi sebesar Rp. 20.981.253.000,00; nilai produksi sebesar Rp. 15.520.629.000,00; serta nilai bahan baku sebesar Rp. 10.553.847.000,00.

Tabel 4.78
Perkembangan Industri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

NO	JENIS INDUSTRI	JUMLAH INDUSTRI	JUMLAH TENAGA KERJA	2013		
				NILAI INVESTASI(Rp)	NILAI PRODUKSI(Rp)	NILAI BAHAN BAKU (Rp)
1	IKM potensial	274	396	357.600.000	422.175.000	31.993.000
2	Industri Menengah Besar	1	133	20.623.653.000	15.098.454.000	10.521.854.000
JUMLAH		275	529	20.981.253.000	15.520.629.000	10.553.847.000

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Tanjung Jabung Timur

Perdagangan lokal juga berkembang cukup pesat, setidaknya telah muncul beberapa minimarket dan pertokoan di beberapa kecamatan. Pasar tradisional yang sudah ada terus berkembang, pada tahun 2012-2013 jumlah pasar tetap yaitu sebanyak 24 unit yang terdiri dari 21 pasar mingguan dan 3 pasar harian, dari sisi kepemilikan 3 pasar merupakan milik masyarakat, 18 pasar merupakan milik pemda dan 3 pasar merupakan milik desa. Dari ke 24 pasar yang ada : 10 unit dalam kondisi baik, 2 unit dalam kondisi sedang dan 12 unit dalam kondisi kurang baik.

Tabel 4.79
Perkembangan Pasar di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2013

Tahun	Jumlah pasar (Unit)	Kondisi (Unit)			Jenis Pasar (Unit)		Kepemilikan (Unit)		
		Baik	Sedang	kurang	Mingguan	Harian	Masyarakat	Pemda	Desa
2011	23	-	-	-	17	6	7	11	5
2012	24	10	1	13	21	3	4	17	3
2013	24	10	2	12	21	3	3	18	3